

**STUDI ASPEK YANG DIPRIORITASKAN  
PADA FAKTOR EKONOMI, SOSIAL, DAN FISIK  
DALAM PENENTUAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KOTA MATARAM**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

**AULIA PURNAMA SARI  
L4D 002 003**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

**STUDI ASPEK YANG DIPRIORITASKAN  
PADA FAKTOR EKONOMI, SOSIAL, DAN FISIK  
DALAM PENENTUAN LOKASI  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MATARAM**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**AULIA PURNAMA SARI  
L4D002003**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 26 September 2003

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

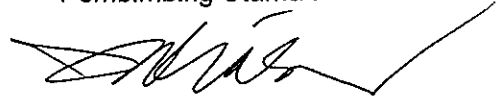
Semarang, September 2003

Pembimbing Pendamping :



**Ir. Parfi Khadiyanto, MSL**

Pembimbing Utama :



**Ir. Nany Yuliasuti, MSP**

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA**

ii

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No.	2421 / T / MTPK / G1
Tgl	8 Maret 2004

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, September 2003

**AULIA PURNAMA SARI**  
L4D002003

*In The Name of ALLAH  
The All Merciful, The All Compassionate*

*All praise be to Allah, the lord of the world. May the peace and blessing be upon  
Muhammad, the last of the messenger*

*Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu ?*

*Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu.*

*Yang memberatkan punggungmu.*

*Dan Kami tinggikan bagimu sebutan namamu.*

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), maka kerjakanlah  
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.*

*Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*

*(Terima kasihku kepada ALLAH  
atas jawaban doa-doaku .....)*

Kepada :

Muhammad Ziyad Al Kautsar  
Magistra Sayyidina Al Kautsar

Semoga kalian dianugerahi ilmu pengetahuan  
lebih dari yang berhasil Bunda raih

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah hirobbil 'alamin*, segala puji bagi ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA, akhirnya tesis yang cukup melelahkan ini dapat selesai. Tema tesis mengenai pedagang kaki lima (*hawkers* atau *street vendors*) ini berjudul "*Studi Aspek Yang Diprioritaskan Pada Faktor Ekonomi, Sosial, dan Fisik Dalam Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Mataram*". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urutan prioritas masing-masing aspek dalam faktor ekonomi, sosial, dan fisik yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi bagi peruntukan aktivitas pedagang kaki lima di Kota Mataram. Hasil penelitian ini kelak diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan/menjadi arahan bagi Pemerintah Kota Mataram dalam menentukan lokasi peruntukan bagi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Mataram.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengkhaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, M.Sc selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Ketua Proyek CPCO (*Capacity Building in Urban Infrastructure Management*), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Magister Teknik Pembangunan Kota.
4. Ir. Nany Yuliasuti, MSP selaku pembimbing utama dan Ir. Parfi Khadiyanto, MSL selaku pembimbing pendamping, yang telah berkenan meluangkan waktu guna memberikan bimbingan di sela-sela kesibukan tugas dan kegiatannya.
5. Samsul Ma'rif, SP, MT selaku pembahas yang telah berkenan memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyempurnaan tesis ini.
6. Ir. Bambang Setioko, M.Eng selaku penguji yang telah berkenan memberi pemantapan dan masukan demi kesempurnaan tesis ini.
7. H. Moh. Ruslan selaku Walikota Mataram, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Magister Teknik Pembangunan Kota.
8. Bunda terkasih Hj. Baiq Nadja'ah, atas limpahan doa dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi langkah penulis.

9. Suami tercinta, Jauhari, SH serta permata hati kebanggaanku Ziyad dan Magistra, atas dukungan, limpahan cinta dan doanya.
10. Keluarga Ir. Jon Sugiarto, terutama Mamiq Aein dan adik-adikku, atas segala dukungan yang telah diberikan.
11. Para pengelola dan dosen pengajar Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
12. Teman-teman CBUIM V yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
13. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada gading yang tak retak. Demikian jua dengan karya ini, tentu tak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karenanya penulis sangat menghargai dan tetap mengharapkan segala tegur sapa dan sumbangan pikiran yang berarti bagi penyempurnaan karya ini. Kiranya DIA menerima segala amal kita bersama dan menilainya sesuai keikhlasan masing-masing.

*Allohumma Amin .....*

Semarang, September 2003

Penulis,

**AULIA PURNAMA SARI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABTRACT .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi .....	7
1.3.1 Tujuan Studi .....	7
1.3.2 Manfaat Studi .....	8
1.3.3 Sasaran Studi .....	8
1.4 Ruang Lingkup Studi .....	9
1.4.1 Ruang Lingkup Materi.....	9
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial.....	10
1.5 Kedudukan Studi .....	13
1.6 Kerangka Pemikiran .....	15
1.7 Pendekatan dan Metoda Pelaksanaan Studi.....	18
1.7.1 Pendekatan Studi .....	18
1.7.2 Metoda Pelaksanaan Studi .....	18
1.7.2.1 Kebutuhan Data .....	18
1.7.2.2 Teknik Pengumpulan Data .....	24
1.7.2.3 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	24
1.7.2.4 Teknik Sampling.....	25
1.7.2.5 Teknik Analisis Data.....	30
1.8 Sistematika Penulisan.....	38
<b>BAB II KAJIAN ASPEK-ASPEK PENENTUAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PERKOTAAN</b>	
2.1 Konsep Sektor Informal.....	40
2.2 Pengertian Sektor Informal .....	41
2.3 Ciri-ciri Sektor Informal .....	43
2.4 Pedagang Kaki Lima di Perkotaan .....	48
2.4.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	48
2.4.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	49
2.4.2.1 Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima .....	49
2.4.2.2 Bentuk Sarana Perdagangan Pedagang Kaki Lima ...	50
2.4.2.3 Pola Penyebaran Pedagang Kaki Lima .....	51
2.4.2.4 Pola Pelayanan Aktivitas PKL .....	53

2.5 Aspek Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima .....	56
2.5.1 Kedekatan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Tempat Tinggal .....	56
2.5.2 Kemudahan Memperoleh Angkutan Umum .....	57
2.5.3 Kedekatan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Pusat Kegiatan/Keramaian Kota.....	58
2.6 Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima Menurut Pemerintah Kota	60
2.7 Konsep Penawaran (Supply) dan Permintaan (Demand) Kegiatan PKL .....	62
2.8 Beberapa Kasus PKL di Negara-negara Lain .....	63
2.8.1 PKL di Kota Kuala Lumpur, Malaysia .....	63
2.8.2 PKL di Kota Cali, Colombia .....	65
2.8.3 PKL di Kota Lima, Peru .....	66
2.9 Ringkasan Kajian Pustaka .....	67

### **BAB III GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA MATARAM**

3.1 Gambaran Umum Kota Mataram.....	70
3.1.1 Kondisi Geografis Kota Mataram .....	70
3.1.2 Peran dan Fungsi Kota Mataram .....	73
3.1.3 Kebijakan Penataan Ruang Kota.....	74
3.1.4 Fasilitas Perkotaan .....	77
3.1.5 Perkembangan Jumlah Penduduk .....	78
3.2 Pedagang Kaki Lima Di Kota Mataram .....	81
3.2.1 Perkembangan dan Jumlah PKL di Kota Mataram .....	81
3.2.2 Peranan PKL dalam Perekonomian Kota Mataram.....	83
3.2.3 Kondisi Eksisting Lokasi PKL di Kota Mataram.....	83
3.2.4 Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Terhadap PKL.....	86
3.3 Karakteristik Lokasi Studi .....	87

### **BAB IV ANALISIS ASPEK YANG DIPRIORITASKAN PADA FAKTOR EKONOMI, SOSIAL, DAN FISIK DALAM PENENTUAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MATARAM**

4.1 Identifikasi Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut PKL	95
4.1.1 Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Ekonomi .....	95
4.1.1.1 Jenis Dagangan PKL.....	96
4.1.1.2 Biaya Angkutan .....	100
4.1.1.3 Waktu Berjualan .....	100
4.1.2 Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Sosial.....	102
4.1.3 Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Fisik.....	103
4.1.3.1 Kemudahan dalam Sarana Transportasi.....	104
4.1.3.2 Kedekatan dengan Kegiatan Masyarakat/ Keramaian Kota .....	105
4.1.3.3 Kedekatan dengan Tempat Tinggal PKL .....	106
4.1.4. Kesimpulan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut PKL.....	107
4.2 Identifikasi Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Pemerintah Kota.....	109

4.2.1 Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Ekonomi.....	109
4.2.1.1 Jenis Dagangan PKL .....	109
4.2.1.2 Waktu Berjualan .....	111
4.2.2 Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Sosial .....	112
4.2.3 Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Fisik .....	113
4.2.3.1 Kemudahan dalam Memperoleh Sarana Transportasi .....	114
4.2.3.2 Kedekatan dengan Kegiatan Masyarakat / Keramaian Kota .....	114
4.2.3.3 Kedekatan dengan Tempat Tinggal PKL .....	116
4.2.4 Kesimpulan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Pemerintah Kota Mataram .....	116
4.3 Identifikasi Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Masyarakat .....	118
4.3.1 Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Ekonomi.....	118
4.3.1.1 Jenis Dagangan .....	118
4.3.1.2 Waktu Berjualan .....	120
4.3.1.3 Biaya Angkutan.....	121
4.3.2 Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Sosial .....	122
4.3.3 Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Fisik.....	122
4.3.3.1 Kemudahan Sarana Angkutan.....	123
4.3.3.2 Kedekatan dengan Kegiatan Masyarakat / Keramaian Kota .....	123
4.3.4 Kesimpulan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Masyarakat .....	125
4.4 Analisis Urutan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Ahli .....	126
4.4.1 Analisis Urutan Prioritas Aspek dalam Faktor Ekonomi .....	126
4.4.1.1 Jenis Dagangan .....	126
4.4.1.2 Biaya Angkutan.....	129
4.4.1.3 Waktu Berjualan .....	129
4.4.2 Analisis Urutan Prioritas Aspek dalam Faktor Sosial .....	132
4.4.3 Analisis Urutan Prioritas Aspek dalam Faktor Fisik.....	133
4.4.3.1 Kemudahan Aksesibilitas .....	133
4.4.3.2 Kedekatan dengan Kegiatan Masyarakat / Keramaian Kota .....	133
4.4.3.3 Kedekatan dengan Tempat Tinggal PKL .....	135
4.4.4 Kesimpulan Urutan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Ahli.....	137
4.5 Implikasi .....	138
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	140
5.2 Rekomendasi Bagi Pemerintah Kota Mataram.....	141
5.3 Usulan Studi Lanjut.....	142
 DAFTAR PUSTAKA .....	143
LAMPIRAN .....	147

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Kebutuhan dan Analisis Data .....	21
Tabel I.2 : Komposisi Responden Studi Aspek Yang Diprioritaskan Pada Faktor Ekonomi, Sosial, dan Fisik Dalam Penentuan Lokasi PKL di Kota Mataram .....	26
Tabel I.3 : Jumlah Sampel PKL Menurut Lokasi dan Jenis Dagangan PKL .....	27
Tabel I.4 : Susunan Responden Ahli Studi Aspek Yang Diprioritaskan Pada Faktor Ekonomi, Sosial, dan Fisik Dalam Penentuan Lokasi PKL di Kota Mataram.....	29
Tabel II.1 : Kriteria Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL.....	57
Tabel II.2 : Kriteria Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Pusat Kegiatan / Keramaian Kota .....	59
Tabel II.3 : Lokasi, Jenis Dagangan, dan Waktu Jualan para PKL se-Kota Mataram .....	61
Tabel III.1 : Fasilitas Perkotaan di Kota Mataram Tahun 2001 .....	77
Tabel III.2 : Perkembangan Penduduk Kota Mataram Tahun 1997-2001 .....	78
Tabel III.3 : Komposisi Penduduk Kota Mataram Menurut Mata Pencaharian Tahun 2001 .....	80
Tabel III.4 : Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Kota Mataram tahun 1997-2002 .....	82
Tabel IV.1 : Prioritas Aspek dalam Faktor Ekonomi Menurut PKL Responden .....	96
Tabel IV.2 : Prioritas Jenis Dagangan PKL Responden .....	97
Tabel IV.3 : Jumlah Pondokan di Kota Mataram Tahun 2003.....	98
Tabel IV.4 : Prioritas Pilihan Lokasi PKL Responden .....	99
Tabel IV.5 : Prioritas Waktu Berjualan Pilihan PKL Responden .....	101
Tabel IV.6 : Prioritas Aspek dalam Faktor Sosial Menurut PKL Responden.....	102
Tabel IV.7 : Prioritas Aspek dalam Faktor Fisik Menurut PKL Responden .....	103
Tabel IV.8 : Prioritas Sarana Transportasi Pilihan PKL Responden.....	104

Tabel IV.9	: Prioritas Jarak Antara Lokasi Usaha PKL dengan Pasar/Pusat Perbelanjaan Menurut PKL Responden .....	105
Tabel IV.10	: Prioritas Jarak Antara Lokasi Usaha PKL dengan Perkantoran, Sekolah Menurut PKL Responden .....	105
Tabel IV.11	: Prioritas Jarak Antara Lokasi Usaha PKL dengan Terminal Menurut PKL Responden .....	106
Tabel IV.12	: Prioritas Jarak Antara Lokasi Usaha PKL dengan Perumahan/Tempat Tinggal Penduduk Menurut PKL Responden.....	106
Tabel IV.13	: Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Pilihan PKL Responden .....	108
Tabel IV.14	: Prioritas Aspek dalam Faktor Ekonomi Menurut Pemerintah Kota Mataram .....	109
Tabel IV.15	: Prioritas Pilihan Lokasi Usaha PKL Makanan Menurut Pemerintah Kota Mataram .....	110
Tabel IV.16	: Prioritas Pilihan Lokasi Usaha PKL Non Makanan Menurut Pemerintah Kota Mataram .....	110
Tabel IV.17	: Prioritas Pilihan Lokasi Usaha PKL Jasa Menurut Pemerintah Kota Mataram.....	110
Tabel IV.18	: Prioritas Pilihan Waktu Berjualan PKL Makanan Menurut Pemerintah Kota Mataram .....	111
Tabel IV.19	: Prioritas Pilihan Waktu Berjualan PKL Non Makanan Menurut Pemerintah Kota Mataram .....	111
Tabel IV.20	: Prioritas Pilihan Waktu Berjualan PKL Jasa Menurut Pemerintah Kota Mataram.....	111
Tabel IV.21	: Prioritas Aspek dalam Faktor Sosial Menurut Pemerintah Kota Mataram .....	112
Tabel IV.22	: Prioritas Aspek dalam Faktor Fisik Menurut Pemerintah Kota Mataram .....	113
Tabel IV.23	: Prioritas Jarak Lokasi Usaha PKL dengan Pasar/Pusat Perbelanjaan Menurut Pemerintah Kota Mataram.....	114
Tabel IV.24	: Prioritas Jarak Lokasi Usaha PKL dengan Perkantoran, Sekolah Menurut Pemerintah Kota Mataram.....	114
Tabel IV.25	: Prioritas Jarak Lokasi Usaha PKL dengan Terminal Menurut Pemerintah Kota Mataram .....	115

Tabel IV.26	: Prioritas Jarak Lokasi Usaha PKL dengan Perumahan/Tempat Tinggal Penduduk Menurut Pemerintah Kota Mataram .....	115
Tabel IV.27	: Prioritas Jarak Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL Menurut Pemerintah Kota Mataram.....	116
Tabel IV.28	: Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Pilihan Pemerintah Kota Mataram .....	117
Tabel IV.29	: Prioritas Aspek dalam Faktor Ekonomi Menurut Masyarakat Responden.....	118
Tabel IV.30	: Prioritas Pilihan Jenis Dagangan PKL Menurut Masyarakat Responden.....	119
Tabel IV.31	: Prioritas Pilihan Lokasi Usaha PKL Makanan/minuman Menurut Masyarakat Responden.....	119
Tabel IV.32	: Prioritas Pilihan Lokasi Usaha PKL Non Makanan Menurut Masyarakat Responden.....	119
Tabel IV.33	: Prioritas Pilihan Lokasi Usaha PKL Jasa Menurut Masyarakat Responden.....	120
Tabel IV.34	: Prioritas Pilihan Waktu Berjualan PKL Makanan/minuman Menurut Masyarakat Responden .....	120
Tabel IV.35	: Prioritas Pilihan Waktu Berjualan PKL Non Makanan Menurut Masyarakat Responden.....	121
Tabel IV.36	: Prioritas Pilihan Waktu Berjualan PKL Jasa Menurut Masyarakat Responden.....	121
Tabel IV.37	: Prioritas Aspek dalam Faktor Sosial Menurut Masyarakat Responden.....	122
Tabel IV.38	: Prioritas Aspek dalam Faktor Fisik Penentuan Lokasi PKL Menurut Masyarakat Responden .....	123
Tabel IV.39	: Prioritas Jarak Antara Lokasi Usaha PKL dengan Pasar/Pusat Perbelanjaan Menurut Masyarakat Responden .....	124
Tabel IV.40	: Prioritas Jarak Antara Lokasi Usaha PKL dengan Perkantoran, Sekolah Menurut Masyarakat Responden .....	124
Tabel IV.41	: Prioritas Jarak Antara Lokasi Usaha PKL dengan Terminal Menurut Masyarakat Responden .....	124
Tabel IV.42	: Prioritas Jarak Antara Lokasi Usaha PKL dengan Perumahan / Tempat Tinggal Penduduk Menurut Masyarakat Responden .....	124

Tabel IV.43	: Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Pilihan Masyarakat Masyarakat Responden.....	125
Tabel IV.44	: Urutan Prioritas Lokasi PKL Makanan/minuman Menurut Ahli.....	127
Tabel IV.45	: Urutan Prioritas Lokasi PKL Non Makanan/minuman Menurut Ahli .....	127
Tabel IV.46	: Urutan Prioritas Lokasi PKL Jasa Menurut Ahli .....	127
Tabel IV.47	: Urutan Prioritas Waktu Jualan PKL Makanan/minuman Menurut Ahli .....	129
Tabel IV.48	: Urutan Prioritas Waktu Jualan PKL Non Makanan/minuman Menurut Ahli .....	130
Tabel IV.49	: Urutan Prioritas Waktu Jualan PKL Jasa Menurut Ahli .....	130
Tabel IV.50	: Urutan Prioritas Aspek dalam Faktor Ekonomi Menurut Ahli.....	131
Tabel IV.51	: Urutan Prioritas Aspek dalam Faktor Sosial Menurut Ahli .....	132
Tabel IV.52	: Urutan Prioritas Lokasi PKL dalam Jarak Dekat Menurut Ahli.....	133
Tabel IV.53	: Urutan Prioritas Lokasi PKL dalam Jarak Sedang Menurut Ahli.....	134
Tabel IV.54	: Urutan Prioritas Lokasi PKL dalam Jarak Jauh Menurut Ahli.....	135
Tabel IV.55	: Urutan Prioritas Jarak Lokasi PKL dengan Tempat Tinggal PKL Menurut Ahli.....	136
Tabel IV.56	: Urutan Prioritas Aspek dalam Faktor Fisik Menurut Ahli .....	136
Tabel IV.57	: Urutan Prioritas Aspek Masing-masing Faktor Menurut Ahli .....	137

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Peta Lokasi Studi.....	12
Gambar 1.2 : Kerangka Pikir.....	17
Gambar 1.3 : Kerangka Analisis Studi Aspek Yang Diprioritaskan Pada Faktor Ekonomi, Sosial, dan Fisik Dalam Penentuan Lokasi PKL di Kota Mataram .....	37
Gambar 2.1 : Pola Penyebaran Mengelompok ( <i>Focus Agglomeration</i> ).....	52
Gambar 2.2 : Pola Penyebaran Memanjang ( <i>Linier Concentration</i> ).....	53
Gambar 3.1 : Peta Administrasi Kota Mataram .....	72
Gambar 3.2 : Peta Pembagian Wilayah Kota Mataram .....	75
Gambar 3.3 : Diagram Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Mataram Menurut Kecamatan Tahun 1997 - 2001 .....	79
Gambar 3.4 : Diagram Komposisi Penduduk Kota Mataram Menurut Mata Pencarian Tahun 2001 .....	80
Gambar 3.5 : Kondisi Eksisting PKL di Kota Mataram .....	85
Gambar 3.6 : Sebaran Lokasi PKL di Kota Mataram.....	90
Gambar 3.7 : Aktivitas di Sekitar Lokasi PKL di Kota Mataram .....	91

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A : Kuesioner .....	147
Lampiran B : Pengkodean .....	180
Lampiran C : Kompilasi Jawaban Responden.....	194
Lampiran D : Hasil Proses Metoda Delphi (Uji Konsistensi Kendall's).....	205
Lampiran E : Lampiran Susunan Responden Ahli .....	225

## ABSTRAK

*Perkembangan kota yang pesat tidak selamanya disertai dengan penambahan kesempatan kerja. Selektifnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pencari kerja, semakin menambah barisan mereka yang tidak mampu tertampung pada aktivitas formal. Hal ini mengakibatkan menjamurnya jumlah aktivitas di sektor yang berseberangan, yaitu sektor informal. Salah satunya adalah pedagang kaki lima (PKL).*

*Keberadaan PKL di perkotaan menjadi dilema bagi pemerintah. Salah satu sisi negatifnya adalah timbulnya kemacetan dan kesemrawutan akibat lokasi usaha mereka yang biasanya tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti halnya yang terjadi di Kota Mataram. Polemik antara pemerintah dengan PKL semakin berkembang ketika upaya relokasi sebagian besar PKL di Jl. AA. Gde Ngurah, Cakranegara ke tempat yang telah disediakan di Jl. Kebudayaan belum berhasil, karena para PKL lebih memilih beraktivitas di tempat-tempat lain. Bahkan sekarang beberapa PKL terlihat mulai beraktivitas di lokasi yang sebenarnya sudah dilarang ini. Apabila ditelusuri maka perbedaan persepsi mengenai prioritas aspek dalam penentuan lokasi PKL antara pemerintah kota dan PKL adalah hal mendasar yang perlu diluruskan. Oleh sebab itu penelitian ini diarahkan untuk mencari titik temu dalam hal penentuan prioritas aspek dari faktor ekonomi, sosial, dan fisik yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi peruntukan bagi PKL menurut pemerintah, para PKL sendiri, serta dengan melibatkan masyarakat sebagai salah satu dari aktor pembangunan kota.*

*Penelitian ini mencoba memadukan antara konsep Bottom Up yaitu menggali konsep-konsep pemikiran dari bawah (melibatkan masyarakat) dengan konsep Top Down. Adapun metoda penelitian yang sesuai dengan konsep tersebut adalah Metoda Delphi, yang dilengkapi dengan metoda distribusi frekuensi. Sedangkan pendekatan penelitian yang dipilih adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui penyebaran kuesioner kepada masing-masing responden dengan teknik survey, observasi, dan wawancara.*

*Berdasarkan survey dan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa ternyata terdapat persamaan dalam prioritas aspek yang dipilih dalam faktor ekonomi, oleh seluruh komponen responden, yaitu aspek waktu jualan dan aspek kedekatan lokasi PKL dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat dalam faktor fisik. Sedangkan perbedaan urutan prioritas aspek terjadi dalam faktor sosial. PKL dan sebagian besar masyarakat memilih aspek keamanan dan kenyamanan, walaupun melihat dari sisi yang berbeda, sedangkan pemerintah dan responden ahli lebih memprioritaskan aspek ketertiban sebagai prioritas utama dalam faktor sosial.*

*Sehubungan dengan hal tersebut, maka alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan lokasi PKL adalah mengatur waktu jualan. Sedangkan dalam kaitannya dengan faktor fisik, maka aspek yang menjadi prioritas untuk dipertimbangkan dalam penentuan lokasi PKL adalah aspek kedekatan dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat/keramaian kota, terutama lokasi-lokasi di sekitar pasar/pusat perbelanjaan.*

## ABSTRACT

*The rapid urban development was not always being followed by increasing job opportunities. Selective prerequisite to be achieved by job seeker increases the number of un-accommodated peoples in formal sectors. Thus, it causes spreading activities of informal sectors, such as hawkers.*

*The existences of hawkers in the urban areas, forms a dilemma to the government. Dilemma for its negative impact such as traffic congestion and disorderness from the location of hawkers that was not in an appropriate uses, as it is in Mataram Municipality. Hence, the polemic between the municipal government and street hawkers increases when the attempt to relocated hawkers from AA. Gde Ngurah Street, Cakranegara to Kebudayaan Street was unsuccessful, because they prefer other areas to operate. Moreover, they even operate in the prohibited areas. Along the ways, different perception on the priority aspect of determining hawker's location between the government and street hawkers should be overcome. Thus, this research aims to explore the points in determining the priority aspect of economic, social and physical factors for street hawker's location according to the government perception, hawkers, and the involvement of community as the actors of urban development.*

*This research tries to combine the conception of bottom up planning of community development (planning from below) with the concept of top down planning. The research method used was Delphi method elaborated with frequency distribution method. The chosen research approach was a descriptive approach through questioner to each respondent, surveys, observation and interview.*

*The research finding shows similarity from all respondent in the priority aspect of economic factor that was operational (selling) time and the physical factor of accessible location of hawkers to the center of community activities. Differences sequence of priority aspect occurs on social factor. Street hawkers and some of the community, though it was seen from different side, prefer the aspect of safety and amenity. Mean while, the municipal government and expert, prefer to prioritize the aspect of orderness in social factor.*

*Therefore, the alternative for the municipal government to determine the street hawker's location was on the aspect of operational (selling) time arrangement. In accordance to the physical factors, the priority aspect to be considered was the accessible location to the center of community activities, especially location around shopping center or traditional markets.*

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam dekade terakhir ini pertumbuhan penduduk di perkotaan sangat pesat. Pertumbuhan penduduk yang terjadi diperkirakan empat kali lebih besar dari pertumbuhan penduduk di perdesaan (UNFPA, 1999). Antara tahun 1990 dan 2025 jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan diproyeksikan akan menjadi dua kali lipat. Apabila hal ini benar-benar terjadi, berarti duapertiga dari penduduk di dunia akan tinggal di perkotaan. Menurut *UN Population Division* (1997), 90 % dari pertumbuhan penduduk kota tersebut akan terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Urbanisasi terjadi sangat cepat di kawasan Asia-Pasifik. Pada daerah ini diperkirakan penambahan penduduk kota adalah 4 % setiap tahunnya.

Akan halnya di Indonesia, di awal millennium III jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 telah mencapai 203,4 juta jiwa. Dari segi kuantitas Indonesia masih merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dengan tingkat pertumbuhan 1,35 % per tahun jumlah penduduk akan menjadi 400 juta jiwa pada tahun 2050.

Sementara itu tren piramida penduduk Indonesia memperlihatkan adanya transisi perubahan penduduk dari muda menjadi tua, sehingga beban ketergantungan cenderung menurun. Artinya, terjadi penurunan penduduk usia muda, namun dilain pihak, terjadi peningkatan proporsi penduduk usia produktif.

Implikasi secara langsung dari meningkatnya jumlah penduduk usia produktif adalah melonjaknya jumlah pencari kerja, yang jika tidak segera ditangani akan meningkatkan jumlah pengangguran. Menurut Ramli (1992 : 7) fakta yang tidak dapat

disangkal dan bahkan menjadi ciri umum di kebanyakan negara-negara berkembang adalah perkembangan kota secara pesat yang tidak disertai dengan penambahan kesempatan kerja.

Ketidakmampuan dunia kerja menyerap tenaga kerja yang ada disamping rendahnya kemampuan yang dimiliki tenaga kerja tersebut memotivasi mereka untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dengan modal pendidikan, ketrampilan, dan sarana yang mereka miliki. Mereka membentuk barisan baru yang lebih dikenal dengan sebutan sektor informal.

Ada dua kenyataan yang tidak dapat dipungkiri berkaitan dengan kehadiran sektor informal. Pertama, kehadirannya sebagai pertanda ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Kedua, sektor informal bertindak sebagai katup pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja. Dengan kata lain kehadiran sektor informal dapat meredakan kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja (Noor Effendy, 2000 : 46).

Salah satu sektor informal dibidang ekonomi yang muncul menjadi fenomena terutama di perkotaan adalah pedagang kaki lima. Dalam kondisi keterbatasan lapangan kerja disektor formal, menjadi pedagang kaki lima dianggap sebagai cara termudah untuk mempertahankan hidup. Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh sektor informal ini yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat beroperasi, bergantung pada sumber daya lokal, dan skala usaha yang relatif kecil. Selain itu juga karena memang ada kebutuhan akan keberadaan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ramli (1992 : 20) bahwa selain sebagai penyedia lapangan pekerjaan, keberadaan sektor informal ini juga dibutuhkan terutama dalam kaitannya dengan berbagai macam produk dan jasa yang dihasilkannya.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk sektor informal diartikan sebagai setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum, dengan tidak mempunyai legalitas formal, kemudian kegiatan perdagangan tersebut dapat dilakukan secara berkelompok sesuai kultur yang dimiliki secara individual (Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan Bandung, 1980, dalam Widodo, 2000 : 26).

Keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan menjadi dilema bagi pemerintah kota, karena disatu sisi sektor ini banyak menyerap tenaga kerja sehingga bisa dijadikan katup pengaman perekonomian, cagar alam bagi mereka yang gagal bersaing di pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, maraknya usaha pedagang kaki lima telah ikut mendukung program pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran.

Disisi lain, kehadiran pedagang kaki lima memberi dampak negatif bagi kualitas lingkungan perkotaan, yaitu adanya kecenderungan munculnya lingkungan yang secara visual berkesan buruk, kotor, dan kumuh. Kondisi ini ditunjukkan oleh adanya penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tidak tertata. Apabila ditelusuri, gangguan estetika tersebut berawal dari latar belakang ekonomis pedagang kaki lima dalam melakukan efisiensi dengan memaksimalkan keterbatasan modal yang mereka miliki. Hal tersebut mereka jabarkan dengan “sederhana” dalam penampilan, sedangkan sederhana sendiri dapat diinterpretasikan sebagai “kondisi apa adanya”. Alur pemikiran inilah yang akhirnya menimbulkan kondisi fisik sarana PKL menjadi buruk, kotor, dan kumuh dalam arti keindahan visualnya.

Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus PKL yang terjadi, salah satunya adalah PKL di Kota Semarang. Adanya benturan antara aspek positif dan negatif pada sektor informal PKL diibaratkan seperti buah simalakama oleh Pemerintah Kota Semarang. Bagi sebagian

warga, PKL membantu memenuhi kebutuhan hidup, tetapi bagi warga yang lain, PKL bagaikan benalu yang mengotori tata ruang kota, mengganggu kepentingan umum, dan membuat wajah kota semakin carut marut. Kota Surakarta dan Kota Magelang juga mengalami hal serupa. Keberadaan PKL yang diibaratkan seperti munculnya cendawan di musim hujan, dirasakan membuat kota menjadi kumuh karena PKL kurang mempunyai kesadaran “berdandan” sehingga lingkungan usaha terkesan kurang tertata rapi. Disamping itu kehadiran mereka sering mengganggu pejalan kaki (Pamungkas, Kukuh Sari, 2003 : 56-57).

Fenomena diatas juga terjadi di kota Mataram, yang merupakan ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Meskipun masih belum termasuk dalam jajaran kota besar di Indonesia, namun kehadiran para pedagang kaki lima terlihat semakin menjamur dan mengisi ruang-ruang publik yang ada di kota ini. Mulai dari Bertais (sekitar terminal Mandalika), Jl. Sandubaya, Jl. AA Gde Ngurah, ruas Jl. Bung Hatta (depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat), Jl. Pejanggik, Jl. Hasanudin, Jl. Caturwarga, Jl. Pemuda, Airlangga, Rembiga, dan kawasan lain yang berdekatan dengan aktivitas masyarakat, dapat dijumpai aktivitas perdagangan sektor informal ini. Mereka umumnya menempati ruang-ruang publik, seperti trotoar sebagai tempat pejalan kaki, bahu jalan sebagai tempat parkir kendaraan, dan emper-emper toko/ruko. Para pejalan kaki akhirnya berada dalam ketidaknyamanan karena trotoar menjadi semakin sempit, yang akhirnya membuat para pejalan kaki harus berpindah ke bahu jalan. Di beberapa ruas jalan di Kecamatan Cakranegara, seperti Jl. Hasanudin (terutama depan Pasar Sindu) dan di Jl. AA Gde Ngurah, pedagang kaki lima telah pula menggunakan bahu jalan sebagai tempat aktivitas usahanya. Seperti yang dinyatakan oleh Iwan Sakral bahwa kiri kanan ruas jalan di depan Pasar Sindu dan Jl. AA Gde Ngurah telah dipenuhi oleh tenda pedagang kaki lima

sehingga sering menimbulkan masalah kesemrawutan (Lombok Post, edisi 18 Februari 2002).

Bukan berita baru bagi sebagian besar warga Kota Mataram apabila Jl. AA Gde Ngurah yang terletak persis di jantung pusat perniagaan Cakranegara semrawut, macet, dan kumuh. Salah satu faktor penyebabnya adalah menumpuknya tenda pedagang kaki lima yang tidak hanya menempati trotoar, tapi ada yang sampai di pinggir jalan. Akibatnya kendaraan mengalami kesulitan mencari tempat parkir dan akhirnya parkir malang melintang tidak karuan (Iwan Sakral dalam Lombok Post edisi 17 Maret 2002).

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah sepakat dengan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) wilayah Kota Mataram guna merelokasi pedagang kaki lima di Jl. AA Gde Ngurah ke lokasi eks Pasar Beras di Jl. Kebudayaan. Namun sampai *deadline* yang telah ditetapkan bahkan hingga saat ini, ternyata para pedagang kaki lima belum menempati areal yang telah disiapkan. Dengan kata lain kebijakan penataan lokasi pedagang kaki lima di kawasan A.A. Gde Ngurah, Cakranegara tidak berjalan efektif.

Apabila dikaji lebih dalam, inti masalah sebenarnya terletak pada belum adanya persamaan prioritas tentang aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi yang sesuai bagi aktivitas dagang para pedagang kaki lima. Pemerintah mempunyai prioritas aspek sendiri, demikian pula halnya dengan si pedagang.

Mengingat pentingnya peranan Kota Mataram sebagai ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus sebagai pintu masuk utama (*the main gate*) bagi wisatawan yang mengunjungi Propinsi NTB, khususnya Pulau Lombok, maka benturan konflik yang terjadi berkaitan dengan penentuan lokasi peruntukkan bagi aktivitas usaha pedagang kaki lima perlu ditangani secara lebih komprehensif. *Stakeholders* dalam hal ini

pemerintah dan terutama pedagang kaki lima yang bersangkutan serta warga masyarakat sebagai konsumen/pengguna jasa publik, perlu dilibatkan guna mencari titik temu tentang prioritas faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi bagi peruntukan aktivitas pedagang kaki lima.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan suatu analisis guna menentukan urutan prioritas aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi bagi aktivitas usaha pedagang kaki lima di Kota Mataram. Hasil analisis diharapkan bermanfaat sebagai masukan/arahan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang menyangkut lokasi pedagang kaki lima di Kota Mataram.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sektor informal khususnya pedagang kaki lima adalah fenomena klasik yang menghiasi ciri kehidupan kota di sebagian besar negara berkembang. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan dilema tersendiri bagi pemerintah kota, karena sisi positif dan negatif yang ada pada sektor informal ini. Pemerintah Kota Mataram pun mengalami hal serupa. Semakin menjamurnya pedagang kaki lima di kota ini menyebabkan wajah kota di beberapa kawasan tertentu menjadi semrawut dan kumuh. Disamping itu banyak diantara mereka juga menempati lokasi-lokasi yang bukan peruntukannya. Hal ini semakin menambah “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Mataram.

Salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah kota berkaitan dengan lokasi bagi pedagang kaki lima di Kota Mataram, telah dilakukan kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima se-Indonesia untuk Wilayah NTB guna merelokasi pedagang kaki lima di kawasan Jl. AA Gde Ngurah ke lokasi eks Pasar Beras di Jl. Kebudayaan. Namun ternyata kebijakan tersebut tidak efektif, yang ditandai dengan

belum ditempatinya areal yang telah menghabiskan banyak dana tersebut oleh pedagang kaki lima.

Setelah mencermati permasalahan-permasalahan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi *problem statement* adalah belum adanya persamaan persepsi tentang prioritas aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi PKL, baik oleh Pemerintah Kota Mataram, pedagang yang bersangkutan, maupun masyarakat pada umumnya.

Oleh sebab itu sebagai langkah awal perlu dilakukan suatu analisis guna menentukan urutan prioritas aspek yang dipertimbangkan dalam kaitannya dengan menentukan lokasi yang sesuai bagi aktivitas usaha pedagang kaki lima di Kota Mataram dengan melibatkan *stakeholders*, dalam hal ini Pemerintah Kota, pedagang kaki lima yang bersangkutan, serta masyarakat. Adapun aspek-aspek yang dimaksud adalah aspek-aspek yang termasuk dalam faktor ekonomi, sosial, dan fisik dalam kaitannya dengan penentuan lokasi PKL. Hasil analisis diharapkan bermanfaat sebagai masukan/arahan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan lokasi pedagang kaki lima di Kota Mataram. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat sebagai *research question* dalam studi ini adalah :

*Bagaimana urutan prioritas aspek-aspek dari faktor ekonomi, sosial, dan fisik dalam menentukan lokasi bagi pedagang kaki lima di Kota Mataram menurut pedagang kaki lima, pemerintah, serta masyarakat ?*

### **1.3. Tujuan, Manfaat dan Sasaran Studi**

#### **1.3.1. Tujuan Studi**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan studi ini adalah untuk menentukan urutan prioritas aspek-aspek dari masing-

masing faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan fisik dalam kaitannya dengan penentuan lokasi bagi aktivitas usaha pedagang kaki lima di Kota Mataram menurut pedagang kaki lima, pemerintah, serta masyarakat.

### **1.3.2. Manfaat Studi**

Hasil studi ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan/arahan bagi Pemerintah Kota Mataram dalam menentukan lokasi yang sesuai bagi aktivitas usaha pedagang kaki lima di Kota Mataram.

### **1.3.3. Sasaran Studi**

Dalam rangka mencapai tujuan studi seperti yang tercantum di atas, maka sasaran studi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi aspek-aspek dari masing-masing faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan fisik dalam penentuan lokasi usaha PKL menurut pedagang kaki lima yang bersangkutan.
2. Mengidentifikasi aspek-aspek dari masing-masing faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan fisik dalam penentuan lokasi usaha PKL menurut pemerintah.
3. Mengidentifikasi aspek-aspek dari masing-masing faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan fisik dalam penentuan lokasi usaha PKL menurut masyarakat.
4. Melakukan analisis dengan menggunakan metoda delphi terhadap aspek-aspek dari masing-masing faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi bagi pedagang kaki lima.
5. Merekomendasikan hasil studi kepada pemerintah kota.

## **1.4. Ruang Lingkup Studi**

### **1.4.1. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah mengkaji PKL dari aspek tata ruang melalui pendekatan dengan metoda delphi. Kajian PKL yang dimaksud adalah melihat urutan prioritas aspek-aspek dari masing-masing faktor yaitu faktor ekonomi, sosial, dan fisik dalam kaitannya dengan penentuan lokasi PKL di Kota Mataram. Pemilihan aspek-aspek yang berhubungan dengan faktor ekonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa aktivitas PKL merupakan aktivitas perdagangan, yang merupakan bagian dari kegiatan perekonomian. Adapun pengertian ekonomi disini berhubungan dengan “keuntungan” yang ingin diperoleh, yang terdiri dari aspek-aspek jenis dagangan, waktu berjualan, dan biaya angkutan. Sedangkan pemilihan faktor sosial dalam penelitian ini dilakukan dengan alasan karena aktivitas PKL dilaksanakan dalam suatu “ruang”, dimana dalam “ruang” tersebut juga terdapat aktivitas-aktivitas masyarakat yang lain. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara aktivitas PKL dengan aktivitas masyarakat yang lain, perlu ada batasan-batasan, dalam hal ini adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan sosial/kemasyarakatan seperti ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan keindahan. Pemilihan aspek-aspek yang berhubungan dengan faktor fisik didasarkan oleh sifat studi ini yang melanjutkan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmadi Widodo, dimana dalam studinya, Ahmadi Widodo melihat sisi karakteristik fisik lokasi PKL dalam kaitannya dengan penentuan lokasi PKL di Kota Semarang, sehingga aspek-aspek dalam faktor fisik, yaitu kedekatan dengan pusat kegiatan masyarakat/keramaian kota, kemudahan aksesibilitas, dan kedekatan tempat tinggal PKL dengan lokasi usaha juga dipilih sebagai salah satu pertimbangan dalam studi ini.

Sedangkan PKL yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pedagang yang berjualan di tempat umum, seperti trotoar, bahu jalan, emper-emper toko, dan diatas saluran. Berdasarkan sarana usaha, pada umumnya mereka termasuk PKL tidak permanen, yang sarana usahanya mudah dipindahkan seperti gerobak dorong dan tenda, tetapi mereka bukan pedagang keliling.

#### **1.4.2. Ruang Lingkup Spasial**

Ruang lingkup spasial studi ini dibatasi pada wilayah administratif Kota Mataram. Dengan tersebarnya lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Mataram, maka lokasi studi ini difokuskan pada lokasi-lokasi dengan jumlah pedagang kaki lima cukup dominan.

Pada umumnya lokasi-lokasi tersebut berada pada ruas-ruas jalan yang berada pada wilayah pusat keramaian kota. Oleh karena itu ruas-ruas jalan yang dipilih sebagai obyek studi adalah yang berada di wilayah pusat keramaian kota. Pada wilayah ini terdapat fasilitas-fasilitas publik seperti tempat ibadah, rumah sakit, perkantoran, perguruan tinggi, sekolah dan *departement store*. Oleh karena itu aktifitas di wilayah ini sangat tinggi.

Ruas-ruas jalan yang dipilih adalah Jalan Veteran, Jalan Pejanggik, Jalan Bung Karno, Jalan Perisaian, Jalan Sriwijaya, Jalan Pemuda, Jalan A.A. Gde Ngurah, dan Terminal Mandalika.

Dalam Rencana Tata Ruang Kota Mataram, Jl. Veteran termasuk dalam kawasan perkantoran, Jl. Pejanggik adalah bagian dari kawasan perkantoran, permukiman dan perdagangan, sedangkan Jl. Sriwijaya merupakan daerah perkantoran dan permukiman. Jl. Perisaian yang merupakan ruas jalan depan *shopping center* termasuk kawasan permukiman dan perdagangan, sedangkan Jl. Pemuda merupakan bagian dari kawasan campuran antara permukiman, perkantoran, pendidikan dan perdagangan (namun khusus untuk pedagang kaki lima lokasinya telah ditentukan di sebelah barat Lapangan Atletik,

bukan disepanjang Jl. Pemuda). Jl. Bung Karno adalah bagian dari kawasan perkantoran dan permukiman, sementara Jl. A.A. Gde Ngurah merupakan kawasan perdagangan yang terletak di jantung pusat perniagaan Cakranegara. Kawasan di jalan ini sebenarnya dilarang untuk lokasi aktivitas PKL, sesuai dengan kesepakatan bersama antara Walikota Mataram dengan Ketua APKLI Kota Mataram Nomor 433/XII/2002. Adapun mengenai lokasi studi, dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.



**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**T E S I S**

**STUDI ASPEK YANG DIPRIORITASKAN  
 PADA FAKTOR EKONOMI, SOSIAL, DAN FISIK  
 DALAM PENENTUAN LOKASI PKL  
 DI KOTA MATARAM**

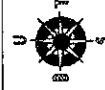
**GAMBAR**

**PETA LOKASI STUDI**

**KETERANGAN :**

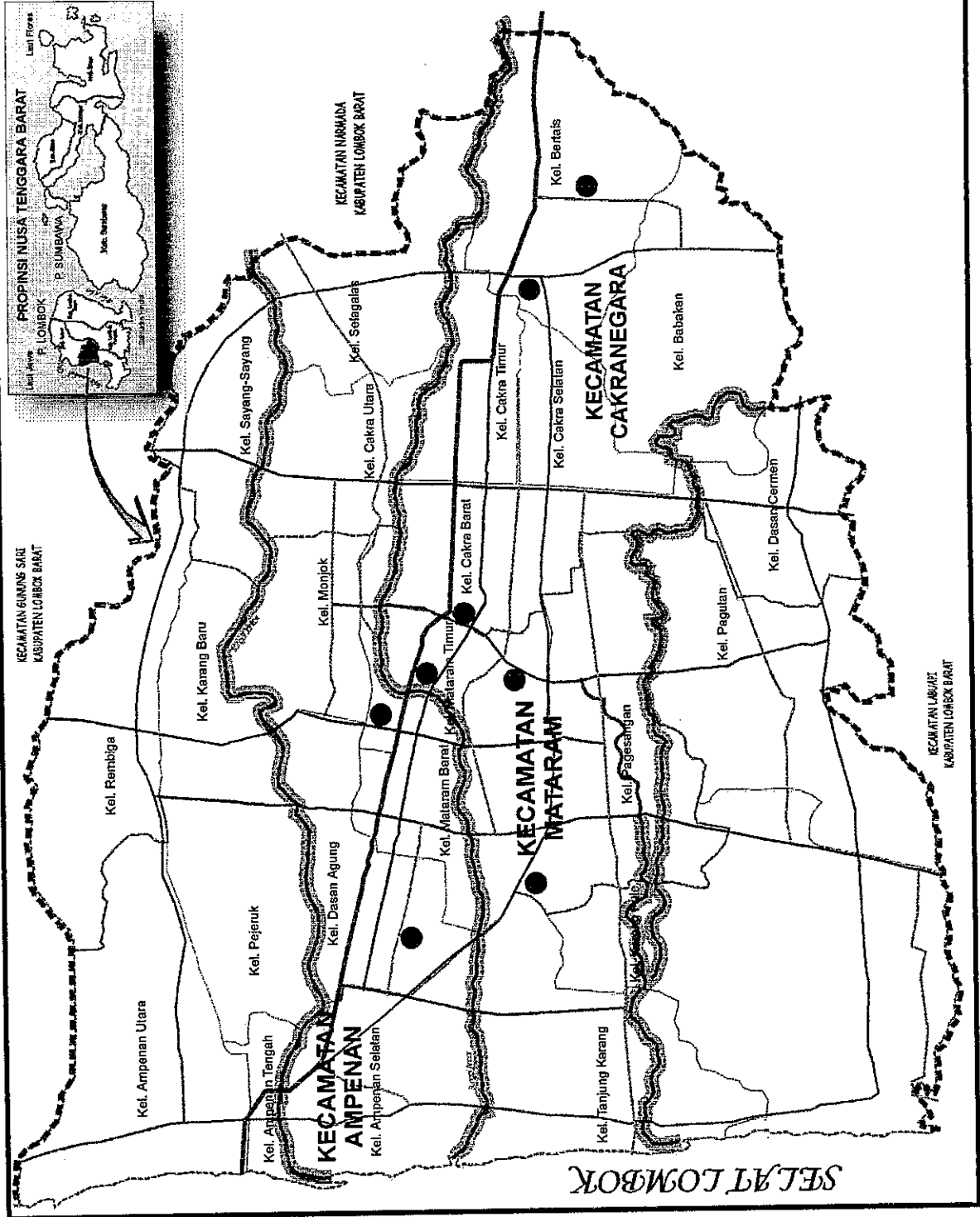
- Batas Kota Mataram
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Utama
- Jalan Antar Sub Wilayah
- Jalan Antar Lingkungan
- Jalan Lingkungan

- Jl. Srikwijaya
- Jl. Pemuda
- Jl. Bung Karno
- Jl. Veteran
- Jl. Perisidan
- Terminal Mancalika
- Jl. Pejanggalik
- Jl. AA. Gede Ngurah



**SKALA** 1 : 1.500.000  
**No. Gambar** 1.1.

**SUMBER**  
**DATA POKOK KOTA MATARAM**  
**TAHUN 2000**



### 1.5. Kedudukan Studi

Penelitian terhadap sektor informal pertama kali dilakukan oleh Keith Hart (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 75), seorang peneliti Inggris, pada tahun 1971. Dari penelitian tersebut muncul istilah sektor informal. Kemudian pada tahun 1976, penelitian dilanjutkan di negara-negara berkembang oleh badan dunia yang menangani buruh, ILO (*International Labour Organization*). Dari penelitian tersebut, ditemukan ciri sektor informal (Sethuraman, 1981 : 15), yaitu merupakan sektor yang mudah dimasuki, menggunakan sumber-sumber asli, merupakan usaha milik keluarga, berskala operasi kecil, intensif tenaga kerja dengan teknologi sederhana, ketrampilan diperoleh dari luar pendidikan formal, dan berada pada pasar yang tidak teratur dan kompetitif.

Studi mendalam tentang sektor informal di Indonesia dilakukan oleh Hans Dieter Evers (dalam Rachbini dan Hamid, 1994 : 3), yang menganalogikan sektor ini sebagai bentuk ekonomi bayangan dengan negara. Penelitian terhadap PKL terutama di kota-kota besar di Indonesia yang merupakan bagian dari sektor informal dilakukan oleh Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid, pada tahun 1990, yang disponsori oleh *United States Agency for International Development* (USAID). Dari penelitian yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya dikenali adanya kecenderungan munculnya perdagangan sektor informal yang berderet sepanjang jalan di setiap berdirinya gedung bertingkat (Rachbini dan Hamid, 1995 : 90-91).

Sebelumnya, pada tahun 1980, Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan Bandung (dalam Widodo, 2000 : 26) melakukan penelitian terhadap kegiatan perdagangan kaki lima, yang memberikan definisi, bahwa PKL adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum, seperti trotoar di

depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah, dengan tidak mempunyai legalitas formal, dimana kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok sesuai kultur yang dimiliki secara individual. Istilah “kaki lima” itu sendiri berasal dari trotoar yang dahulunya berukuran 5 (lima) *feet* atau sama dengan kurang lebih satu setengah meter.

Berikutnya pada tahun 1992, Ramli melakukan penelitian terhadap sektor informal khususnya pedagang kaki lima di Jakarta. Salah satu hasil penelitiannya menjelaskan tentang keberadaan pedagang kaki lima yang selalu berusaha memilih tempat berjualan di pinggir jalan raya, emper-emper toko dan pasar.

Kemudian pada tahun 2000, Widodo dalam tesisnya melakukan penelitian di Semarang guna membuktikan adanya hubungan antara karakteristik lokasi usaha PKL, yaitu kedekatan lokasi usaha dengan tempat tinggal, kedekatan lokasi usaha dengan tempat keramaian/kegiatan kota, serta kemudahan aksesibilitas (angkutan umum) di lokasi, dengan karakteristik PKL, dalam hal ini adalah jenis dagangan. Salah satu rekomendasi yang dihasilkannya menyebutkan diperlukannya penelitian lanjutan yang serupa guna menentukan faktor-faktor yang sesuai bagi penentuan lokasi PKL dengan melibatkan tiga komponen, yaitu PKL, pemerintah kota, dan masyarakat.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya dan rekomendasi dari hasil tesis tersebut, maka studi ini dilakukan. Namun terdapat sedikit perbedaan dengan studi yang dilakukan oleh Widodo, karena studi ini difokuskan untuk menentukan urutan prioritas aspek-aspek dari masing-masing faktor dalam penentuan lokasi PKL, dengan lokasi studi di Kota Mataram dan dengan melibatkan komponen PKL, pemerintah dan masyarakat. Karena penelitian ini bersifat melanjutkan penelitian yang telah ada, maka pilihan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi bagi PKL, disamping sama dengan

faktor-faktor yang telah diteliti sebelumnya, juga ditambah dengan faktor yang diperoleh dari hasil kajian teori maupun peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu faktor sosial.

Hasil studi berupa urutan prioritas aspek dari masing-masing faktor dalam penentuan lokasi PKL ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan/arahan bagi Pemerintah Kota Mataram dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan penentuan lokasi bagi usaha PKL di Kota Mataram.

### **1.6. Kerangka Pemikiran**

Pesatnya laju pertumbuhan penduduk kota berdampak pada melonjaknya jumlah pencari kerja. Menurut Ramli (1992 : 7), kebanyakan di negara berkembang, pesatnya perkembangan kota sering tidak disertai dengan penambahan kesempatan kerja. Hal ini mengakibatkan bermunculannya sektor informal di perkotaan. Salah satunya adalah pedagang kaki lima.

Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan persoalan, karena aktivitas mereka sering menempati lokasi-lokasi yang bukan peruntukannya. Hal ini berakibat menurunnya kualitas lingkungan kota dengan bertebarannya tenda-tenda PKL, baik di kawasan perdagangan, perkantoran maupun pendidikan. Keberadaan mereka yang tidak teratur menimbulkan kesan kesemrawutan bagi kota.

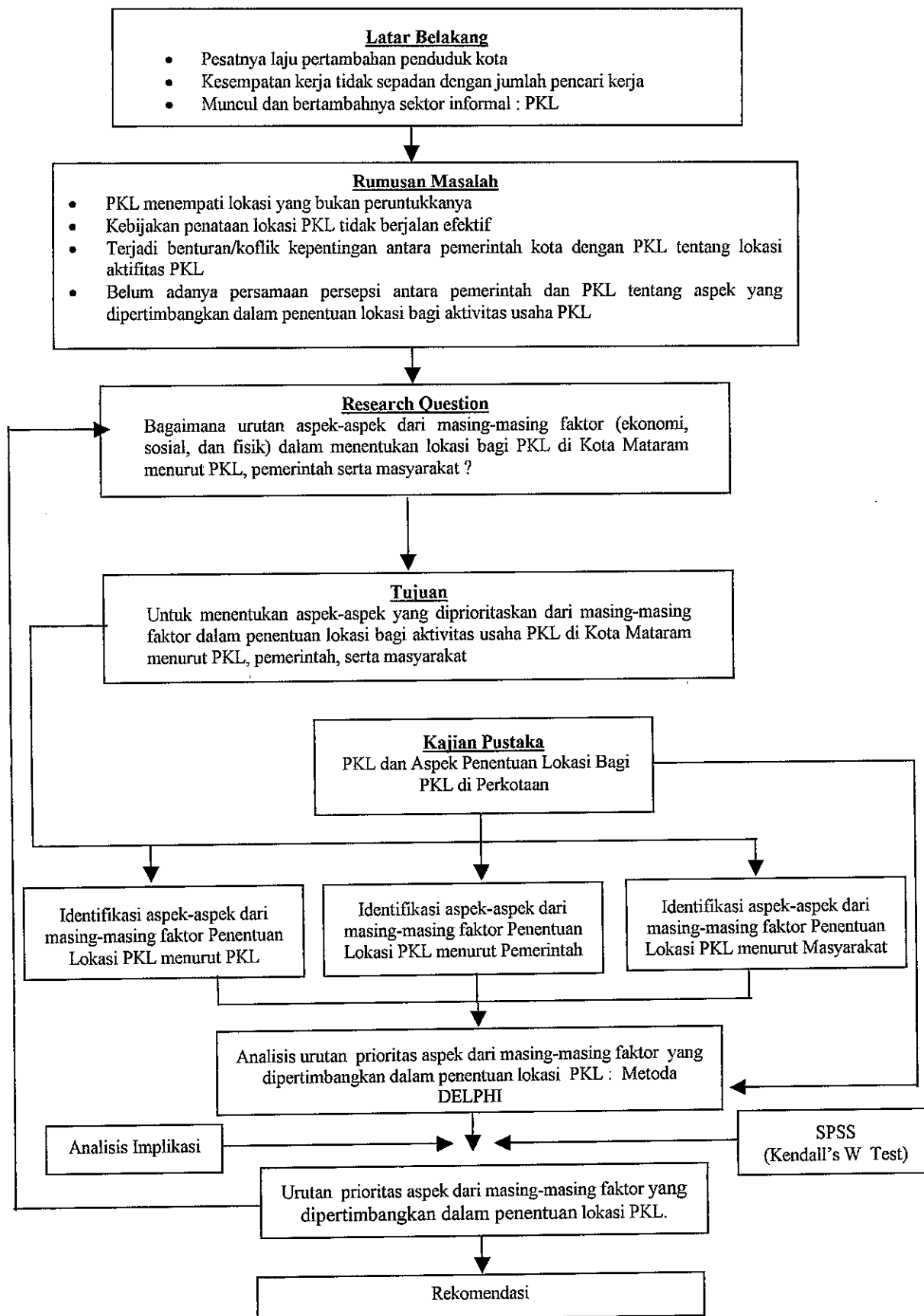
Penggunaan lokasi yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas mereka terjadi karena belum terakomodasikannya sektor informal ini dalam rencana tata ruang kota yang ada, sehingga kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kota untuk menata kegiatan para pedagang kaki lima ini sering mengalami benturan. Akibatnya kebijakan yang dilakukan tidak berjalan secara efektif.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Racbini (1991) pelaksanaan kebijaksanaan mengenai sektor informal ini harus diikuti dengan pengetahuan yang baik tentang keadaan

mereka, baik motivasi maupun aspirasinya. Berkaitan dengan hal itu, maka untuk menghasilkan suatu kebijakan penataan lokasi pedagang kaki lima yang berhasil efektif, perlu dilakukan suatu analisis guna mengetahui aspek-aspek yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial, dan fisik, yang menjadi prioritas untuk dipertimbangkan dalam menentukan lokasi bagi aktivitas usaha mereka, dengan cara memadukan aspek-aspek dari masing-masing faktor menurut pemerintah, masyarakat, serta pedagang yang bersangkutan.

Hasil analisis yaitu urutan prioritas aspek dari masing-masing faktor sebagai hasil pertimbangan para *stakeholder* tersebut diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Mataram dalam membuat kebijakan khususnya mengenai penentuan lokasi, sehingga meminimalkan terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah kota, pedagang kaki lima, dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian kebijakan penataan pedagang kaki lima yang ditempuh diharapkan akan mampu memberikan hasil yang efektif dan efisien. Adapun bagan kerangka pikir studi ini dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.

Gambar : I.2 Kerangka Pikir



## **1.7. Pendekatan dan Metoda Pelaksanaan Studi**

### **1.7.1. Pendekatan Studi**

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah dengan pendekatan deskriptif, yaitu deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif analisis adalah penelitian yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi dengan berbagai teknik seperti survey, angket, observasi, wawancara, studi kasus, dan lain-lain. Sesuai dengan cirinya. metode deskriptif dimulai dengan pengumpulan data, penyusunan, penjelasan, dan kemudian menganalisis (Surakhmad, 1980 : 139-140).

Untuk memperkuat hasil analisis, maka selain menggunakan deskriptif, pendekatan studi juga dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan distribusi frekuensi dan metoda delphi yang akan diperkuat dengan hasil perhitungan *SPSS*.

### **1.7.2. Metoda Pelaksanaan Studi**

Metoda penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat dalam suatu kegiatan penelitian, atau merupakan acuan pelaksanaan studi yang meliputi kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, dan teknik analisis yang digunakan. Adapun metoda pelaksanaan studi ini akan diuraikan pada sub bab-sub bab berikut.

#### **1.7.2.1. Kebutuhan Data**

Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data terhadap obyek yang akan diteliti. Data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### **A. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya/responden dengan cara menyebarkan kuesioner atau melakukan

wawancara langsung dengan panduan kuesioner. Data-data yang ditanyakan berkaitan dengan sasaran dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek dari masing-masing faktor yang ada, yang menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima.

Penyebaran kuesioner atau wawancara dilakukan terhadap sampel yang merupakan obyek dari studi ini, yang terdiri dari :

1. Pedagang kaki lima, yaitu pedagang yang berjualan di tempat umum, seperti trotoar, bahu jalan, emper-emper toko, dan diatas saluran. Berdasarkan sarana berusaha mereka umumnya adalah PKL tidak permanen yang sarana usahanya mudah dipindahkan, seperti gerobak dorong dan tenda, tetapi mereka bukan pedagang keliling.
2. Masyarakat, yaitu masyarakat kota secara luas, baik pegawai/karyawan/pemilik toko disekitar lokasi, maupun konsumen pengguna jasa PKL pada umumnya.
3. Pemerintah Kota Mataram, dalam hal ini akan diwakili oleh dinas/instansi yang terkait/memahami permasalahan PKL di Kota Mataram antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Mataram, BAPPEDA Kota Mataram, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram, Dinas Pendapatan Kota Mataram, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram, Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Mataram, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, serta Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram.
4. Para ahli (*expert*) yang terkait/memahami dengan permasalahan PKL di Kota Mataram, yaitu APKLI, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Mataram, BAPPEDA Kota Mataram, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram, Dinas Pendapatan Kota Mataram, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram, Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan

Menengah Kota Mataram, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, serta Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram, Dosen Fakultas Ekonomi pada Universitas Mataram, dan anggota Komisi B DPRD Kota Mataram.

Selain wawancara, pengumpulan data primer ini juga dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Dari observasi ini selain ditulis secara deskriptif mengenai aktivitas yang terjadi, juga direkam dengan kamera foto mengenai gambaran kondisi pedagang kaki lima di Kota Mataram.

## **B. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang didokumentasikan oleh kantor/dinas/instansi terkait, diantaranya berupa peta jalan di wilayah Kota Mataram, kondisi eksisting PKL di Kota Mataram, dan sebagainya.

Secara rinci kebutuhan data dengan berbagai cara perolehannya, dapat dilihat pada tabel I.1 berikut.

**TABEL I.1**  
**KEBUTUHAN DAN ANALISIS DATA**

NO.	SASARAN	TUJUAN ANALISIS	FAKTOR	ASPEK	JENIS DATA	SUMBER	TEKNIK ANALISIS
1.	Identifikasi prioritas aspek penentuan lokasi PKL menurut PKL.	Untuk mengetahui prioritas aspek yang dipertimbangkan oleh PKL dalam menentukan lokasi usaha mereka.	Faktor Ekonomi  Faktor Sosial  Faktor Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Dagangan</li> <li>• Biaya Angkutan</li> <li>• Waktu Berjualan</li> <li>• Keamanan</li> <li>• Kenyamanan</li> <li>• Ketertiban</li> <li>• Keindahan</li> <li>• Kebersihan</li> <li>• Kemudahan</li> <li>• Aksesibilitas</li> <li>• Kedekatan dengan Pusat Kegiatan Masyarakat / Keramaian Kota</li> <li>• Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempal Tinggal PKL</li> </ul>	Data primer	Responden : PKL dengan kuesioner	Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif dengan Distribusi Frekuensi
2.	Identifikasi prioritas aspek penentuan lokasi PKL menurut masyarakat	Untuk mengetahui prioritas aspek yang dipertimbangkan oleh masyarakat dalam penentuan lokasi PKL	Faktor Ekonomi  Faktor Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Dagangan</li> <li>• Biaya Angkutan</li> <li>• Waktu Berjualan</li> <li>• Keamanan</li> <li>• Kenyamanan</li> <li>• Ketertiban</li> <li>• Keindahan</li> <li>• Kebersihan</li> </ul>	Data primer	Responden : masyarakat dengan kuesioner	Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif dengan Distribusi Frekuensi

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan Aksesibilitas</li> <li>• Kedekatan dengan Pusat Kegiatan Masyarakat / Keramaian Kota</li> </ul>	Faktor Fisik					
3.	Identifikasi prioritas aspek penentuan lokasi PKL menurut pemerintah	Untuk mengetahui prioritas aspek yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam penentuan lokasi PKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Dagangan</li> <li>• Waktu Berjualan</li> <li>• Keamanan</li> <li>• Kenyamanan</li> <li>• Ketertiban</li> <li>• Keindahan</li> <li>• Kebersihan</li> <li>• Kemudahan Aksesibilitas</li> <li>• Kedekatan dengan Pusat Kegiatan Masyarakat / Keramaian Kota</li> <li>• Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL</li> </ul>	Faktor Ekonomi  Faktor Sosial  Faktor Fisik			Data primer dan sekunder	Asisten I Bidang Pemerintahan, BAPPEDA, Bag. Ekonomi, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebersihan, Dinas Pendapatan, Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Mengengah, Kantor Satpol PP	Deskriptif Kuantitatif dan Kuantitatif dengan Distribusi Frekuensi
4.	Analisis prioritas aspek penentuan lokasi PKL menurut responden ahli	Untuk mengetahui prioritas aspek yang dipertimbangkan oleh responden ahli dalam penentuan lokasi bagi PKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Dagangan</li> <li>• Biaya Angkutan</li> <li>• Waktu Berjualan</li> <li>• Keamanan</li> <li>• Kenyamanan</li> <li>• Ketertiban</li> <li>• Keindahan</li> <li>• Kebersihan</li> </ul>	Faktor Ekonomi  Faktor Sosial		Data primer berdasarkan temuan studi (hasil identifikasi )	APKLI, Asisten I Bidang Pemerintahan, BAPPEDA, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan,	Metoda Delphi	



### 1.7.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyebaran *kuesioner* atau wawancara langsung dengan menggunakan *kuesioner* yang diajukan kepada responden. Pertanyaan dalam *kuesioner* tersebut dapat berupa pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka berisi pertanyaan yang dapat secara bebas dijawab oleh responden, sedangkan pertanyaan tertutup berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan memilih alternatif jawaban yang telah disediakan.
2. *Observasi* atau pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui lokasi pedagang kaki lima. Hasil observasi ini selain ditulis secara deskriptif juga direkam dengan kamera foto.
3. *Dokumentasi*, yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan, misalnya jumlah pedagang kaki lima, serta perundang-undangan yang mengatur pedagang kaki lima yang dapat diperoleh dari dinas atau instansi terkait.

### 1.7.2.3. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data primer yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan yang dilakukan masih merupakan data mentah. Agar data tersebut dapat lebih berguna bagi penelitian ini, diperlukan suatu pengolahan dan penyajian data sehingga dapat dilakukan analisis. Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan dalam teknik pengolahan dan penyajian data ini adalah sebagai berikut :

1. *Editing*, merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data yang masuk apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian atau kurang lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya. *Editing* dilakukan dengan harapan akan diperoleh data yang benar-benar *valid* dan *reliable*, serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. *Coding*, merupakan proses pemberian tanda, simbol ataupun kode pada setiap data yang termasuk dalam kelompok yang sama. Tanda tersebut dapat berupa angka atau huruf.
3. *Tabulating*, adalah tahap memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, gambar, dan grafik. Sedangkan untuk data sekunder tidak diperlukan lagi pengolahan lebih lanjut, karena data tersebut telah disajikan secara sistematis dan untuk penyajiannya disesuaikan dengan analisis yang dilakukan.

#### 1.7.2.4. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah cara pengumpulan data dimana yang diselidiki adalah elemen-elemen sampel dari suatu populasi. Yang dimaksud dengan elemen-elemen sampel disini adalah responden terpilih dalam studi yang dilaksanakan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri pedagang kaki lima, masyarakat, dan pemerintah Kota Mataram. Dalam Pabundu (1997 : 33) disebutkan bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan yang jelas tentang batas minimal besarnya sampel yang dapat diambil dan dapat mewakili suatu populasi yang akan diteliti. Namun demikian dalam *teori sampling* dikatakan bahwa sampel yang terkecil dan dapat mewakili distribusi normal adalah 30 (tiga puluh).

UPT-PUSTAK-UNDIP

Adapun komposisi responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel I.2 berikut ini.

**TABEL I.2**  
**KOMPOSISI RESPONDEN**  
**STUDI ASPEK YANG DIPRIORITASKAN**  
**PADA FAKTOR EKONOMI, SOSIAL, DAN FISIK**  
**DALAM PENENTUAN LOKASI PKL DI KOTA MATARAM**

NO.	KELOMPOK RESPONDEN	JUMLAH (orang)
A.	PKL	10 % dari jumlah populasi pada setiap lokasi studi
B.	Masyarakat	100
C.	<b>Pemerintah :</b> 1. Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Mataram 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram 3. Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram 4. Dinas Pendapatan Kota Mataram 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram 6. Dinas Kebersihan Kota Mataram 7. Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Mataram 8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram 9. Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram	1 1 1 1 1 1 1 1 1
D.	<b>Ahli/pemerhati masalah PKL:</b> 1. Wakil PKL : APKLI Wilayah NTB 2. <b>Masyarakat :</b> ▪ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ▪ Anggota Komisi B DPRD Kota Mataram 3. <b>Pemerintah :</b> ▪ Asisten I Bidang Pemerintahan ▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram ▪ Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram ▪ Dinas Pendapatan Kota Mataram ▪ Dinas Kebersihan Kota Mataram ▪ Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Mataram ▪ Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram ▪ Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram	2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sumber : Hasil Survey, 2003

Teknik sampling yang digunakan tergantung dari alat analisis yang dipilih. Oleh karena itu sampling yang digunakan dalam studi ini, yaitu :

### 1. PKL

Bagi responden PKL, menggunakan teknik sampling *stratified proporsional purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja yang didasari bahwa sampel dimaksud representatif atau mewakili populasi dan dilakukan dengan membagi strata berdasarkan jenis dagangan di setiap lokasi, serta sampel diambil secara proporsional yaitu sebesar 10 % untuk setiap jenis dagangan di lokasi studi. Pengambilan sampel sebesar 10 % didasari bahwa studi ini bersifat *deskriptif*. Menurut Singarimbun (1995 : 37) jumlah sampel dalam penelitian deskriptif adalah 5% - 10 % dari jumlah populasi. Berdasarkan survai di lapangan, maka jumlah sampel PKL di setiap lokasi dan masing-masing jenis dagangan dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

**TABEL 1.3**  
**JUMLAH SAMPEL PKL**  
**MENURUT LOKASI DAN JENIS DAGANGAN PKL**

No.	Lokasi	Jenis Dagangan						Jumlah	
		Makanan		Non Makanan		Jasa		Populasi	Sampel
		Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel		
1.	Jl. Pejanggit	22	2	21	2	5	1	48	5
2.	Jl. Bung Karno	9	1	-	-	2	1	11	2
3.	Jl. Perisaian	38	4	-	-	4	1	42	5
4.	Jl. Sriwijaya	17	2	8	1	7	1	32	4
5.	Jl. A.A. Gde Ngurah	10	1	15	2	3	1	28	4
6.	Jl. Pemuda	43	4	7	1	6	1	56	6
7.	Jl. Veteran	14	1	-	-	2	1	16	2
8.	Terminal Mandalika	30	3	18	2	11	1	59	6
<b>Jumlah</b>		183	18	69	8	40	8	292	34

Sumber : Hasil survai, diolah kembali, 2003

Keterangan jenis dagangan :

- a. Makanan, terdiri dari makanan ringan, nasi bungkus, lauk pauk, gorengan, soto/bakso/mie ayam, sate, martabak/terang bulan, nasi goreng, bubur kacang hijau dan minuman.
- b. Non makanan, meliputi jam, kacamata, mainan anak, buku/poster/koran/majalah, helm, kaset/VCD, pakaian, tas, bensin, dan rokok.
- c. Jasa, yaitu tambal ban, cukur rambut, sol sepatu.

## 2. Masyarakat

Bagi responden masyarakat, menggunakan teknik sampling *accidental sampling*. Menurut Soehartono (2000 : 62), dalam teknik sampling ini orang yang diambil sebagai sampel adalah mereka yang kebetulan ditemukan atau mudah ditemui/dijangkau. Nawawi menambahkan bahwa dalam *accidental sampling*, peneliti mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemuinya. yang termasuk dalam kriteria populasi penelitian (2001 : 156). Adapun masyarakat dalam studi ini adalah masyarakat kota secara luas sebagai konsumen pengguna jasa PKL, yang terdiri dari pegawai/karyawan, pemilik toko dan pemilik rumah di sekitar aktivitas lokasi pedagang (pegawai Kantor Gubernur Propinsi NTB, RSUD Mataram, RSB Tresna, SMEA Negeri 2 Mataram, karyawan Bank Antar Daerah, PT. Persero ASKES Cabang Mataram, pemilik Toko Internasional, Toko Tjintjin Lima, Hj. Baiq Ridwah, Ni Made Marsi) dan pembeli bebas lainnya. Jumlah populasi masyarakat diasumsikan sebagai jumlah penduduk Kota Mataram. Sedangkan jumlah sampel ditentukan dengan rumus menurut pendapat Slovin (dalam Umar, 2001 : 78), yaitu :

$$n = \frac{N}{(N e^2) + 1}$$

Dimana :

- n = ukuran sampel
- N = ukuran populasi
- e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (derajat kecermatan)

Dengan nilai N (ukuran populasi) sebesar 317.434 jiwa dan e (derajat kecermatan) sebesar 10 %, maka jumlah sampel masyarakat adalah sebesar  $99,97 \approx 100$  responden.

### 3. Pemerintah Kota Mataram dan Ahli (*Expert*)

Bagi responden pemerintah kota dan para ahli (*expert*), digunakan teknik sampling secara *purposive sampling*. Menurut Umar (2001 : 92) teknik sampling secara *purposive* adalah pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui. Teknik sampling ini dianggap sesuai dengan alat analisis yang digunakan, khususnya penggunaan metoda delphi yang mensyaratkan responden adalah pakar (*expert*) dalam hal ini yaitu orang-orang yang terkait/betul-betul memahami permasalahan mengenai PKL. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka susunan dinas/instansi Pemerintah Kota Mataram dan para ahli responden dalam studi ini dapat dilihat pada Tabel I.4 berikut.

**TABEL I.4**  
**SUSUNAN PARA RESPONDEN AHLI**  
**STUDI ASPEK YANG DIPRIORITASKAN**  
**PADA FAKTOR EKONOMI, SOSIAL, DAN FISIK**  
**DALAM PENENTUAN LOKASI PKL DI KOTA MATARAM**

No.	Jabatan Responden	Dinas/Instansi/Lembaga/Organisasi
1.	Asisten I	Bidang Pemerintahan
2.	Kepala Bidang Ekonomi	BAPPEDA
3.	Kepala Dinas	Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan
4.	Kepala Dinas	Dinas Pendapatan
5.	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.	Kepala Dinas	Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
7.	Kepala Dinas	Dinas Kebersihan
8.	Kepala Bagian	Bagian Ekonomi
9.	Kepa Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	Ketua Komisi B DPRD	Anggota DPRD Kota Mataram
11.	Wakil Ketua Komisi B DPRD	Anggota DPRD Kota Mataram
12.	Dosen Fakultas Ekonomi	Universitas Mataram
13.	Dosen Fakultas Ekonomi	Universitas Mataram
14.	Ketua APKLI Wilayah NTB	APKLI Wilayah NTB
15.	Sekretaris APKLI Wilayah NTB	APKLI Wilayah NTB

Sumber : Hasil Survey, 2003.

#### **1.7.2.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kuantitatif* baik dengan menggunakan distribusi frekuensi maupun metoda delphi. Adapun masing-masing teknik analisis kuantitatif yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### **A. Teknik Analisis Distribusi Frekuensi**

Distribusi frekuensi didefinisikan sebagai cara pengelompokan data kedalam beberapa kelompok (kelas), yang berdasarkan pengelompokan tersebut dapat dihitung banyaknya data yang masuk dalam tiap kelas. Adapun distribusi frekuensi yang digunakan dalam studi ini adalah distribusi frekuensi prosentase, yaitu suatu ringkasan dalam bentuk tabel dari sekelompok data yang menunjukkan frekuensi prosentase bagi setiap kelas.

Teknik analisis distribusi frekuensi dipergunakan untuk mengelompokkan data primer yang diperoleh dari pengisian jawaban kuesioner oleh responden, baik PKL, masyarakat, maupun pemerintah. Jawaban kuesioner ini meliputi identifikasi terhadap urutan prioritas aspek dari masing-masing faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan fisik dalam penentuan lokasi PKL. Adapun tabel distribusi frekuensi dalam studi ini akan disajikan dalam bentuk tabulasi.

##### **B. Teknik Analisis Metoda Delphi**

###### **1. Tujuan Metoda Delphi**

Tujuan penggunaan Metoda Delphi dalam penelitian ini adalah untuk meminta pendapat para pakar dalam menentukan prioritas aspek dari masing-masing faktor dalam penentuan lokasi PKL. Adapun para pakar disini terdiri dari pemerintah, masyarakat, serta PKL.

## 2. Konsep Dasar dan Penerapan Metoda Delphi

Konsep dasar Metoda Delphi sebenarnya didasari oleh konsep penyelenggaraan diskusi yang diikuti oleh sekelompok orang dalam suatu panel yang membahas tentang suatu topik untuk mencapai suatu konsensus. Dalam studi ini Metoda Delphi dilakukan dengan tidak mempertemukan secara langsung para ahli (*expert*) yang telah dipilih, tetapi mempertemukan mereka melalui suatu serangkaian pertanyaan (kuesioner) sebagai alat untuk menyampaikan pikiran/pendapat mereka.

Metoda Delphi dapat dilakukan dengan beberapa putaran, yang berupa serangkaian proses tanya jawab melalui penyebaran kuesioner. Jawaban hasil dari suatu putaran akan menjadi masukan bagi penyusunan pertanyaan untuk putaran berikutnya, kecuali putaran terakhir yang merupakan penutup dari proses tanya jawab tersebut. Melalui pelaksanaan proses tersebut diharapkan terjadi proses konvergensi yang dilakukan secara bertahap. Proses konvergensi itu sendiri merupakan proses untuk menyamakan persepsi untuk menuju pada suatu pengambilan keputusan atas kesepakatan bersama. Proses pelaksanaan putaran biasanya dilakukan secara serial.

Untuk melihat hasil konsistensi jawaban responden, maka dalam studi ini digunakan tiga putaran, dimana hasil putaran pertama menjadi input bagi klarifikasi di putaran kedua. Demikian pula hasil pada putaran kedua akan menjadi input bagi klarifikasi di putaran ketiga.

## 3. Disain Penelitian Metoda Delphi

Disain penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip konsep Metoda Delphi dalam studi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Metoda Delphi digunakan untuk meminta pendapat para ahli dalam menentukan prioritas aspek dari masing-masing faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan

lokasi PKL. Adapun para ahli yang dimaksud mewakili pihak pemerintah, masyarakat, serta PKL.

- Putaran pertama pelaksanaan Metoda Delphi ini memiliki tujuan untuk mengetahui urutan prioritas aspek dari masing-masing faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi PKL. Selanjutnya putaran kedua memiliki dua tujuan, yaitu : 1). Untuk memberikan masukan kepada responden tentang perbandingan antara jawaban responden secara individu dengan jawaban kelompok responden secara akumulatif; 2). Untuk mengetahui konsistensi jawaban pada saat putaran kedua terhadap pertanyaan yang sama dengan putaran pertama, sehingga dapat diketahui perubahan pendapat responden. Sedangkan putaran ketiga bertujuan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden sebagai keputusan akhir dari perubahan jawaban yang dipilih, sekaligus sebagai penentuan prioritas terhadap aspek dari masing-masing faktor yang dipertimbangkan oleh responden dalam menentukan lokasi PKL.
- Bentuk pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka (*open ended questions*) yang memungkinkan peserta dapat memberikan sumbangan jawaban, informasi, pendapatnya secara terbuka. Sebagai perangsang (*stimulant*), maka akan disediakan beberapa alternatif jawaban yang dapat dipertimbangkan. Alternatif jawaban ini diambil dari hasil kajian literatur.
- Peserta yang menjadi anggota panel responden pada penelitian yang menggunakan Metoda Delphi adalah para ahli (*expert*) yang memahami masalah PKL di Kota Mataram. Dalam penelitian ini, responden yang dipilih adalah pemerintah (Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Mataram, BAPPEDA Kota Mataram, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram, Dinas Pendapatan Kota Mataram, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram, Dinas Kebersihan Kota

Mataram, Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Mataram, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram dan Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram), masyarakat pemerhati masalah PKL seperti Dosen Fakultas Ekonomi pada Universitas Mataram, anggota Komisi B DPRD Kota Mataram (yang membidangi masalah perekonomian), PKL dalam hal ini akan diwakili oleh APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima se-Indonesia) Wilayah NTB.

- Didalam pemberian informasi melalui jawaban atas pertanyaan yang diajukan, Metoda Delphi mempersyaratkan adanya sifat *anonymity*, yang meniadakan latar belakang peserta sebagai faktor yang mempengaruhi jawaban-jawaban mereka dan kemampuan berkomunikasi.
- Salah satu ukuran untuk menentukan tercapainya konsensus adalah adanya kestabilan jawaban dari responden.

#### **4. Langkah-langkah Penerapan Metoda Delphi**

Penerapan metoda delphi dalam studi ini dilakukan dalam 3 putaran. Adapun secara garis besar alur pelaksanaan tiap putaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **Putaran I : Identifikasi Urutan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL.**

Pada tahap ini, responden diminta untuk mengemukakan pendapat mengenai aspek-aspek yang menjadi prioritas mereka dalam menentukan lokasi usaha PKL. Responden (pakar) dapat menambah atau mengurangi aspek-aspek yang ada, karena metoda delphi adalah metoda yang menghasilkan pendapat/pemikiran para pakar.

Adapun aspek-aspek yang akan ditentukan oleh responden meliputi aspek-aspek dari faktor ekonomi, sosial, dan fisik dalam menentukan lokasi bagi usaha PKL, yaitu :

- a. Faktor Ekonomi : jenis dagangan, biaya angkutan, dan waktu berjualan.
- b. Faktor Sosial : keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan keindahan, dan kebersihan.

- c. Faktor Fisik : kemudahan aksesibilitas (sarana angkutan kota), kedekatan dengan pusat kegiatan masyarakat/keramaian kota, dan kedekatan lokasi usaha PKL dengan tempat tinggal PKL.

Selanjutnya hasil dari putaran I ini akan dikompilasi untuk diajukan pada putaran II. Untuk lebih jelasnya kuesioner putaran I dapat dilihat pada lampiran.

### **Putaran II : Pengungkapan dan Peninjauan Ulang Hasil Putaran I**

Hasil putaran I diungkapkan pada putaran II. Selanjutnya dalam tahap ini responden diminta untuk meninjau kembali pendapatnya dengan melihat hasil kesimpulan umum (konsensus). Jika responden tidak sependapat terhadap hasil pada putaran I dan ingin merubah pendapatnya, responden diharapkan dapat memberikan argumen yang logis.

Pada putaran II ini diharapkan dapat diperoleh hasil berupa urutan prioritas aspek dari masing-masing faktor yang dipertimbangkan bagi penentuan lokasi PKL. Hasil ini kemudian akan dikemukakan kepada para responden dalam putaran III. Adanya perbedaan pendapat dari masing-masing responden diharapkan dapat diatasi dengan pemberian argumen yang kuat dan logis dari masing-masing responden serta konsekuensi terhadap jawaban tersebut.

### **Putaran III : Pengungkapan Hasil Putaran II dan Penentuan Prioritas Aspek dari Masing-masing Faktor Penentuan Lokasi PKL**

Pada tahap ini, hasil dari tahap II dipresentasikan kepada responden. Hasil putaran II ini berupa konsensus para pakar mengenai urutan prioritas aspek dari masing-masing faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi PKL.

Pemberian ranking/prioritas dilakukan dengan membandingkan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain pada faktor yang bersangkutan melalui pemberian nilai (angka) sesuai dengan tingkatan yang paling menentukan hingga kurang menentukan.

Berdasarkan hasil pada putaran terakhir ini, akan disusun kesimpulan yang dapat diukur dengan menggunakan ukuran pusat (*central tendency*) dan dispersi. Adapun perhitungan statistik yang dilakukan, meliputi :

**a. Ukuran Pusat (*central tendency*)**

Perhitungan ukuran pusat memberikan gambaran tentang pemusatan nilai-nilai observasi sampel. Cara perhitungan ukuran pusat yang digunakan untuk mendukung hasil kesimpulan dalam metode delphi adalah **rata-rata** dan **median**.

▪ **Perhitungan Rata-rata Hitung :**

$$X = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{N}$$

$$X = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{N}$$

Dimana :

$X_1$  = data ke 1

$N$  = banyak data/sampel.

▪ **Perhitungan Median**

Median merupakan nilai tengah. Jika sampel berjumlah ganjil, maka median adalah data paling tengah setelah data disusun menurut nilainya. Sedangkan untuk sampel yang berjumlah genap, median adalah sama dengan rata-rata hitung dua data tengah setelah data disusun menurut nilainya (Sudjana, 1992 : 78).

**b. Dispersi**

Ukuran dispersi meliputi :

▪ **Range =  $D_b - D_k$**

Dimana :

$D_b$  = Data terbesar

$D_k$  = Data terkecil

c. **Inter – quartile range (IQR)**

d. **Standar Deviasi**

e. **Distribusi Frekuensi (Kurva dan Poligon Frekuensi)**

Untuk menentukan urutan prioritas aspek, digunakan uji koefisien konkordansi Kendall (W), karena jumlah responden lebih dari 3. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$W = \frac{12S}{K^2(J^3 - 1)}$$

Dimana :

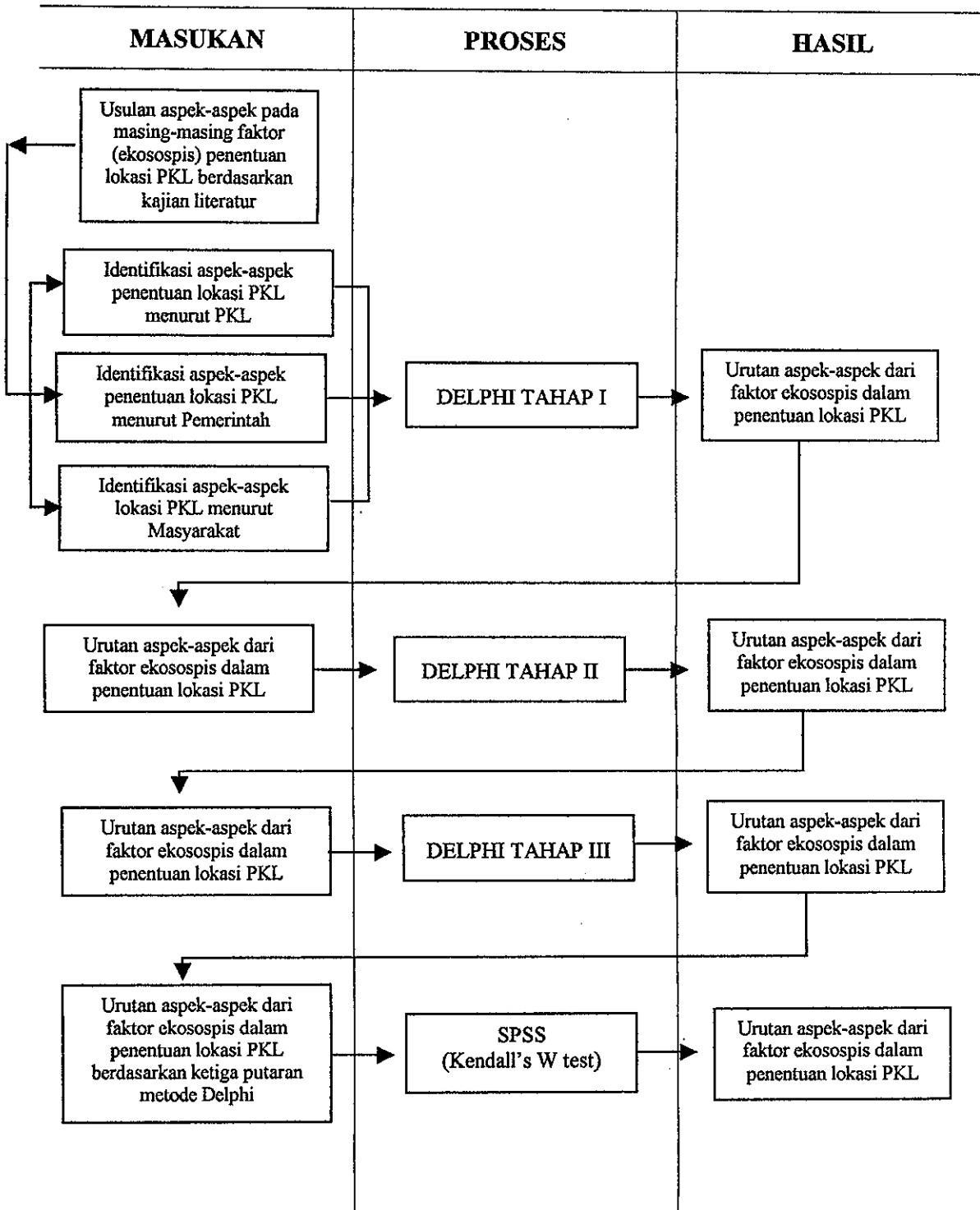
W = Nilai konsistensi

K = Jumlah responden

S = Jumlah kuadrat deviasi

J = Banyaknya kriteria (faktor)

Nilai W berkisar dari 0 – 1. Semakin mendekati 1 menunjukkan semakin konsistennya jawaban responden. Sedangkan kerangka analisis studi dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini.



**GAMBAR 1.3**  
**KERANGKA ANALISIS**  
**STUDI ASPEK YANG DIPRIORITASKAN**  
**PADA FAKTOR EKONOMI, SOSIAL, DAN FISIK**  
**DALAM PENENTUAN LOKASI PKL DI KOTA MATARAM**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2003*

## **1.8. Sistematika Penulisan**

Dalam laporan studi ini, sistematika penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sasaran penelitian, ruang lingkup materi dan spasial, kedudukan penelitian, kerangka pikir penelitian, serta pendekatan dan metoda pelaksanaan penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, teknik sampling, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN ASPEK-ASPEK PENENTUAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PERKOTAAN**

Merupakan bab kajian pustaka yang berisi tentang konsep sektor informal, PKL di perkotaan termasuk karakteristik PKL, aspek-aspek penentuan lokasi PKL, peraturan Pemerintah Kota Mataram tentang penentuan lokasi PKL, konsep penawaran dan permintaan aktivitas PKL, kasus-kasus PKL di negara lain, serta ringkasan kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan kegiatan yang mengarah pada terjawabnya rumusan masalah yang diangkat sebagai bahan studi.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PKL DI WILAYAH KOTA MATARAM**

Bab ini berisi uraian secara umum PKL yang beraktivitas di wilayah Kota Mataram. Disamping itu juga memberikan deskripsi wilayah studi yaitu Kota Mataram menyangkut peran dan fungsi Kota Mataram, kebijakan

Pemerintah Kota Mataram terhadap pedagang kaki lima, serta karakteristik lokasi studi.

**BAB IV : ANALISIS ASPEK YANG DIPRIORITASKAN PADA FAKTOR EKONOMI, SOSIAL, DAN FISIK DALAM PENENTUAN LOKASI PKL DI KOTA MATARAM**

Dalam bab ini diuraikan tentang analisis aspek-aspek dari masing-masing faktor penentuan lokasi PKL yang meliputi faktor ekonomi, sosial, dan fisik menurut PKL, masyarakat, dan Pemerintah Kota Mataram yang dilakukan dengan distribusi frekuensi prosentase. Selain itu juga dilakukan analisis kesepakatan antara para ahli (*expert*) dalam masalah PKL di Kota Mataram mengenai aspek-aspek dari masing-masing faktor penentuan lokasi PKL dengan menerapkan metoda delphi.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang menjawab *research questions* yang diangkat. Dengan dasar kesimpulan tersebut dibuat rekomendasi bagi Pemerintah Kota Mataram berupa saran-saran yang dapat dipergunakan sebagai arahan/masukan dalam menentukan lokasi PKL di Kota Mataram.

## **BAB II**

### **KAJIAN ASPEK-ASPEK PENENTUAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PERKOTAAN**

#### **2.1. Konsep Sektor Informal**

Di negara-negara berkembang, pertumbuhan sektor informal khususnya pedagang kaki lima biasanya sangat pesat dengan menempati lokasi-lokasi yang dianggap strategis dan dapat menghasilkan keuntungan, seperti yang disampaikan oleh IB Indra dan H. Suyanto (2000, dalam Haryono, 2003 : 71) bahwa pedagang kaki lima mempunyai sifat cenderung tumbuh dan berkembang dalam ruang-ruang aktivitas kota.

Konsep sektor informal dalam studi pembangunan di negara berkembang (dunia ketiga) adalah karena adanya kemiskinan di perkotaan akibat tidak cukup tersedianya lapangan kerja bagi tenaga kerja trampil di daerah perkotaan. Ketidacukupan tersebut diakibatkan oleh mengalirnya urbanisasi, karena sektor pertanian di daerah perdesaan sudah tidak dapat menampung angkatan kerja yang terus berkembang. Sementara itu, permintaan tenaga kerja pada sektor industri yang modern membutuhkan persyaratan-persyaratan yang tidak mampu dipenuhi oleh para migran.

Di Indonesia, kehadiran sektor informal dipengaruhi dan tidak dapat dilepaskan dari aspek makro. Yang dimaksud dengan aspek makro adalah strategi pembangunan yang dilakukan secara keseluruhan, masalah urbanisasi desa-kota, serta perkembangan antara permintaan dan penawaran kerja di kota. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain, namun demikian dapat dikatakan bahwa pangkal permasalahan terletak pada strategi pembangunan.

Secara umum kaitan tersebut dapat dilihat dari adanya kebijaksanaan pembangunan yang dipusatkan di perkotaan, yang kemudian menyebabkan terjadinya urbanisasi desa-

kota secara berlebihan. Di lain pihak, terbatasnya penyerapan tenaga kerja di sektor formal menyebabkan sektor informal menjadi sasaran karena sifatnya yang sangat mudah dalam menyerap tenaga kerja, seperti yang diutarakan oleh Gilbert, Alan dan Josef Gugler (1996 : 57) bahwa karena mempunyai skala yang kecil, sektor ini mudah dimasuki oleh semua masyarakat dan tumbuh dengan pesatnya.

## **2.2. Pengertian Sektor Informal**

Istilah sektor informal muncul setelah adanya penelitian di Ghana yang dilakukan oleh *Keith Hart*, seorang peneliti Inggris, pada tahun 1971. Istilah ini digunakan untuk menyatakan sejumlah tenaga kerja yang berada diluar pasar tenaga kerja formal yang terorganisasi. Dikatakan “diluar pasar” karena sektor ini termasuk kelompok yang tidak permanen atau tidak ada jaminan tentang keberlangsungan pekerjaan yang dimilikinya. Istilah sektor informal semakin populer setelah ILO (*International Labour Organization*) melakukan penelitian di Kenya dan kemudian melanjutkan penelitiannya tersebut ke negara-negara berkembang lainnya. Pada penelitian tersebut istilah sektor informal dipergunakan sebagai pendekatan untuk membedakan tenaga kerja yang tergolong dalam dua kelompok yang berlainan sifatnya (Manning dan Effendi, 1996 : 75).

Jan Bremen (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 138-140) memperjelas pengertian sektor informal dengan menyatakan bahwa sektor informal menunjukkan fenomena perbedaan dua kegiatan yang mempunyai ciri-ciri yang berlawanan. Tenaga kerja formal adalah yang bergaji dalam suatu pekerjaan yang permanen. Sifat semacam ini biasanya dimiliki oleh kegiatan yang saling berhubungan dalam suatu sistem yang terjalin dengan organisasi yang baik. Pada umumnya mereka yang terikat dalam kontrak kerja kelompok ini mempunyai syarat-syarat bekerja yang dilindungi oleh hukum. Di lain pihak, mereka yang berada di luar kelompok ini dinamakan sektor informal.

Studi mendalam tentang sektor informal di Indonesia dilakukan oleh Hans Dieter-Evers, yang menganalogikan sektor ini sebagai bentuk ekonomi bayangan dengan negara. Ekonomi bayangan digambarkan sebagai berbagai kegiatan ekonomi yang tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. Kegiatan ekonomi bayangan ini merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang bergerak dalam unit-unit kecil sehingga bisa dipandang efisien dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari sisi sifat produksinya, kegiatan ini bersifat subsisten yang bernilai ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang ada di lingkungan sektor informal (Rachbini dan Hamid, 1994 : 3).

Dalam konteks Indonesia, menurut Hidayat (1978, dalam Widodo, 2002 : 24) pengertian sektor formal diberikan sebagai sektor yang terdiri dari unit usaha yang telah memperoleh berbagai proteksi ekonomi dari pemerintah. Sedangkan sektor informal adalah unit-unit usaha yang tidak memperoleh proteksi pemerintah dan sektor yang belum mempergunakan bantuan atau fasilitas pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Kriteria adanya *accessibility* terhadap suatu fasilitas yang disediakan pemerintah adalah yang dipakai sebagai ukuran untuk membedakan usaha sektor formal dan informal.

Sektor informal menyeruak ke permukaan karena sektor formal tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor yang terorganisir. Sektor yang terutama diisi oleh golongan yang kurang mampu ini terlihat makin menjamur di negara-negara sedang berkembang. Karena kegiatannya dipandang ilegal, maka para pengamat menamakan kegiatan ini sebagai kegiatan ekonomi bawah tanah atau sering disebut *underground economy* (Rachbini dan Hamid, 1994 : 25).

Dari beberapa penjelasan mengenai sektor informal diatas, dapat disimpulkan bahwa sektor informal merupakan suatu unit usaha yang berskala kecil, tidak memiliki

legalitas hukum, pola usahanya bersifat sederhana dan menggunakan sistem kekeluargaan, dilakukan oleh dan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, dan dalam aktivitasnya tidak diperlukan ketrampilan khusus.

### 2.3. Ciri-ciri Sektor Informal

Menurut Todaro dan Abdullah (dalam Manning dan Tadjuddin, 1996 : 287-289) ciri-ciri sektor informal disebutkan sebagai berikut :

1. Sebagian besar memiliki produksi yang berskala kecil, aktifitas-aktifitas jasa dimiliki oleh perorangan atau keluarga, dan dengan menggunakan teknologi yang sederhana.
2. Umumnya para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal.
3. Produktifitas pekerja dan penghasilannya cenderung lebih rendah daripada di sektor informal.
4. Para pekerja di sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak dan jaminan pensiun.
5. Kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal.
6. Motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan penghasilan yang bertujuan hanya untuk dapat "hidup" (*survive*) dan bukannya untuk mendapatkan keuntungan, dan hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan.
7. Mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan yang mendatangkan penghasilan dan meskipun begitu mereka bekerja dengan waktu yang panjang.

8. Kebanyakan diantara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh (*slum area*) dan permukiman liar (*schelter*) yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi serta jasa-jasa kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan berdasarkan penelitian ILO (Sethuraman, 1976) di Kenya dikemukakan ada tujuh ciri-ciri sektor informal, yaitu :

1. Mudah dimasuki;
2. Bersandar pada sumber daya sekitarnya;
3. Kegiatan usaha keluarga;
4. Ukuran usahanya dalam skala kecil;
5. Bersifat intensif kerja dan dengan teknologi tepat guna;
6. Ketrampilan dari yang bersangkutan bukan hasil didikan sekolah formal;
7. Di luar jalur yang diatur pemerintah dan bergerak dalam pasar sangat bersaing.

Sethuraman (dalam Manning dan Tadjuddin, 1996) mengatakan, sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Akan tetapi sektor informal tidak bisa disebutkan sebagai “perusahaan” berskala kecil. Sektor informal terutama dianggap sebagai manifestasi dari suatu pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang. Mereka memasuki kegiatan berskala kecil di kota, terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Karena mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migran. Jelaslah bahwa mereka bukan kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya.

Lebih lanjut Sethuraman (dalam Manning dan Tadjuddin, 1996) menyatakan bahwa sektor informal di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap sebagai sekelompok perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (*inputs*) modal dan pengelolaan (*managerial*) yang besar. Skala operasi adalah karakteristik terpenting yang muncul dari konsep sektor informal. Meskipun skala operasi dapat diukur dengan berbagai macam cara, antara lain meliputi besarnya modal, omzet dan lain-lain, tetapi karena ciri-ciri ini biasanya berhubungan erat satu dengan yang lain, maka alat ukur yang paling tepat untuk mengukur skala operasi adalah jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Melihat skala kota sebagai suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari unit-unit produksi dan distribusi, maka unit-unit yang memiliki 10 orang kebawah diklasifikasikan kedalam sektor informal. Pemilihan kriteria ini didasarkan pada keyakinan bahwa perusahaan yang memiliki lebih dari 10 pekerja tidak mungkin didirikan dengan motif utama memanfaatkan kesempatan kerja.

Mengenai sektor informal di Indonesia, menurut Hidayat (1978, dalam Widodo, 2002 : 26) yang telah melakukan penelitian di Kodya Yogyakarta ada sebelas ciri pokok tentang sektor informal, yaitu :

1. Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal;
2. Pada umumnya tidak mempunyai izin;
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja;
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;

5. Satuan usaha yang mudah keluar dan masuk dari sub sektor yang satu ke sub sektor yang lainnya;
6. Teknologi yang dipakai masih bersifat sangat sederhana;
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasinya juga kecil;
8. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikannya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
9. Pada umumnya satuan usaha termasuk dalam golongan *one man enterprises* dan kalau mengerjakan buruh biasanya berasal dari keluarga;
10. Sumber dan modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi;
11. Hasil produksi atas jasa tertentu dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa yang berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.

Untuk mengetahui apakah suatu unit usaha termasuk kedalam unit usaha formal atau informal maka harus diperhatikan ke-11 karakteristik tersebut diatas. Bila satu unit usaha mempunyai beberapa karakteristik diatas, maka unit usaha tersebut dapat dikatakan sebagai unit sektor informal.

Dalam Wirosardjono (1979 : 43) ciri-ciri sektor informal disebutkan antara lain :

1. Pola kegiatannya tidak teratur baik dalam arti waktu, permodalan maupun penerimaan.
2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. sehingga kegiatannya sering dikatakan "liar".
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
4. Tidak mempunyai tempat tetap.

5. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
6. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus, sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga.
7. Umumnya satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.
8. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan sebagainya.

Menurut Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 230) diantara berbagai usaha sektor informal yang ada, usaha PKL tampaknya merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di kota. Kekhususan tersebut dikarenakan usaha ini relatif paling mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan kebijaksanaan perkotaan.

Dari pengertian yang diberikan oleh Soetjipto Wirosardjono, Todaro, Abdullah, dan Sethuraman dapat disebutkan bahwa sektor informal yang dimaksud memiliki ciri :

1. Modal maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
2. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan biasanya sederhana.
3. Tidak mempunyai tempat tetap dan mudah dipindahkan oleh pihak yang berwenang, biasanya menempati lokasi tertentu di sepanjang jalan kaki lima (trotoar).
4. Umumnya kegiatan dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
5. Relatif tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga.
6. Umumnya satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan, orang yang dipercaya atau berasal dari daerah yang sama.

7. Pengelolanya dibantu oleh sejumlah kecil orang (menurut Sethuraman kurang dari 10 orang).
8. Lebih dimaksudkan untuk mencari lapangan pekerjaan daripada untuk mencari keuntungan.

## **2.4. Pedagang Kaki Lima di Perkotaan**

### **2.4.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Menurut Jakti. Dorodjatun Kuntjoro (1986 : 57) pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk aktivitas perdagangan sektor informal. Pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang umumnya berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi kota.

Dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal.

Istilah kaki lima berasal dari kata "trotoar" yang dahulu berukuran lebar 5 *feet* atau sama dengan kurang lebih 1,5 meter, sehingga dalam pengertian ini PKL adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop (Fakultas Ekonomi Unpar, 1980, dalam Widodo, 2002 : 27).

Pengertian tentang pedagang kaki lima terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi disetiap jalur

pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk (Fakultas Teknik Unpar, 1980, dalam Widodo. 2002 : 27).

Purwanto (dalam Ambarwaty, 2002 : 27) menyatakan bahwa pedagang kaki lima adalah suatu bentuk aktivitas perdagangan yang tidak menetap dan biasanya berlokasi di area jalur pejalan. Mc. Gee dan Yeung (1977 : 25) memberikan pengertian pedagang kaki lima sama dengan "hawker", yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dalam pengertian ini termasuk juga orang yang menawarkan barang dan jasanya dari rumah ke rumah.

## **2.4.2. Karakteristik PKL**

### **2.4.2.1. Jenis Dagangan PKL**

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 82-83), jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas. Misalnya di suatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain-lain.

Adapun jenis dagangan yang ditawarkan oleh PKL dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utama . yaitu :

1. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.
2. Makanan yang siap saji. seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.
3. Barang bukan makanan. mulai dari tekstil hingga obat-obatan.

4. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut dan lain sebagainya.

#### 2.4.2.2. Bentuk Sarana Perdagangan PKL

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gee dan Yeung (1977 : 82-83) di kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL menurut Waworoentoe (1973, dalam Widjajanti, 2000 : 39-40) adalah sebagai berikut :

1. Gerobak/kereta dorong. bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
2. Pikulan/keranjang. bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
3. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat

dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.

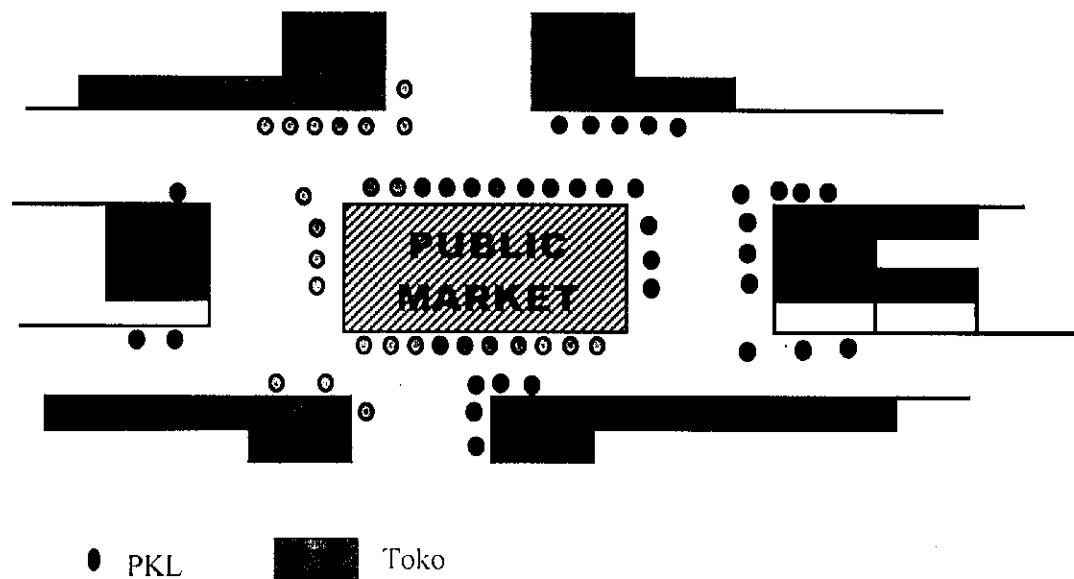
4. Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. PKL ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).
5. Gelaran/alas. PKL menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan barang kelontong dan makanan.

#### **2.4.2.3. Pola penyebaran PKL**

Berdasarkan pola penyebarannya, aktivitas PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 36-37) dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pola, yaitu :

##### **1. Pola Penyebaran Mengelompok (*Focus Agglomeration*)**

Pedagang informal pada tipe ini pada umumnya selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Selain itu pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekeliling pasar, ruang-ruang parkir, taman-taman dan lain sebagainya (Gambar 2.1) merupakan lokasi-lokasi yang banyak diminati oleh sektor ini. Pola penyebaran seperti ini biasanya banyak dipengaruhi oleh adanya pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu pemusatan atau pengelompokan pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyai sifat komoditas yang sama atau saling menunjang. Biasanya dijumpai pada para pedagang makanan dan minuman.

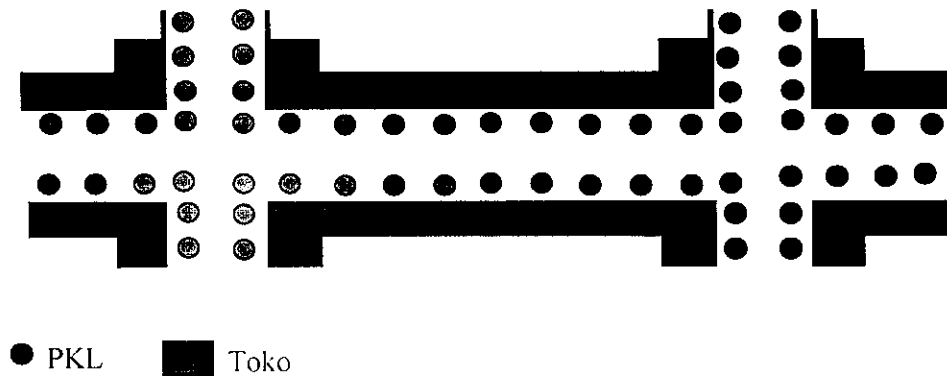


**GAMBAR 2.1.**  
**POLA PENYEBARAN MENGELOMPOK (*FOCUS AGLOMERATION*)**

*Sumber : Mc. Gee dan Yeung (1977 : 37)*

## 2. Pola Penyebaran Memanjang (*Linier Concentration*)

Pada umumnya pola penyebaran memanjang atau *linier concentration* terjadi di sepanjang atau di pinggir jalan utama (*main street*) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama (Gambar 2.2.). Dengan kata lain pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan linier lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi pedagang informal itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen. Jenis komoditi yang biasa diperdagangkan adalah pakaian, kelontong, jasa reparasi, buah-buahan, rokok/obat-obatan, dan lain-lain.



**GAMBAR 2.2**  
**POLA PENYEBARAN MEMANJANG (*LINIER CONCENTRATION*)**

*Sumber : Mc. Gee dan Yeung (1977 : 37)*

Dari pendapat Mc. Gee dan Yeung tersebut dapat disimpulkan bahwa pola penyebaran PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas.

#### **2.4.2.4. Pola Pelayanan Aktivitas PKL**

Pola pelayanan menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 76) adalah cara berlokasi aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kegiatan sebagai tempat usaha. Berdasarkan pola pelayanan ini, aktivitas PKL dapat ditinjau dari aspek sifat, golongan pengguna jasa, skala pelayanan, dan waktu pelayanan.

##### **A. Sifat Pelayanan PKL.**

Berdasarkan sifat pelayanannya, PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 82) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

##### **1. Pedagang menetap (*static*).**

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus

datang sendiri ke tempat pedagang dimana ia berada. Sarana fisik berdagang dengan sifat seperti ini biasanya berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap.

## 2. Pedagang semi menetap (*semi static*).

Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini PKL akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, para pegawai masuk/keluar kantor atau saat ramainya pengunjung di pusat kota. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut berkeliling. Dengan kata lain ciri utama PKL yang memilih pola pelayanan seperti ini adalah adanya pergerakan PKL yang menetap pada suatu lokasi pada periode tertentu, setelah waktu berjualan selesai (pada sore atau malam hari). Adapun sarana fisik yang dipergunakan untuk berdagang berupa kios beroda, jongko atau roda/kereta beratap.

## 3. Pedagang keliling (*mobile*).

Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil. Aktivitas PKL dalam kondisi ini ditunjukkan dengan sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa. Dengan kata lain ciri utama dari unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya bentuk sarana fisik perdagangan mereka adalah kereta dorong dan pikulan/keranjang.

## **B. Golongan Pengguna Jasa PKL**

Golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas jasa PKL pada umumnya terdiri dari golongan pendapatan menengah dan rendah. Hal ini disebabkan karena harga

yang ditawarkan oleh pedagang sektor informal relatif lebih rendah sehingga terjangkau bagi golongan pendapatan rendah sekalipun. Sedangkan bagi golongan berpendapatan tinggi ada kecenderungan untuk tidak mengunjungi lokasi aktivitas PKL, terutama untuk jenis barang dagangan bukan makanan. Pertimbangannya adalah dari segi kualitas barang yang biasanya lebih rendah, adanya kemungkinan penipuan dalam hal kualitas barang, dan sebagainya, sehingga golongan ini lebih memilih untuk berbelanja di toko atau supermarket. Selain alasan tersebut, dari sisi psikologis ada kecenderungan gaya hidup masyarakat kota yang selalu ingin menjaga gengsi, sehingga mereka lebih percaya diri apabila berbelanja di tempat-tempat yang dapat mewakili status mereka. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendatangi lokasi aktivitas perdagangan sektor informal, tetapi ini terjadi sekali waktu atau bersifat insidental.

Rachbini dan Hamid (1994 : 92) menyatakan bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta maupun negeri) di Jakarta kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor informal. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dalam kondisi gaji di sektor formal yang rata-rata rendah. Kondisi ini juga menunjukkan adanya hubungan antara sektor formal dan informal.

### **C. Skala Pelayanan Aktivitas PKL**

Skala pelayanan suatu aktivitas jasa pedagang sektor informal dapat diketahui dari asal pengguna jasa. Besar kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya pengguna jasa tersebut. Semakin dekat asal pengguna, maka skala pelayanan semakin kecil, sebaliknya semakin jauh asal pengguna jasa tersebut, maka skala pelayanan semakin besar (Manning dan Effendi, 1996 : 366-372).

#### **D. Waktu Pelayanan Aktivitas PKL**

Mc Gee dan Yeung (1977 : 76) menyatakan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Adapun perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Temuan ini didasarkan pada penelitiannya terhadap “*hawkers*” di kota-kota Asia Tenggara.

Saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi jasa terhadap pusat-pusat kegiatan disekitarnya. Saat teramai bagi aktivitas pedagang sektor informal di dekat pusat-pusat perbelanjaan akan berbeda dengan saat-saat teramai di dekat kawasan wisata, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, dan sebagainya.

### **2.5. Aspek Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima**

#### **2.5.1. Kedekatan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Tempat Tinggal**

Turner (dalam Widodo. 2000 : 98) membedakan preferensi pemilihan rumah tinggal berdasarkan tingkat penghasilan masyarakat. Masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih rumah tinggal yang dekat dengan tempat kerja, berbeda dengan golongan masyarakat atas yang lebih mementingkan aspek kenyamanan dan ketersediaan fasilitas sosial sebagai prioritas utama dalam memilih lokasi tempat tinggal.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka PKL sebagai kelompok masyarakat yang dominan berpenghasilan rendah (An-naf. 1983 :30), tentunya akan berusaha memilih lokasi usaha sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka. Jarak lokasi PKL dengan tempat tinggal pedagang dapat dilihat sebagaimana tabel II.1 berikut :

**Tabel II. 1**  
**Kriteria Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL**

<b>Jarak</b>	<b>Kriteria</b>
Kurang dari 1 km	Dekat
1 s/d 5 km	Sedang
Lebih dari 5 km	Jauh

*Sumber : Hasil Studio CBUHM IV MTPK-UNDIP*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachbini dan Hamid (1994 : 101) juga turut mendukung adanya keterkaitan antara jarak lokasi dengan rumah tinggal para PKL. Menurut mereka, terdapat korelasi yang tinggi antara lokasi usaha dengan tempat tinggal, atau dengan kata lain PKL akan bertempat tinggal dimana saja asal jaraknya dekat dengan lokasi usahanya. Seperti yang diutarakan oleh Soetomo, Sugiono (1998 :10) bahwa faktor-faktor yang memperkecil modal adalah faktor jarak tempat kerja dengan tempat tinggal. Mereka harus dekat dengan lokasi usaha, apabila tidak ingin dililit besarnya ongkos transportasi.

### **2.5.2. Kemudahan Memperoleh Angkutan Umum**

Kemudahan (*conveniencies*) dan kedekatan (*proximity*) dalam wilayah suatu kota berfungsi memperlancar pertukaran barang dan jasa. Berbagai macam kegiatan ekonomi yang berada dalam suatu wilayah, apabila didukung dengan sistem angkutan kota, maka kegiatan ekonomi tersebut akan berkembang dengan lebih pesat (Reksohadiprodo, 1994 : 95). Sedangkan menurut Nelson (1958) daya tarik pada suatu fasilitas perdagangan bagi konsumen (pembeli) adalah adanya faktor kemudahan yaitu baik transportasi umum (biaya, waktu dan frekuensi) maupun transportasi pribadi (parkir, aksesibilitas, kondisi lalu lintas, jarak parkir).

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Forbes, Dean (dalam Manning, 1996 : 348) dalam penelitiannya mengenai sektor informal PKL di Kota Ujung Pandang, bahwa

terdapat kaitan yang erat antara persebaran lokasi sektor informal PKL dengan jaringan transportasi, dimana sektor informal tumbuh pesat di sepanjang jalan besar dan memerlukan sarana dan prasarana transportasi untuk melayani penduduk.

Dalam teori lokasi yang mengemukakan tentang transportasi disebutkan bahwa penting untuk menentukan lokasi sedemikian rupa sehingga diperoleh biaya angkutan yang minimum (Djojodipuro, 1992 : 30). Hal ini berkait pula dengan ketersediaan sarana transportasi, baik bagi PKL bersangkutan maupun bagi pembeli/konsumen. Aktivitas perekonomian kota umumnya merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku kegiatan. Penempatan lokasi kegiatan ekonomi yang tidak mudah dijangkau, dalam arti sarana transportasi yang tersedia kurang/tidak memadai merupakan faktor penyebab kegagalan bagi pelaku yang terlibat didalamnya.

### **2.5.3. Kedekatan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Pusat Kegiatan/Keramaian Kota**

Aspek kedekatan (*proximity*) antara PKL dengan pusat kegiatan/keramaian kota ditunjukkan dengan lokasi aktivitas mereka yang cenderung menempati kawasan perdagangan, rekreasi, perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan tempat-tempat keramaian lainnya yang bersifat temporer. Hal ini menjelaskan bahwa PKL mempunyai kecenderungan untuk memasarkan barang dagangannya sedekat mungkin dengan calon pembeli. Seperti yang dikemukakan oleh Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 236) bahwa dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya, PKL akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Mereka akan berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat oleh pembeli. Oleh karena itu mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat. Sehingga kehadiran PKL banyak dijumpai di sekitar lokasi aktivitas

perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Dalam teori lokasi juga disebutkan bahwa bagi pedagang terdapat kecenderungan untuk berorientasi kepada konsentrasi konsumen dalam menentukan lokasi tempat usaha (Djojodipuro, 1992 : 30).

Adapun kriteria kedekatan lokasi usaha PKL dengan pusat kegiatan/keramaian kota dapat dilihat pada tabel II.2 berikut.

**Tabel II. 2**  
**Kriteria Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Pusat Kegiatan/Keramaian Kota**

Jarak	Kriteria
Kurang dari 100 m	Dekat
Antara 100 m s/d 500 m	Sedang
Lebih dari 500 m	Jauh

*Sumber : Hasil Studio CBUIM IV MTPK-UNDIP*

Keberadaan PKL tersebut tidak terlepas dari adanya keterkaitan antara sektor formal dan sektor informal. Semakin berkembang sektor formal, semakin berkembang pula sektor informal (Eko Budiharjo, 1993 : 54). Hal senada juga disebutkan oleh Sri Edi Swasono (dalam Rachbini, 1994 : 92) bahwa secara struktural kehadiran sektor informal dibutuhkan atau dapat dikatakan sebagai penyangga sektor formal, dan menurut Miftah Wirahadikusuma (1991 : 31), sektor ini disebut sebagai bumper bagi sektor kapitalis, yang disamping mempunyai fungsi produksi juga fungsi konsumsi.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Ir. Goenadi Malang Joedo (1997, dalam Widjajanti, 2000 : 35) disebutkan bahwa penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

- Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari.
- Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar.

- Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit.
- Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Sedangkan menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 108), dinyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial.

Ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat khususnya para konsumen, dikatakan oleh Nelson (1958 : 40) ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merencanakan lokasi perdagangan eceran, antara lain :

- Kenyamanan tempat penjualan.
- Kemudahan aksesibilitas (sarana transportasi).
- Berada pada pusat perdagangan.

## **2.6. Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima Menurut Pemerintah Kota**

Mengacu pada Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 1/KPTS/2000 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, pada BAB IV yang membahas tentang Kriteria Pedagang Kaki Lima dan Penetapan Lokasi pada Pasal 10 disebutkan bahwa penetapan lokasi PKL pada tempat-tempat tertentu dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial seperti ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Kemudian pada Pasal 11 dijelaskan bahwa penempatan PKL pada masing-masing lokasi didasarkan atas pertimbangan jenis usaha dan waktu berjualan. Pada Pasal 9 sebelumnya, disebutkan bahwa rancang bangun/konstruksi bangunan tempat usaha PKL harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mudah dibongkar pasang (*knock down*).
- b. Atap/penutup terbuat dari bahan terpal.
- c. Tidak memakai penyekat antar ruang dari bahan apapun.
- d. Ukuran maksimal adalah 3 x 3 meter.

Berkaitan dengan penentuan lokasi guna penataan lokasi pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Mataram telah menentukan lokasi-lokasi yang diperuntukan bagi aktivitas usaha mereka. Lokasi-lokasi dimaksud terangkum dalam tabel 2.1 berikut.

**TABEL II. 3**  
**LOKASI, JENIS DAGANGAN, DAN WAKTU JUALAN PARA PKL**  
**SE-KOTA MATARAM**

NO.	LOKASI	JENIS DAGANGAN	WAKTU JUALAN
<b>KECAMATAN AMPENAN</b>			
1.	Jl. Pabean menuju Pantai Ampenan	Campuran	16.00 – 22.00 BTWI
2.	Halaman depan Stadion Malomba	Makanan/minuman	16.00 – 22.00 BTWI
3.	Jl. Pasar Kebon Roek/menju Senggigi	Buah-buahan	09.00 – 20.00 BTWI
4.	Halaman Barat Pertokoan ACC	Campuran	16.00 – 22.00 BTWI
5.	Depan Ruko Ampenan	Makanan/minuman	19.00 – 22.00 BTWI
6.	Jl. Trunajaya/sebelah Barat Komplek Pajak	Makanan/minuman	09.00 – 18.00 BTWI
7.	Sebelah Barat Taman/Utara Jembatan Jangkok	Makanan/minuman	16.00 – 22.00 BTWI
8.	Jl. Udayana/Tugu Bumi Gora	Kerajinan/Makanan/Minuman Khas Lombok	07.00 – 11.00 BTWI
<b>KECAMATAN MATARAM</b>			
1.	Jl. Bung Hatta/Sebelah Timur BPN Lobar	Makanan/minuman	16.00 – 22.00 BTWI
2.	Jl. Perisaian Komplek Pertokoan Mataram	Campuran	24 Jam
3.	Jl. Prasarana sebelah Timur Lap. Atletik	Campuran	16.00 – 22.00 BTWI
4.	Jl. Sebelah Barat Lapangan Atletik	Campuran	16.00 – 22.00 BTWI
5.	Depan Pertokoan Rembiga	Makanan/minuman	16.00 – 22.00 BTWI
6.	Jl. Sebelah Barat Bioskop Irama	Makanan/minuman	16.00 – 22.00 BTWI
7.	Depan Pasar Karang Sukun	Makanan/minuman	16.00 – 22.00 BTWI
<b>KECAMATAN CAKRANEGARA</b>			
2.	Jl. Sandubaya Depan Ruko Sweta Indah	Campuran	16.00 – 24.00 BTWI
3.	Jl. AA. Gde Ngurah/Bunut Baik sebelah Selatan Toko Tiara	Buah-buahan	16.00 – 21.00 BTWI
4.	Jl. Gelatik	Makanan/Minuman	16.00 – 24.00 BTWI
5.	Jl. Sebelah Barat Pertokoan Cilinaya	Makanan/minuman	16.00 – 24.00 BTWI
6.	Jl. Jayengrana	Buah-buahan	16.00 – 21.00 BTWI
7.	Jl. Maktal/Sebelah Barat Klinik Risa	Makanan/minuman	08.00 – 22.00 BTWI
8.	Jl. Beo/Sebelah Barat SMAK	Makanan/minuman	16.00 – 22.00 BTWI
9.	Jl. Umar Maya	Buah dan Konveksi	08.00 – 18.00 BTWI

Sumber : Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 1/KPTS/2000

## 2.7. Konsep Penawaran (*Supply*) dan Permintaan (*Demand*) Kegiatan Pedagang Kaki Lima

Penelitian Dewan Riset Nasional tentang kegiatan pedagang kaki lima di empat kota yaitu di Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya menghasilkan temuan bahwa sebesar 77,9 % dari respondennya memiliki motivasi menjadi pedagang kaki lima karena kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan/*skill* yang dimiliki. Menjadi pedagang kaki lima merupakan pilihan yang paling mudah dimasuki, karena menjadi pedagang kaki lima dianggap sebagai cara termudah untuk mempertahankan hidup. Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh sektor informal ini yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat beroperasi, bergantung pada sumber daya lokal, dan skala usaha yang relatif kecil.

Oleh sebab itu dapat dijumpai semakin bertebarannya jumlah pedagang kaki lima di perkotaan, yang memang juga disebabkan ada kebutuhan akan keberadaan mereka. Seperti yang dituturkan oleh Ramli (1992 : 20) bahwa selain sebagai penyedia lapangan pekerjaan, keberadaan sektor informal ini juga dibutuhkan terutama dalam kaitannya dengan berbagai macam produk dan jasa yang dihasilkannya. Beberapa ahli juga beranggapan bahwa sektor formal pun membutuhkan keberadaan sektor informal ini. Lebih jauh disampaikan oleh Ramli (1992 : 54) bahwa usaha kakilima merupakan jalur terdepan dari jajaran distribusi dan ujung tombak pelayanan masyarakat yang langsung berhubungan dengan konsumen, terutama dalam pelayanan kebutuhan pokok perorangan.

Dicontohkan juga oleh Rachbini dan Hamid (1994 : 92) bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta maupun negeri) di Jakarta, kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor informal. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dalam kondisi gaji di sektor formal yang rata-rata rendah.

Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan dan keterkaitan antara sektor formal dengan sektor informal. Dalam hal ini sektor formal berada pada posisi sebagai konsumen yang membutuhkan/melakukan permintaan pelayanan (*demand*), sedangkan pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk sektor informal bertindak selaku *supplier* yaitu yang menawarkan produk/jasa yang dibutuhkan.

## **2.8. Beberapa Kasus PKL di Negara-negara Lain**

### **2.8.1. PKL di Kota Kuala Lumpur, Malaysia**

Sektor informal memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi penduduk Malaysia. Pedagang kaki lima yang lebih dikenal dengan sebutan *hawker* (penjaja) dianggap sebagai agen ekonomi yang efektif dan efisien dalam pendistribusian barang dan jasa. Keberadaan mereka telah membantu masyarakat dalam mengurangi pengeluaran biaya hidup dengan menawarkan harga yang lebih murah dan pilihan yang bervariasi. Disamping menjadi sumber penghidupan beribu penduduk yang terlibat dalam sektor ini, penjaja juga merupakan sebagian dari warisan budaya Malaysia.

Pengaturan para penjaja di Malaysia dilakukan dengan mengeluarkan ijin dagang bagi mereka. Berdasarkan data pada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dalam tahun 2000 terdapat 35.120 orang penjaja yang telah memiliki ijin untuk berdagang di Kuala Lumpur. Sebagian besar dari mereka beroperasi di pasar, pasar malam, kios, dan di depan ruko yang ada. Kebanyakan dari mereka menjual makanan/minuman, pakaian, buku, dan barang-barang yang terbuat dari plastik.

Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kuala Lumpur sehubungan dengan keberadaan para penjaja atau peniaga kecil ini adalah masih terdapatnya 6.000 orang penjaja yang tidak mempunyai ijin namun beroperasi di beberapa lokasi yang tidak

diperkenankan seperti di badan jalan, di atas drainase maupun di bawah jembatan yang ada.

Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mendirikan pusat-pusat penjaja (*hawkers centers*), namun tidak semua berjalan mulus seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih ada penjaja yang lebih memilih kembali ke tempat asal mereka berniaga dengan alasan lokasi *hawkers centers* yang kurang memadai dari segi aksesibilitas, jauh dari keramaian penduduk dan kurang nyaman.

Menghadapi masalah ini, pemerintah kemudian menetapkan kriteria dalam penentuan/penyediaan *hawkers centers*, antara lain :

1. Jumlah penjaja khususnya penjaja makanan dibatasi maksimal 40 unit di setiap lokasi.
2. Lokasi yang dipilih sedapat mungkin memadai dari segi aksesibilitas.
3. Setiap pembangunan *high rise building* diwajibkan harus menyediakan 2 % dari bangunannya, guna diperuntukkan bagi para *hawkers*.
4. Bagi para *hawkers* yang sudah lama menetap di suatu lokasi, seperti di Jl. Petaling (terdapat sekitar 700 orang *hawkers*), akhirnya lokasi ini ditetapkan dan dibangun sebagai kawasan *hawkers modern*, sebagai salah satu alternatif tempat pelancongan utama di Kuala Lumpur. Pembangunannya dilakukan dengan menempatkan para *hawkers* ini pada *temporary location* atau cuti selama 2 bulan dengan tidak melakukan kegiatan perniagaan. Setelah pembangunan lokasi selesai, mereka ditempatkan kembali di kawasan tersebut.
5. *Law enforcement* atas batas maksimal jumlah *hawkers* pada suatu lokasi diberlakukan secara ketat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerapan sanksi bagi *hawkers* baru yang mencoba datang di lokasi bersangkutan.

### 2.8.2. PKL di Kota Cali, Colombia

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ray Bromley di Cali, suatu kota di Negara Colombia yang mempunyai sekitar 9.500 pedagang kaki lima, dijumpai bahwa sektor ini terutama berpusat di tengah kota di sekitar stadion dan pusat-pusat hiburan yang lainnya ketika ada pertunjukkan yang bisa menarik sejumlah besar penduduk dan sekitar tempat-tempat pemberhentian sepanjang jalur bus.

Ada 8 (delapan) tempat penjual-penjual kaki lima begitu terkonsentrasi dalam kelompok yang padat, sehingga kumpulan itu lebih tepat disebut pasar kaki lima. Pasar kaki lima yang dimaksud adalah *Carreva Octava* (jalan yang menjadi pusat perbelanjaan untuk barang-barang buatan pabrik), *Calle Trese Bus* terutama untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. *La Nave* suatu pusat penjualan bahan makanan, *Barrio Siloe*, *Villa Del Sur* yang masing-masing padat dengan makanan siap saji, dengan lokasi pada titik pertemuan sejumlah jalur bus bagian timur kota, dan 4 pemusatan yang terpisah yaitu *Santa Elena*, *Floresta*, *Alameda* dan *Porvenir*, yang terletak di sekitar pasar-pasar kotamadya.

Para pejabat kota biasanya memandang PKL sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi. menyebabkan kemacetan lalu lintas, pembuangan sampah di sembarang tempat. gangguan para pejalan kaki, saingan pedagang toko, serta penyebaran penyakit lewat kontak fisik dan penjualan makanan yang basi.

PKL di Cali diatur dengan ketat oleh para pejabat di kotamadya dan departemen. Semua PKL harus memiliki kartu identitas dan kartu kesehatan untuk mendapatkan izin berdagang dari pejabat kota. Para PKL tidak harus membayar pajak untuk menempati jalan raya umum. tetapi mereka dikenakan sejumlah uang tertentu yang dibayar setiap 6 atau 12 bulan.

Guna mengontrol jumlah PKL, para pejabat menolak memberikan izin baru bagi PKL. Namun hal ini akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pedagang yang ilegal. Untuk mengatasinya, para petugas akan melakukan pengusiran para pedagang, terutama di wilayah elite, wilayah pariwisata dan pusat kota, serta disekeliling bank dan gereja.

### **2.8.3. PKL Di Kota Lima, Peru**

Menurut Hernando De Soto (1991 : 72-73) berdasarkan hasil penelitiannya di Kota Lima mengatakan bahwa ada aturan yang dilakukan oleh PKL dalam menentukan cara berlokasi mereka yaitu bekerjasama dengan pemilik lahan salah satunya adalah agen angkutan umum untuk menjajakan dagangannya kepada para penumpang dan menyediakan makanan bagi para pengemudinya.

Pedagang yang berlokasi di tepi jalan umum membuat perjanjian kerjasama antar pedagang dengan mendirikan organisasi informal/paguyuban guna membuat negosiasi dengan pemerintah untuk lokasi/tempat berdagang mereka agar tidak tergesur. Dengan demikian mereka merasa aman dalam berdagang, sehingga memacu peningkatan usaha mereka. Kemudian organisasi ini mengajukan usulan untuk dapat ditempatkan pada lokasi/tempat yang formal atau pasar sebagai tempat mereka pindah kelak.

Di Kota Lima terdapat suatu sistem diluar hukum yang disebut Hak Milik Khusus Pedagang Jalanan/Pedagang Kaki Lima, yang mengatur lokasi pedagang yang berdagang di tepi jalan (pada sebagian jalan) dengan aman dan nyaman. Dengan adanya lokasi yang menetap, akan membantu pedagang dalam meningkatkan pendapatan mereka. Berdagang pada lokasi yang tetap sesuai dengan keinginan pedagang, agar mereka lebih dikenal oleh konsumen, sehingga memiliki pelanggan tetap.

Kemudian antar pedagang sendiri terdapat aturan yang tidak tertulis yaitu berupa pengaturan waktu berdagang yang bergantian atau menggilir waktu berdagang dan

kerjasama penggunaan sarana fisik dagangan antar mereka. Kerjasama ini tercipta dengan sendirinya, karena perasaan kawan senasib dan saling percaya antar sesama PKL (Soto, 1991 : 76-77). Namun karena sistem ini diluar hukum, maka pedagang mencoba memperoleh semacam pengakuan tambahan untuk Hak Milik Khusus ini dari pemerintah dengan membayar "pungutan" pada Pemerintah Kota Lima. Pungutan ini tidak memberikan hak apapun pada pedagang atas lokasi/tempat yang digunakan, tetapi hanya ijin untuk berdagang di lokasi/tempat tersebut dalam batas-batas peraturan Pemerintah Kota Lima. Dengan adanya ijin oleh Pemerintah Kota, para PKL merasa lebih aman dan nyaman karena ada kepastian lokasi/tempat berdagang. Oleh karena itu mereka rajin membayar pungutan tersebut, karena merasa hak mereka diakui dan pandangan ini diterima oleh warga kota (Soto, 1991 : 76-82)

Menurut hitungan ILD (*Instituto Libertad y Democracia*) Kota Lima, pendapatan dari pungutan ini sangat berarti bagi Pemerintah Kota, karena merupakan salah satu penerimaan yang besar bagi pemerintah (70 %) dari total penerimaan yang diperoleh dari hasil perdagangan. Pungutan ini merupakan cara untuk mengukuhkan Hak Milik Khusus, karena bermanfaat baik bagi PKL maupun bagi Pemerintah Kota Lima.

## **2.9. Ringkasan Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian teori mengenai aspek penentuan lokasi bagi pedagang kaki lima di atas, maka dapat dirangkumkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tumbuhnya sektor informal PKL dalam suatu kota tidak lepas kaitannya dengan fungsi kota yang begitu dominan dari aspek aktivitas ekonomi. Kota menjadi sasaran dari aktivitas ekonomi karena mempunyai *scale economies* yang tinggi terutama dalam memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Karakteristik PKL dapat dilihat dari jenis dagangan, bentuk sarana perdagangan, pola penyebaran, pola pelayanan aktivitas.
3. Bagi PKL, lokasi yang berkaitan dengan kemudahan terjadinya hubungan antara PKL dengan calon pembeli, merupakan faktor yang sangat diperhatikan dalam memilih lokasi usaha mereka. Dengan kata lain, lokasi dimana terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama sepanjang hari adalah lokasi yang mereka inginkan. Biasanya lokasi-lokasi seperti itu berada pada kawasan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota atau pusat non ekonomi perkotaan dengan kategori sering dikunjungi dalam jumlah besar, termasuk pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar, pasar publik, terminal, dan lain sebagainya.
4. Menurut pemerintah kota, penetapan lokasi PKL lebih ditekankan pada tempat-tempat tertentu dengan pertimbangan kepentingan-kepentingan ekonomi seperti jenis usaha/dagangan PKL dan sosial seperti ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan lingkungan sekitar.
5. Bagi masyarakat, dalam hal ini khususnya konsumen, faktor kenyamanan dan kemudahan dalam aksesibilitas merupakan hal pokok yang dipertimbangkan dalam “melangkah” ke PKL, disamping lokasi pedagang yang berada pada kawasan perdagangan.
6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka aspek-aspek dari masing-masing faktor yang akan digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut :
  - A. Faktor Ekonomi :
    - Jenis dagangan.
    - Waktu berjualan.
    - Biaya angkutan.

**B. Faktor Sosial :**

- Keamanan.
- Kenyamanan.
- Ketertiban.
- Kebersihan.
- Keindahan.

**C. Faktor Fisik :**

- Kemudahan aksesibilitas (kemudahan sarana transportasi).
- Kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota.
- Kedekatan dengan tempat tinggal PKL.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA MATARAM**

Dalam bab ini akan diuraikan secara umum gambaran aktivitas pedagang kaki lima di wilayah Kota Mataram. Uraian akan diawali terlebih dahulu dengan gambaran umum Kota Mataram, yang terdiri dari kondisi geografis, peran dan fungsi kota, kebijakan penatan ruang, ketersediaan fasilitas perkotaan, dan perkembangan jumlah penduduk. Sedangkan gambaran pedagang kaki lima di Kota Mataram meliputi perkembangan dan penyebaran lokasi aktivitas pedagang kaki lima, kondisi eksisting lokasi pedagang kaki lima, peran pedagang kaki lima dalam perekonomian kota, kebijakan Pemerintah Kota Mataram tentang lokasi aktivitas pedagang kaki lima, termasuk kontrol dari pemerintah kota terhadap pelanggaran lokasi pedagang kaki lima, serta karakteristik lokasi studi.

### **3.1. Gambaran Umum Kota Mataram**

#### **3.1.1. Kondisi Geografis Kota Mataram**

Kota Mataram terletak di Pulau Lombok, salah satu pulau yang merupakan bagian dari Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara geografis Kota Mataram terletak antara  $116^{\circ}.04' - 116^{\circ}.07'$  Bujur Timur dan  $08^{\circ}.33' - 08^{\circ}.42'$  Lintang Selatan.

Ditinjau dari sudut ekonomi, Kota Mataram berada pada posisi yang strategis karena dekat dengan pusat perdagangan Kota Surabaya, sehingga Mataram dapat dijadikan sebagai kota transito pergerakan ekonomi antara Wilayah Indonesia Barat ( Bali, Jawa ) dengan Wilayah Indonesia Timur ( NTT ). Selain itu yang menguntungkan pula bagi Kota Mataram adalah karena terletak diantara segi tiga emas Daerah Tujuan Wisata ( DTW ) yaitu bagian barat dengan Propinsi Bali, bagian timur dengan Pulau Komodo ( Propinsi NTT ) dan bagian utara dengan Tanah Toraja ( Propinsi Sulawesi Selatan ). Posisi yang

demikian menjadikan Kota Mataram sebagai pintu masuk utama (*the main gate*) bagi wisatawan untuk mengunjungi Propinsi NTB, khususnya Pulau Lombok, baik melalui udara (Bandara Selaparang) maupun laut melalui Pelabuhan Lembar yang jaraknya sekitar 10 km dari pusat Kota Mataram.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram, secara keseluruhan luas wilayah Kota Mataram adalah 6.130 Ha. terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Ampenan, Mataram, dan Cakranegara. memiliki 23 kelurahan, 247 lingkungan dengan 80.417 rumah tangga.

Adapun batas-batas wilayah Kota Mataram adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Sari dan Narmada Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Barat : Selat Lombok, yang merupakan alur pelayaran internasional.

Peta wilayah administrasi Kota Mataram ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.



### **3.1.2. Peran dan Fungsi Kota Mataram**

Kota Mataram sebagaimana kota-kota lainnya mempunyai fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Sedangkan secara khusus, Kota Mataram memiliki fungsi sebagai berikut:

#### **a. Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB )**

Penetapan Kota Mataram sebagai ibukota Propinsi NTB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tanggal 17 Desember 1958 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I NTB, yang terdiri dari Pulau Lombok dan Sumbawa. Berdasarkan UU tersebut peranan Kota Mataram semakin penting dan secara berangsur-angsur segala kegiatan mulai terpusat di kota ini. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam pengembangan wilayah Propinsi NTB, Kota Mataram merupakan pusat pengembangan I (satu) dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, industri dan pusat kegiatan pelayanan dengan tingkat kemudahan relatif tinggi.

#### **b. Kota Transit Pariwisata.**

Fungsi ini diuntungkan dengan kedudukan Kota Mataram yang berada pada segitiga emas Daerah Tujuan Wisata (DTW) yaitu bagian Barat dengan Propinsi Bali, bagian Timur dengan Pulau Komodo (Propinsi Nusa Tenggara Timur) dan bagian Utara dengan Tanah Toraja (Propinsi Sulawesi Selatan). Dari sudut ekonomi, sosial dan budaya, posisi ini jelas sangat menguntungkan karena Kota Mataram dapat menjadi kota transit yang menjembatani antara bagian barat dengan bagian timur wilayah Indonesia. Disamping itu Kota Mataram juga dapat dijadikan sebagai pintu masuk utama (*the main gate*) bagi wisatawan yang mengunjungi Propinsi NTB, khususnya Pulau Lombok yang kini semakin populer sebagai salah satu daerah tujuan wisata di

Indonesia. Guna mendukung kegiatan pariwisata Pemerintah Kota Mataram juga tengah merencanakan pembangunan dermaga di bekas pelabuhan Kota Lama Ampenan. Apabila dapat terwujud, maka fungsinya sebagai pelabuhan pelayaran rakyat akan semakin menunjang pengembangan pariwisata, khususnya wisata bahari dan budaya.

**c. Kota Kegiatan Perdagangan.**

Kegiatan perdagangan cukup menonjol di kota ini, karena didukung oleh posisi Kota Mataram yang berbatasan dengan Selat Lombok, yang notabene merupakan alur pelayaran internasional. Selain itu kedekatan dengan Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan juga secara ekonomis jelas menguntungkan bagi kegiatan perdagangan di Kota Mataram. Dukungan transportasi yang memadai dan berbagai fasilitas seperti fasilitas perbankan, perdagangan grosir maupun sarana dan prasarana ekonomi lainnya turut menunjang perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi di kota ini.

**3.1.3. Kebijakan Penataan Ruang Kota**

Dalam Rencana Tata Ruang Kota Mataram tahun 1996, wilayah Kota Mataram terbagi menjadi 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) sesuai dengan tingkat atau skala pelayanannya, dari bagian yang berskala besar sampai berskala kecil. Pembagian wilayah kota tersebut merupakan usaha untuk pemeratakan kegiatan di seluruh wilayah Kota Mataram dengan penyebaran fasilitas pelayanannya. Peta pembagian wilayah Kota Mataram dapat dilihat pada Gambar 3.2. di bawah ini.



Adapun pembagian wilayah Kota Mataram adalah sebagai berikut :

**1. BWK I**

Mencakup 14 unit lingkungan dengan luas keseluruhan 995,50 Ha. Sebagian besar wilayah BWK I merupakan wilayah Kecamatan Mataram. Fungsi utamanya adalah sebagai perkantoran, perumahan/pemukiman, perguruan tinggi dan ruang terbuka hijau.

**2. BWK II ( dua )**

Meliputi 18 unit lingkungan seluas 1.835,87 Ha. Sebagian besar wilayahnya adalah wilayah Kecamatan Cakranegara dengan arah fungsi pengembangan sebagai pusat perdagangan regional, perumahan/pemukiman, pertanian, industri non polutan, gelanggang olah raga dan fasilitas jasa.

**3. BWK III ( tiga )**

Terdiri dari 10 unit lingkungan dengan luas wilayah 2.098,93 Ha. Wilayah pada BWK III sebagian besar adalah wilayah Kecamatan Ampenan dengan arah fungsi utama pada sektor perumahan/pemukiman, kawasan konservasi pantai, perdagangan lokal, pergudangan/terminal/peti kemas.

**4. BWK IV ( empat )**

Mencakup 7 unit lingkungan seluas 1.199,70 Ha. Cakupan wilayahnya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Ampenan, Mataram dan Cakranegara bagian utara. Fungsi utamanya sebagai kawasan tertutup (untuk Bandara Selaparang), pengembangan kawasan hijau terbatas, pertanian, perdagangan lokal dan perumahan/pemukiman.

### 3.1.4. Fasilitas Perkotaan

Aktivitas atau kegiatan penduduk memerlukan ketersediaan fasilitas. Fasilitas perkotaan yang dibutuhkan bagi kegiatan masyarakat tersebut tersedia cukup lengkap di Kota Mataram. Kondisi ini membuat ibukota Propinsi NTB ini menjadi tempat kunjungan bagi masyarakat sekitar tanpa memperhatikan batas administrasi, terlebih dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, sehingga jarak bukanlah penghalang. Secara rinci fasilitas perkotaan yang tersedia di Kota Mataram pada tahun 2001 disajikan pada Tabel III.1. berikut.

**TABEL III.1.**  
**FASILITAS PERKOTAAN DI KOTA MATARAM TAHUN 2001**

NO.	FASILITAS	JENIS	JUNILAH
1.	Pendidikan	TK	73
		SD	143
		SLTP	35
		SLTA	29
		Akademi/PT	10
2.	Kesehatan	Rumah Sakit	3
		Rumah Bersalin	3
		Poliklinik/Balai Pengobatan	7
		Puskesmas	7
		Puskesmas Pembantu	17
		Praktek Dokter	35
3.	Peribadatan	Surau	60
		Masjid	43
		Gereja	7
		Pura	16
		Vihara	3
4.	Perekonomian	Kios	1.393
		Rumah Toko	75
		Pasar Bank	27
5.	Perkantoran	Kantor Lurah	23
		Kantor Camat	3
		Pos kebakaran	1
		Kantor Polisi Sektor	8
		Kantor Pos Cabang	3
		Kantor PLN	1
		Kantor PDAM	1
		Kantor Telepon	1
		Kantor Balai Kota	1
Gedung Serba Guna	1		

Sumber : Kota Mataram Dalam Angka Tahun 2001.

Ketersediaan fasilitas perkotaan yang cukup lengkap di Kota Mataram sebagaimana nampak pada tabel di atas menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan sektor informal PKL di Kota Mataram. Peran sebagai ibukota propinsi yang sekaligus memiliki fungsi sebagai kota perdagangan dan jasa juga kota pelayanan bagi daerah sekitar, khususnya Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur, membuat kota ini ramai dikunjungi setiap hari, terutama di lokasi-lokasi yang berkaitan dengan hal di atas. Sebagaimana diketahui bahwa aktivitas PKL berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Dengan tingginya aktivitas masyarakat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas sosial ekonomi, maka akan semakin menarik PKL untuk muncul.

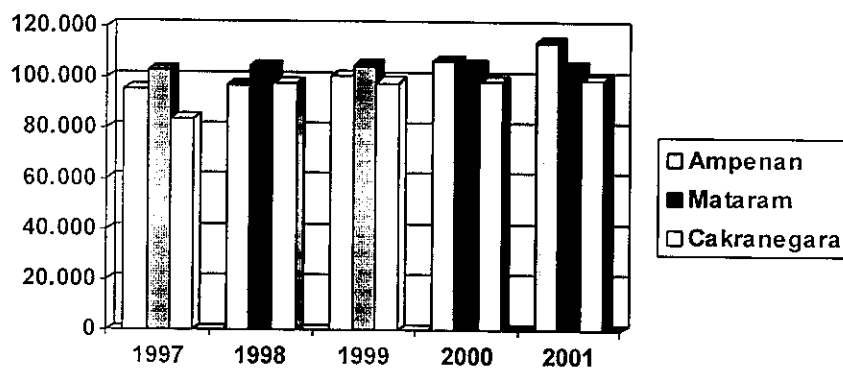
### 3.1.5. Perkembangan Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Mataram dalam kurun waktu 1997-2001 dapat dilihat pada Tabel III.2. dan gambar 3.3 dibawah ini.

**TABEL III.2.**  
**PERKEMBANGAN PENDUDUK KOTA MATARAM TAHUN 1997-2001**

TAHUN	KECAMATAN			JUMLAH (JIWA)
	AMPENAN	MATARAM	CAKRANEGARA	
1997	95.788	102.985	83.801	282.574
1998	97.142	104.318	97.688	299.148
1999	100.656	104.714	98.071	303.441
2000	106.776	105.044	98.223	310.043
2001	114.017	104.065	99.352	317.434

Sumber : Kota Mataram Dalam Angka Tahun 2001



**GAMBAR 3.3**  
**DIAGRAM PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK KOTA MATARAM**  
**MENURUT KECAMATAN**  
**TAHUN 1997-2001**

*Sumber : Kota Mataram Dalam Angka Tahun 2001*

Dari tabel dan gambar di atas terlihat bahwa perkembangan jumlah penduduk Kota Mataram dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu antara tahun 1997-2001 tidak menunjukkan peningkatan yang berarti, yaitu hanya 12,34 %. Namun jika melihat situasi dan kondisi kota yang terlihat dan terasa semakin padat dan ramai, maka hal ini lebih disebabkan adanya suatu kegiatan atau aktivitas masyarakat termasuk juga aktivitas perekonomian yang pada umumnya tidak mengenal batas administrasi wilayah. Sehingga dengan ketersediaan fasilitas masyarakat yang cukup lengkap di Kota Mataram, seperti fasilitas perdagangan, pendidikan, dan fasilitas sosial, membuat ibukota Propinsi NTB ini nampak semakin ramai dari tahun ke tahun.

Sedangkan berdasarkan mata pencaharian, penduduk Kota Mataram dikelompokkan ke dalam 10 kelompok mata pencaharian, yang terdiri dari mata pencaharian petani sendiri, buruh tani, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, PNS/ABRI, pensiunan dan lain-lain. Secara rinci komposisi

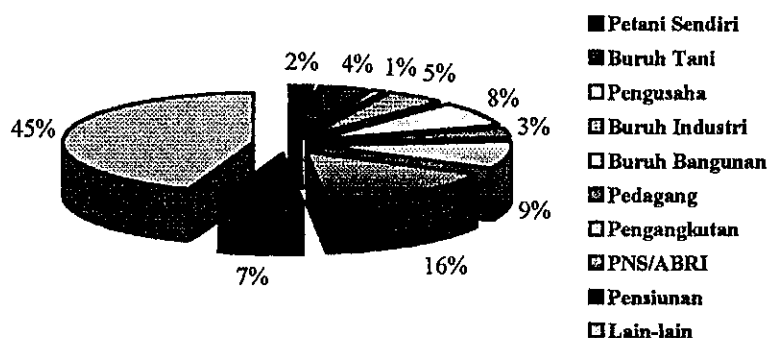
penduduk Kota Mataram berdasarkan mata pencaharian pada masing-masing kecamatan pada tahun 2001 dapat dilihat pada Tabel III.3.

**TABEL III.3.**  
**KOMPOSISI PENDUDUK KOTA MATARAM MENURUT MATA PENCAHARIAN**  
**TAHUN 2001**

JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			JUMLAH (JIWA)
	AMPENAN	MATARAM	CAKRANEGARA	
Petani sendiri	2.278	4.113	5.480	11.871
Buruh tani	4.510	3.786	6.845	15.141
Pengusaha	1.344	1.255	839	3.438
Buruh industri	5.791	3.283	6.213	15.287
Buruh bangunan	9.128	6.102	13.329	28.559
Pedagang	4.451	3.650	3.905	12.006
Pengangkutan	10.267	7.501	11.356	29.124
PNS/ABRI	17.770	22.062	18.910	58.742
Pensiunan	8.306	14.881	7.225	30.412
Lain-lain	50.172	37.432	25.250	112.854

Sumber : Kota Mataram Dalam Angka Tahun 2001

**GAMBAR 3.4.**  
**DIAGRAM KOMPOSISI PENDUDUK KOTA MATARAM**  
**MENURUT MATA PENCAHARIAN**  
**TAHUN 2001**



Sumber : Kota Mataram Dalam Angka Tahun 2001

Dari tabel dan diagram tersebut terlihat bahwa mata pencaharian lain-lain merupakan yang terbesar, yaitu 45 % dari mata pencaharian penduduk Kota Mataram. Pekerjaan lain-lain dapat dikategorikan sebagai pekerjaan disektor informal, demikian dinyatakan oleh Soetomo (1998, dalam Ambarwaty, 2003 : 69). Sebagai bagian dari kegiatan disektor informal, maka PKL termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini juga

kegiatan disektor informal, maka PKL termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini juga berarti bahwa pekerjaan disektor informal merupakan mata pencaharian yang paling banyak digeluti oleh penduduk Kota Mataram.

### **3.2. Pedagang Kaki Lima Di Kota Mataram**

#### **3.2.1. Perkembangan dan Jumlah PKL Di Kota Mataram**

Berdasarkan hasil studi *Lombok Poverty Alleviation & Environmental Infrastructure Project* diketahui bahwa banyak penduduk Lombok termasuk Kota Mataram terserap ke sektor informal. Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Mataram pada beberapa sisi telah memberi warna tersendiri bagi kota. Selain itu keberadaan pedagang kaki lima tersebut juga telah mampu memberikan alternatif bagi warga masyarakat untuk mendapatkan tempat jajan.

Walaupun perkembangan pedagang kaki lima di Kota Mataram belum seberapa jika dibandingkan dengan perkembangan pedagang kaki lima di Kota Denpasar, Surabaya, ataupun Semarang, namun upaya-upaya guna penataan lokasi mereka di beberapa tempat telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram. Meskipun lokasi tempat usaha pedagang kaki lima telah diatur dalam Surat Keputusan Walikota, banyak juga dari pedagang ini yang masih menempati tempat-tempat diluar lokasi yang telah ditetapkan, terutama di tempat-tempat yang dekat dengan keramaian kota.

Adapun karakteristik pedagang kaki lima di Kota Mataram bermacam-macam yang dapat dibedakan dari jenis dagangan, waktu melakukan usaha (siang dan atau malam hari), dan sarana prasarana yang digunakan.

Jenis dagangan pedagang kaki lima di Kota Mataram saat ini lebih bervariasi. Bila dahulu dagangan yang menghiasi warung-warung PKL kebanyakan makanan siap saji yang "khas" seperti *pelecing* dan *sate pusut*. Sekarang makanan import dari dalam negeri

seperti *pecel lele, soto lamongan, rujak cingur, mpek-mpek, gorengan, dan aneka seafood* maupun makanan luar negeri berupa aneka makanan China dan *fast food* (terutama ayam goreng) turut memeriahkan sajian makanan yang ditawarkan. Demikian pula dengan makanan yang tidak dan belum diproses: dahulu pedagang buah hanya bisa dijumpai di Jl. Panca Usaha, sekarang sudah menyebar hampir di semua sudut kota dan jenis buah yang ditawarkan pun sudah lebih bervariasi.

Selain makanan dan minuman, dagangan PKL juga mulai merambah jenis VCD, kerajinan tangan, poster dan buku-buku. Berbeda dengan dahulu yang hanya menjajakan kacamata, jam tangan, dan mainan anak-anak.

Dari segi waktu jualan, kini sudah banyak PKL yang berjualan pada malam hari dengan sarana prasarana yang juga lebih bervariasi; bukan hanya mengandalkan alas/gelaran dan keranjang/pikulan, tetapi juga kios dan warung-warung semi permanen.

Pedagang kaki lima di Kota Mataram saat ini tercatat berjumlah 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) orang yang tersebar di berbagai ruas jalan dengan aneka jenis usaha. Jumlah pedagang ini cenderung mengalami peningkatan seperti yang tampak pada tabel III.4. berikut.

**Tabel III.4**  
**Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram Tahun 1997 s/d Tahun 2002**

<b>T a h u n</b>	<b>J u m l a h</b>
1997	820 orang
1998	1.015 orang
1999	1.250 orang
2000	1.200 orang
2001	1.209 orang
2002	1.825 orang

*Sumber : APKLI Se-Indonesia Wilayah NTB*

Dari jumlah tersebut pola waktu berdagang pun berbeda, ada yang berdagang dari pagi sampai siang, sore sampai malam, bahkan ada yang dari pagi sampai malam.

### 3.2.2. Peranan PKL Dalam Perekonomian Kota Mataram

PKL selain memiliki dampak negatif, juga memiliki dampak positif. Salah satu dampak positif dari keberadaan PKL adalah sebagai penyedia lapangan kerja disaat terbatasnya pekerjaan yang tersedia di sektor formal. Dalam hal ini menjadi PKL dianggap sebagai cara termudah untuk bertahan hidup.

Bagi Pemerintah Kota Mataram, dengan akan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima, maka keberadaan PKL merupakan sumber yang berpotensi dalam penerimaan asli daerah (PAD) untuk pembiayaan pembangunan kota. Hal ini berkaitan dengan akan diterapkannya pungutan retribusi terhadap PKL yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang dikuasai/dikelola oleh pemerintah/badan hukum. Adapun besarnya retribusi yang akan dikenakan, ditetapkan berdasarkan luas ruang (tempat) aktivitas dagang PKL dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Golongan A. ukuran 10 – 15 m<sup>2</sup> ..... Rp. 1.500/hari.
- b. Golongan B. ukuran 4 – 9 m<sup>2</sup> ..... Rp. 1.000/hari.
- c. Golongan C. ukuran 2 – 3 m<sup>2</sup> ..... Rp. 500/hari.

### 3.2.3. Kondisi Eksisting Lokasi PKL Di Kota Mataram

Kondisi eksisting lokasi pedagang kaki lima di Kota Mataram terkesan bersifat sporadis dan tidak teratur. Ketidakteraturan ini lebih ditunjukkan dengan kondisi sarana prasarana yang digunakan.

Adapun kondisi eksisting lokasi PKL di Kota Mataram adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Cakranegara, mulai dari Terminal Mandalika, Jl. Sandubaya, Jl. TGH. Faesal, Jl. Hasanudin, Jl. Ismail Marzuki, Jl. A.A. Gde Ngurah, Jl. Brawijaya, Jl. Caturwarga, Jl. Pejanggik, Jl. Caturwarga, dan Jl. Panca Usaha.

- Kecamatan Mataram, terdapat di Jl. Veteran (antara RSU Mataram dengan Kantor Gubernur NTB), Jl. Harimau (samping RSU Mataram), Jl. Pariwisata, Jl. Perisaian (ruas jalan depan *Shopping Center*), Jl. Abdul Kadir Munsyi, Jl. Bung Hatta (depan Kantor Dinas Kesehatan Lombok Barat), Jl. Pendidikan, Jl. Amir Hamzah, Jl. Pemuda, Jl. Sriwijaya, Jl. Majapahit, Jl. Airlangga, Jl. Udayana, dan Jl. Arif Rahman Hakim.
- Kecamatan Ampenan, tersebar di Jl. Yos Sudarso, Jl. R. Soeprpto, Jl. Adi Sucipto, Jl. Saleh Sungkar, Jl. Ragigenep, Jl. Pabean, Jl. Niaga, Jl. Koperasi, Jl. Panji Tilar Negara, Jl. Langko, Jl. Imam Bonjol, Jl. Industri, dan Jl. Energi.

Secara spasial, kondisi eksisting PKL tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut.



### 3.2.4. Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Terhadap PKL

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 1/KPTS/2000 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, pada Pasal 15 disebutkan bahwa setiap pedagang kaki lima **dilarang** untuk bermalam/menginap pada lokasi usaha, memperluas lokasi usaha, merubah konstruksi yang telah ditetapkan, dan memindahkan tempat usaha ke lokasi lain.

Kemudian pada Pasal 16 memuat **kewajiban** yang harus dilaksanakan oleh setiap pedagang kaki lima untuk menyediakan tempat sampah sesuai dengan kebutuhan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menjaga keindahan dan keserasian tempat usaha, dan membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 17 berikutnya membahas mengenai **sanksi** terhadap pelanggaran yang akan dikenakan, berupa sanksi administrasi yaitu teguran I, II, III, dengan masing-masing tenggang waktu selama 1 (satu) minggu. Apabila tidak diindahkan, kepada mereka akan dikenakan pencabutan izin. Namun apabila tidak diindahkan lagi, maka dilakukan pembongkaran paksa.

Disamping ketentuan tersebut diatas, pemerintah kota juga mengupayakan pembinaan dan pengawasan terhadap para pedagang kaki lima yang dilakukan bersama-sama dengan APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) Wilayah Kota Mataram atau organisasi yang sejenis. Adapun bentuk pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi bimbingan dan penyuluhan, bantuan permodalan, manajemen pengelolaan usaha, dan bentuk-bentuk lainnya.

### 3.3. Karakteristik Lokasi Studi

Dalam studi ini, lokasi penelitian tersebar di beberapa lokasi, yaitu Jl. Pejanggik, Jl. Bung Karno, Jl. Perisaian, Jl. Sriwijaya, Jl. Pemuda, Jl. A.A. Gde Ngurah, Jl. Veteran, dan Terminal Mandalika, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.6. Selanjutnya akan diuraikan karakteristik tiap lokasi, meliputi jenis-jenis kegiatan formal apa saja yang berkembang, serta karakteristik PKL pada lokasi yang bersangkutan sehingga dapat diketahui keterkaitan antara keberadaan PKL dengan fungsi ruang di lokasi dimaksud. Gambaran ini diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong PKL dalam memilih lokasi tersebut sebagai tempat untuk melakukan aktivitas perdagangan yang akan dibahas lebih lanjut di Bab IV. Sedangkan Gambar 3.6. dan 3.7. menunjukkan kondisi eksisting lokasi studi.

#### A. Jalan Pejanggik

Jalan Pejanggik merupakan jalan utama pada kawasan perdagangan Cakranegara. Aktivitas formal utama yang berkembang di kawasan ini adalah aktivitas perdagangan, pendidikan dan perkantoran. Aktivitas perdagangan ditandai dengan berdirinya Mataram Mall, *Ruby Departement Store*, Mataram Plaza, dan deretan pertokoan hampir disepanjang jalan ini. Sedangkan kegiatan pendidikan dan perkantoran yang ada di sekitar jalan ini antara lain SD 17 Karang Jangkong, SMP dan SMU Kristen Kesuma, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kota Mataram Kecamatan Cakranegara, Bank Danamon, Bank BTN, Bank BCA, dan Bank Mandiri.

Di sepanjang Jalan Pejanggik ini terdapat trotoar dengan lebar 1,5 meter. Adapun aktivitas PKL yang berlokasi di sini meliputi jenis usaha makanan/minuman berupa ayam taliwang, aneka roti bakar, martabak/terang bulan, dan sebagainya. Sedangkan jenis non makanan yang dijual adalah kacamata, jam tangan, mainan anak-anak, VCD, dan jasa

reparasi ban. Sarana dagang yang digunakan berupa gerobak tanpa roda, meja dan bangku. Bentuk bangunan menggunakan tiang dan atap plastik. Waktu usaha ada yang pagi-sore, siang-sore, dan siang-malam. Lokasi penggunaan lahan lebih dominan dilakukan di tepi jalan. Jalan Pejangik merupakan trayek utama (A) yang dilalui angkutan kota jurusan Ampenan sampai Terminal Mandalika.

### **B. Jalan Sriwijaya**

Aktivitas di sepanjang ruas Jalan Sriwijaya sangat beragam, seperti perkantoran, perdagangan, dan industri. Perkantoran yang ada antara lain Kantor DPD Golkar, Kantor Camat Mataram, Kantor Distribusi Pupuk Sriwijaya, Kantor Administrasi Perusahaan Newmont, Kantor BPM Kabupaten Lombok Barat, dan Kantor Pos Besar. Sementara aktivitas perdagangan ditandai dengan berdirinya *Supermarket* Sriwijaya, dan berdirinya Perusahaan Beton Tunas Jaya menandai adanya aktivitas industri di timur jalan ini. Disamping itu pada kawasan ini juga terdapat perumahan penduduk, antara lain perumahan BTN Taman Baru dan BTN Taman Indah.

Karakteristik PKL yang beraktivitas pada jalan ini ditandai dengan penggunaan sarana dagang berupa meja dan bangku, gerobak tanpa roda *Sampurna A Mild*, serta kompresor pada jasa reparasi ban. Bentuk bangunan PKL pada ruas jalan ini adalah menggunakan tiang dan atap plastik atau seng. Sementara dinding tempat usaha memakai bedek, papan, kain atau bambu. Aktivitas dagang dilakukan dengan menggunakan lahan bahu jalan, trotoar, maupun diatas saluran dengan waktu usaha yang bervariasi. Ada yang beroperasi dari pagi-siang, pagi-sore, sore-malam, bahkan ada yang dari pagi-malam. Adapun jenis usaha PKL yang terdapat di lokasi ini meliputi makanan/minuman (gorengan, bubur kacang hijau, sate, martabak, ayam bakar), buah-buahan, tas, rokok,

bensin dan jasa reparasi ban. Pada kedua sisi ruas jalan ini terdapat trotoar dengan lebar 1,5 meter. Alat transportasi yang melalui jalan ini adalah alat angkut tradisional (cidomo).

### **C. Jalan Veteran**

Jalan Veteran terletak antara Kantor Gubernur NTB dan RSUD Mataram. Pada ruas jalan ini terlihat deretan aktivitas PKL dengan karakteristik menggunakan sarana meja dan bangku, gerobak beroda, gerobak tanpa roda sebagai tempat menyimpan barang dagangan. Adapun bangunan yang dipakai menggunakan atap plastik dan pohon atau besi sebagai tiang. Jenis usaha PKL yang beroperasi pada ruas jalan ini adalah pedagang makanan/minuman (jajan, nasi bungkus, soto/bakso), buah-buahan, rokok, dan jasa sol sepatu. Waktu usaha dilakukan dari pagi-sore atau dari pagi-malam hari dengan menggunakan lahan diatas saluran sebagai tempat lokasi. Pada ruas kanan dan kiri jalan terdapat trotoar dengan lebar 1,5 meter. Pada jam 10.00 pagi sampai 18.00 sore, lalu lintas di jalan ini sangat ramai dan sering macet, karena banyak cidomo yang mangkal sementara angkutan kota juga sering mencari penumpang di sini.

### **D. Jalan Perisaian**

Jalan Perisaian merupakan jalan yang terletak di depan RSUD Mataram, diantara *Shopping Center* dan Gereja GPIB Immanuel. Karakteristik PKL yang beroperasi di lokasi ini antara lain menggunakan sarana dagang meja dan bangku, gerobak tanpa roda, serta kompresor bagi jasa reparasi ban. Bentuk bangunan menggunakan kayu atau besi sebagai tiang dan beratap seng atau plastik. Sementara dinding bangunan ada yang menggunakan seng dan ada pula yang memakai kain. Jenis usaha PKL di lokasi ini meliputi makanan/minuman (jajan, nasi bungkus, peleceng, ayam taliwang), buah-buahan, rokok, dan jasa reparasi ban. Waktu usaha ada yang memilih dari pagi-sore dan ada pula yang berdagang dari pagi-malam. Lokasi penggunaan lahan dilakukan di pinggir jalan.



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

## T E S I S

STUDI ASPEK YANG  
DIPRIORITASKAN PADA FAKTOR  
EKONOMI, SOSIAL, DAN FISIK  
DALAM PENENTUAN LOKASI PKL  
DI KOTA MATARAM

## GAMBAR

### SEBARAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MATARAM

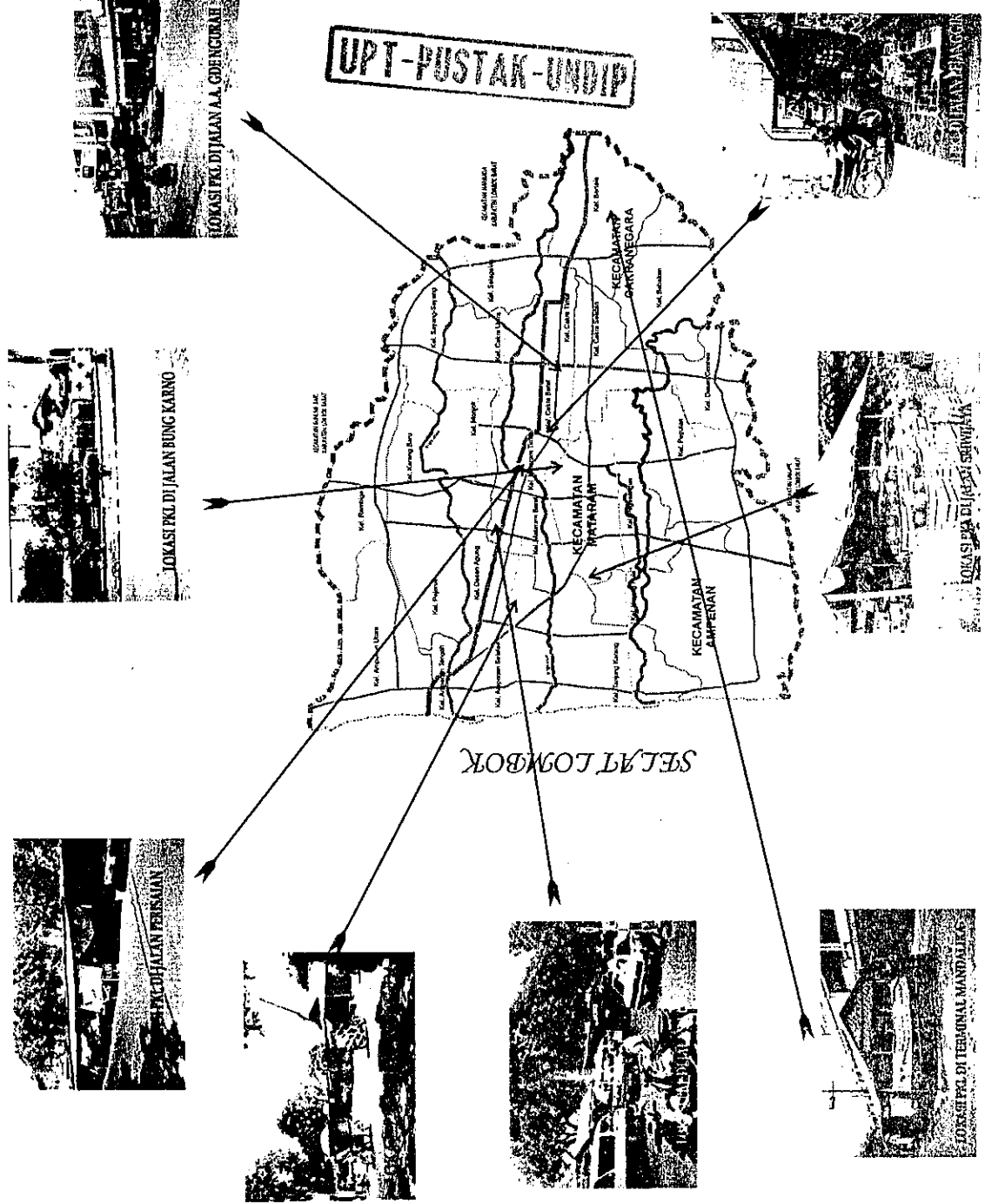
#### KETERANGAN :

- Batas Kota Mataram
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Utama
- Jalan Antar-Sub Wilayah
- Jalan Antar-Lingkungan
- Jalan Lingkungan



SKALA 1:1500.000  
No. Gambar 3.6

SUMBER  
HASIL ANALISIS, 2003





Pada kedua ruas jalan ini tidak terdapat trotoar. Angkutan kota juga tidak melalui jalan ini, karena tidak ada trayek.

#### **E. Jalan Bung Karno**

Jalan Bung Karno terletak di antara ruas Jl. Catur Warga dengan Jl. Sriwijaya. Pada ruas jalan ini berdiri Kantor ASKES Cabang Mataram, Hotel Granada, Gereja GPIB Imanuel, Rumah Bersalin Tresna, radio Gemini, dan satu buah lembaga pendidikan SMK.

Karakteristik PKL yang melakukan aktivitasnya di jalan ini antara lain jenis usaha dagang makanan/minuman (jajan dan nasi bungkus), rokok, bensin dan jasa reparasi ban. Bentuk bangunan menggunakan tiang dan atap plastik dengan dinding memakai kain atau bedek. Sementara sarana dagang yang digunakan adalah meja dan bangku, gerobak beroda *Sampurna A Mild*. Waktu usaha ada yang beroperasi dari pagi-sore, dan ada pula yang berdagang dari pagi-malam. Lokasi penggunaan lahan ada yang diatas trotoar, dan ada pula yang diatas saluran air (saluran ditutup dengan menggunakan papan).

Alat transportasi yang banyak melalui jalan ini adalah alat transportasi tradisional, yaitu cidomo.

#### **F. Jalan Pemuda**

Jalan Pemuda termasuk kawasan campuran, yang didalamnya terdapat berbagai macam aktivitas. Aktivitas formal utama yang berkembang di kawasan ini adalah aktivitas pendidikan dan perkantoran, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang berkembang karena kedua aktivitas tersebut, seperti rumah-rumah makan, pondokan, warung internet, warung fotokopi, dan lain sebagainya.

Perkembangan aktivitas pendidikan di Jalan Pemuda ditunjukkan dengan keberadaan fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari tingkat terendah (taman kanak-kanak) hingga pendidikan tinggi. Fasilitas pendidikan tersebut antara lain TK

Negeri Pembina Mataram dan TK Idhata, SD 10 Mataram, SMU 3 Mataram, SMEA 2 Mataram, Akademi Manajemen & Komputer, Universitas Mataram, serta Universitas NTB. Kemudian fasilitas perkantoran yang ada diantaranya adalah Kantor Koperasi & PKM Kota Mataram, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kota Mataram Kecamatan Mataram, dan Badan Diklat Propinsi NTB.

Jalan ini dilalui oleh sarana transportasi umum (angkutan kota), dan transportasi tradisional yaitu cidomo. Sementara disepanjang jalan terdapat trotoar dengan lebar 1,5 meter.

Karakteristik PKL yang berlokasi di jalan ini antara lain menggunakan sarana dagang gerobak dorong, dan gerobak tanpa roda *Sampurna A Mild*. Bentuk bangunan menggunakan tiang dari pohon atau besi dan beratap plastik. Waktu berusaha ada yang dari pagi-sore dan ada pula yang dari pagi-malam hari. Jenis usaha yang dijalankan meliputi makanan/minuman (jajan, es kelapa muda, bakso/mie ayam, ayam goreng), non makanan seperti rokok dan bensin, dan jasa reparasi ban.

#### **G. Jalan A.A. Gde Ngurah**

Jalan A.A. Gde Ngurah terletak di jantung pusat perniagaan Cakranegara. Sesuai dengan letaknya, maka di kawasan ini berkembang aktivitas perdagangan sebagai aktivitas utama. Hal ini ditunjukkan dengan deretan pertokoan di sepanjang jalan. Disamping itu juga terdapat Pasar Cakranegara yang beroperasi dari pagi-sore hari.

Adapun karakteristik PKL yang beropersi di jalan ini antara lain ditunjukkan dengan sarana dagang meja, alas/gelaran, dan gerobak dorong. Mereka berjualan di emper toko atau di pinggir jalan. Jenis usaha PKL yang banyak dilakukan di jalan ini adalah non makanan seperti jam, kacamata, buku/poster/majalah, mainan anak-anak dan konveksi. Sedangkan untuk PKL makanan, yang dijual berupa keripik singkong "Kuncoro" dan

aneka jajan (roti dan makanan ringan lainnya). Waktu usaha banyak dilakukan dari pagi-sore atau dari pagi-malam hari.

#### **H. Terminal Mandalika**

Terminal Mandalika merupakan terminal AKAP dan AKDP kelas B yang berlokasi di Kelurahan Bertais. Pada lokasi ini juga terdapat kompleks pertokoan dan pasar induk Mandalika yang beroperasi dari pagi hingga sore hari. Selain itu juga terdapat lembaga perbankan yaitu Bank Antar Daerah.

Karakteristik PKL yang berlokasi disini menggunakan sarana dagang meja dan bangku, gerobak tanpa roda sebagai tempat menyimpan barang, dan kaca serta peralatan cukur. Bentuk bangunan yang digunakan menggunakan tiang dari kayu dan beratap seng atau plastik, sementara dinding terbuat dari bedek atau kain. Waktu usaha lebih banyak dilakukan dari pagi-sore hari. Adapun jenis usaha yang dijalankan adalah usaha makanan/minuman (nasi bungkus, nasi campur, jajan), buah-buahan. Usaha non makanan meliputi mainan anak-anak, rokok dan bensin. Sedangkan jasa yang beroperasi adalah jasa tukang cukur. Lokasi lahan yang dipergunakan ada yang diatas saluran (saluran ditutup menggunakan papan), ataupun di pinggir jalan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS ASPEK YANG DIPRIORITASKAN PADA FAKTOR EKONOMI, SOSIAL, DAN FISIK DALAM PENENTUAN LOKASI PKL DI KOTA MATARAM**

Dalam bab ini akan diuraikan analisis mengenai urutan prioritas aspek dari masing-masing faktor dalam penentuan lokasi PKL. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi jenis dagangan, waktu berjualan, dan biaya angkutan untuk pilihan aspek dalam faktor ekonomi. Sedangkan aspek-aspek yang termasuk dalam faktor sosial adalah keamanan, kenyamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan. Aspek-aspek dalam faktor fisik antara lain kemudahan sarana aksesibilitas, kedekatan dengan keramaian kota/kegiatan masyarakat, serta kedekatan dengan tempat tinggal PKL. Sebelum melakukan analisis tentang urutan prioritas aspek dari masing-masing faktor, terlebih dahulu akan dilakukan identifikasi aspek-aspek yang diprioritaskan dalam penentuan lokasi PKL berdasarkan pilihan responden PKL, masyarakat, dan pemerintah kota.

#### **4.1. Identifikasi Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut PKL**

##### **4.1.1. Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Ekonomi**

Identifikasi prioritas aspek dalam faktor ekonomi menurut pedagang yang bersangkutan ini merupakan kajian untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi prioritas dalam faktor ekonomi, yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi bagi aktivitas usaha mereka. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi jenis dagangan PKL, biaya angkutan, dan waktu berjualan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh, prioritas pilihan responden PKL mengenai aspek-aspek dalam faktor ekonomi dapat dilihat pada Tabel IV.1 dibawah ini.

**TABEL IV.1**  
**PRIORITAS ASPEK DALAM FAKTOR EKONOMI**  
**MENURUT PKL RESPONDEN**

No.	Pilihan Faktor Ekonomi	Jumlah PKL Responden	%
1.	Jenis dagangan	16	47,1
2.	Waktu jualan	18	52,9
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Pada tabel tabulasi terlihat bahwa mayoritas PKL responden memilih waktu jualan sebagai prioritas utama dalam menentukan lokasi usaha mereka, yang disusul dengan jenis dagangan. Menurut sebagian besar responden, besarnya biaya angkutan menuju lokasi usaha disiasati dengan pemilihan lokasi yang dekat dari tempat tinggal mereka, sehingga meskipun menurut mereka aspek ini perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi usaha mereka, namun dianggap tidak menjadi prioritas utama.

#### **4.1.1.1. Jenis Dagangan PKL**

Berdasarkan jenis dagangan yang dijualnya, PKL responden dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Makanan/minuman, seperti nasi bungkus, soto/bakso/mie ayam, gorengan, jajan, ayam taliwang, sate, pelecng/pecel, buah-buahan, es kelapa muda, dan lain-lain.
- b. Barang bukan makanan (non makanan), antara lain poster/buku/majalah, jam tangan/kacamata, kaset/VCD, mainan anak-anak, konveksi/tas, rokok, bensin, dan lain-lain.
- c. Jasa, terdiri dari tambal ban, tukang cukur, sol sepatu, dan jasa lainnya.

Berdasarkan kategori tersebut, maka jenis dagangan PKL responden tercantum seperti pada Tabel IV.2 berikut.

**TABEL IV.2**  
**PRIORITAS JENIS DAGANGAN PKL RESPONDEN**

No.	Jenis Dagangan	Jumlah	%
1.	Makanan/minuman	18	53
2.	Non makanan	8	23,5
3.	Jasa	8	23,5
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Pada Tabel IV.2 diatas tampak bahwa sebanyak 53 % PKL responden menjual dagangan berupa makanan/minuman. Sedangkan PKL yang menjual jenis dagangan non makanan adalah 23,5 % sama dengan jumlah PKL yang menjual jasa. Hal ini menunjukkan bahwa makanan/minuman lebih mendominasi jenis dagangan PKL.

Mc. Gee dan Yeung (1977:82-83) menyatakan bahwa jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitarnya. Kota Mataram sebagai ibukota Propinsi NTB, tempat terpusatnya berbagai aktivitas terutama pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan merupakan faktor pencetus munculnya usaha-usaha PKL terutama dibidang makanan.

Sebagai ibukota Propinsi NTB, Kota Mataram merupakan pusat pengembangan I (satu) dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, industri, dan pusat kegiatan pelayanan dengan tingkat kemudahan relatif tinggi. Sebagai pusat pemerintahan, kota ini merupakan tempat beraktivitasnya tata praja Propinsi NTB, sebagian dinas/instansi Kabupaten Lombok Barat seperti BAPPEDA, BAWASDA, Badan Penanaman Modal Daerah, Dinas Pendapatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan

Kantor Inkom, selain dinas/instansi pemerintah Kota Mataram sendiri. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sektor informal PKL. Dapat kita lihat tenda-tenda PKL yang berjajar di Jl. Veteran (samping Kantor Gubernur NTB), Jl. Bung Karno, Jl. Sriwijaya, dan Jl. Pemuda.

Sebagai pusat pendidikan, Kota Mataram memiliki 8 (delapan) buah perguruan tinggi, yaitu Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Al-Azhar, Universitas 45, Universitas NTB, STAIN, STAH, dan STMIK, dengan skala pelayanan yang tidak hanya mencakup lokal, namun juga nasional. Hal ini ditunjukkan dengan menjamurnya jumlah jasa pondokan di kota ini, seperti yang tampak pada Tabel IV.3 berikut.

**TABEL IV.3**  
**JUMLAH PONDOKAN DI KOTA MATARAM TAHUN 2003**

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemilik	Jumlah Kamar
1	Cakranegara	33 orang	437 buah
2	Ampenan	32 orang	530 buah
3	Mataram	33 orang	441 buah
<b>Jumlah</b>		<b>98 orang</b>	<b>1.408 buah</b>

*Sumber : Dinas Pendapatan, 2003.*

Data tersebut menunjukkan banyaknya jumlah mahasiswa yang berasal dari luar kota, sehingga mendorong berkembangnya usaha-usaha guna pemenuhan kebutuhan mahasiswa. Salah satu yang menonjol disektor informal adalah penyediaan kebutuhan primer, yaitu makan dan minum. Tenda-tenda PKL yang berjajar di sekitar kawasan pendidikan dan permukiman mahasiswa terutama di Jl. Pemuda dan sekitarnya menunjukkan hal tersebut.

Kota Mataram sebagai pusat kegiatan perdagangan, menjadi pusat kunjungan para pelaku kegiatan perdagangan, baik pedagang maupun pembeli. Dan seperti halnya kegiatan pendidikan, kegiatan ini juga mendorong berkembangnya usaha penyediaan kebutuhan primer, makanan dan minuman. Deretan tenda-tenda ayam taliwang, soto betawi/lamongan, nasi goreng surabaya dan aneka jenis makanan/minuman lainnya di Jl. Pejanggalik (depan Mataram

Mall) terutama bila malam menjelang semakin memperkuat keberadaan PKL yang bergelut dalam bidang usaha makanan/minuman.

Dari uraian diatas, membuktikan pernyataan yang dikemukakan oleh Mc. Gee (1977 : 87) bahwa :

*"It is a fact, however that an important portion of urban food is provided by locally-produced goods in which the distribution networks from producer to seller are dominated by people who are part of informal sector".*

Berkaitan dengan lokasi usaha yang diprioritaskan oleh PKL responden, hasil kuesioner tentang hal tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.4 berikut.

**TABEL IV.4**  
**PRIORITAS PILIHAN LOKASI PKL RESPONDEN**

No.	Pilihan Lokasi	Jenis Dagangan			Jumlah	%
		Makanan	Non Makanan	Jasa		
1	Pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan	3	5	4	12	35,3
2	Perkantoran, sekolah	8		1	9	26,5
3	Terminal	3	3	2	8	23,5
4	Perumahan/tmpt tinggal penduduk	4		1	5	14,7
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pilihan lokasi jenis dagangan makanan/minuman dan jasa cenderung tersebar di seluruh pilihan lokasi yang ada, walaupun terdapat perbedaan dari sisi prioritas. Jenis makanan/minuman lebih memprioritaskan lokasi-lokasi di sekitar kawasan perkantoran, sekolah dan perumahan/tempat tinggal penduduk. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mc Gee dan Yeung (1977 : 69) berdasarkan hasil analisis di beberapa kota di Asia Tenggara bahwa jenis makanan dan minuman biasanya mengambil tempat-tempat strategis seperti di perkantoran, sekolah, tempat rekreasi/hiburan, persimpangan jalan utama menuju perumahan.

Sebaliknya jenis jasa lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan dan terminal sebagai pilihan lokasi usaha mereka, seperti yang dinyatakan oleh Mc Gee dan Yeung (1977 : 69) bahwa pola penyebaran jasa cenderung memilih tempat di lokasi pusat pertokoan, hampir sama dengan jenis dagangan non makanan.

#### **4.1.1.2. Biaya Angkutan**

Semua PKL responden menyetujui bahwa besarnya biaya angkutan turut berpengaruh terhadap pilihan lokasi aktivitas mereka. Oleh karena itu pilihan lokasi aktivitas mereka cenderung berjarak dekat dari tempat tinggal mereka. Contohnya PKL responden yang berdagang di Jl. Sriwijaya dan Jl. Bung Karno, mereka rata-rata berdomisili di daerah Karang Tapen, Pajang, Gebang, dan Punia. Demikian pula dengan PKL yang beroperasi di Jl. Pemuda, mereka dominan bertempat tinggal di daerah Gomong, Punia, dan Karang Medain. Sedangkan PKL responden yang berdagang di Jl. Veteran dan Perisaian, kebanyakan berasal dari daerah Karang Tatah, Karang Baru, dan Karang Anyar. Bagi PKL responden di Jl. Pejanggik, mereka mayoritas berasal dari Pajang, Karang Kemong, Karang Tapen, dan Kampung Jawa Cakra. Sementara PKL responden di Jl. A.A. Gde Ngurah rata-rata berasal dari daerah Cakra, tidak jauh berbeda dengan para PKL responden di Terminal Mandalika yang rata-rata berdomisili di Cakra dan Sweta.

#### **4.1.1.3. Waktu Berjualan**

Dalam kaitannya dengan waktu berjualan, sebagian besar PKL cenderung memilih waktu berjualan dari pagi hingga malam hari, seperti yang tampak pada Tabel IV.5 di bawah ini.

UPT-PUSTAK-UNDIP

**TABEL IV.5**  
**PRIORITAS WAKTU BERJUALAN PILIHAN PKL RESPONDEN**

No.	Pilihan Waktu Berjualan	Jenis Dagangan			Jumlah	%
		Makanan	Non Makanan	Jasa		
1.	Pagi-sore (06.00-18.00)	3	3	4	10	29,4
2.	Pagi-malam (06.00-21.00)	11	5	4	20	58,8
3.	Sore-malam (06.00-21.00 keatas)	4			4	11,8
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sebanyak 20 orang PKL responden atau 58,8 % cenderung memprioritaskan pilihan waktu pagi-malam hari. Sedangkan pilihan terendah adalah dari sore-malam hari, yaitu sebanyak 4 orang atau 11,8 %.

Dari hasil lembar jawaban kuesioner PKL responden, diketahui bahwa PKL jenis dagangan makanan/minuman yang berlokasi di Jl. Pejanggik dan Jl. Perisaian (terutama pedagang makanan ayam taliwang, pecel lele, dan aneka *sea food* lainnya) lebih memilih sore-malam hari sebagai waktu jualan. Sedangkan PKL yang berlokasi di Jl. Bung Karno, Jl. Veteran, dan Jl. Sriwijaya lebih memilih waktu pagi-sore hari. Hal ini terkait dengan aktivitas formal di sekitar mereka yang didominasi oleh perkantoran dan pendidikan, dimana faktor tersebut mengakibatkan aktivitas masyarakatnya lebih banyak dilakukan pada pagi-sore hari.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramli (1992 : 39), di Kota Jakarta dan Bandung, disebutkan bahwa waktu yang dianggap paling sesuai untuk berjualan adalah antara jam 06.00 pagi sampai jam 18.00 sore atau jam 18.00 hingga 20.00 malam, karena pada waktu-waktu tersebut terdapat pengunjung yang cukup banyak. Pernyataan ini tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mc Gee dan Yeung (1977 : 78) dari penelitian mereka di kota-kota di Asia Tenggara yang menunjukkan bahwa pola aktivitas PKL

menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal.

#### 4.1.2. Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Sosial

Identifikasi prioritas aspek-aspek yang termasuk dalam faktor sosial ini merupakan kajian terhadap pilihan aspek dalam faktor sosial, yang diprioritaskan oleh PKL responden dalam menentukan lokasi bagi aktivitas dagang mereka. Adapun pilihan aspek yang dimaksud meliputi faktor keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan keindahan. Hasil kuesioner PKL responden mengenai pertimbangan mereka terhadap aspek-aspek dalam faktor sosial ini berkaitan dengan penentuan lokasi usaha aktivitas mereka, dapat dilihat pada tabel IV.6 dibawah ini.

**TABEL IV.6**  
**PRIORITAS ASPEK DALAM FAKTOR SOSIAL**  
**MENURUT PKL RESPONDEN**

No.	Pilihan Faktor Sosial	Jumlah PKL Responden	%
1.	Faktor keamanan	30	88,2
2.	Faktor kenyamanan	4	11,8
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Tabel diatas memperlihatkan bahwa PKL responden ternyata lebih memprioritaskan faktor keamanan dan kenyamanan dibandingkan faktor-faktor sosial lainnya. Menurut mereka tanpa adanya rasa aman, mereka tidak akan merasa nyaman dalam melakukan aktivitas dagang mereka. Perasaan tidak aman berhubungan dengan kekhawatiran para PKL terhadap aksi penggusuran yang kadang-kadang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram. Hal ini berarti lokasi usaha PKL tersebut belum mendapat pengakuan dari Pemerintah Kota Mataram berkaitan dengan kepastian lokasi/tempat berdagang. Seperti yang dikatakan oleh Soto (1991 :

76) bahwa kepastian lokasi/tempat berdagang memberikan perasaan aman dan nyaman bagi PKL. Dan untuk memperoleh kepastian lokasi tersebut, PKL harus mendapat ijin dari Pemerintah Kota setempat.

#### 4.1.3. Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Fisik

Identifikasi prioritas aspek-aspek dalam faktor fisik penentuan lokasi PKL menurut pedagang yang bersangkutan ini adalah kajian untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi prioritas dalam faktor fisik berkaitan dengan penentuan lokasi bagi aktivitas usaha mereka. Pilihan aspek yang dimaksud antara lain kemudahan dalam memperoleh sarana transportasi, lokasi strategis, kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota, dan kedekatan dengan tempat tinggal PKL.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh, pilihan prioritas aspek dalam faktor fisik menurut para responden PKL dapat dilihat pada Tabel IV.7 dibawah ini.

**TABEL IV.7**  
**PRIORITAS ASPEK DALAM FAKTOR FISIK**  
**MENURUT PKL RESPONDEN**

No.	Pilihan Faktor Fisik	Jumlah PKL Responden	%
1	Kemudahan aksesibilitas	3	8,8
2	Kedekatan dengan kegiatan masyarakat / keramaian kota	26	76,5
3	Kedekatan dengan tempat tinggal PKL	5	14,7
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Pada dasarnya seluruh responden PKL menyatakan setuju pada pilihan aspek-aspek dalam faktor fisik diatas. Namun karena mereka cenderung menginginkan lokasi-lokasi yang strategis, yang menurut mereka mempunyai tingkat intensitas kunjungan masyarakat yang

tinggi, terlihat bahwa sebagian besar responden PKL memilih kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota sebagai prioritas utama dalam menentukan lokasi usaha mereka.

#### 4.1.3.1. Kemudahan Dalam Sarana Transportasi

Seluruh PKL responden menyatakan bahwa kemudahan dalam memperoleh sarana transportasi juga mereka pertimbangkan dalam penentuan lokasi usaha. Oleh karena itu mereka memilih lokasi-lokasi yang tingkat kemudahan dalam memperoleh sarana transportasi cukup memadai, minimal ada cidomo, alat angkut tradisional yang melalui lokasi dimana mereka beraktivitas. Hal ini dapat dilihat pada Tabel IV.8 dibawah ini.

**TABEL IV.8**  
**PRIORITAS SARANA TRANSPORTASI PILIHAN PKL RESPONDEN**

No.	Pilihan Sarana Transportasi	Jumlah PKL Responden	%
1.	Angkutan Kota	8	23,5
2.	Cidomo	14	41,2
3.	Lainnya	12	35,3
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa 14 orang PKL responden (41,2 %) menggunakan alat angkut tradisional cidomo sebagai sarana transportasi. Ada 8 orang (23,5 %) yang memilih angkutan kota, sedangkan sisanya 12 orang (35,3 %) menggunakan sepeda dan berjalan kaki menuju lokasi usaha mereka.

Rendahnya pengguna angkutan kota menunjukkan bahwa lebih dominan PKL yang berdomisili dekat dengan lokasi dagang, sehingga dengan cukup berjalan kaki mereka dapat mencapai lokasi tanpa harus mengeluarkan biaya angkut.

#### 4.1.3.2. Kedekatan Dengan Kegiatan Masyarakat/Keramaian Kota

Yang dimaksud kedekatan kegiatan masyarakat/keramaian kota adalah kedekatan antara lokasi usaha PKL dengan kegiatan-kegiatan masyarakat atau lokasi-lokasi yang tingkat kunjungan masyarakatnya tinggi, seperti kegiatan perdagangan (pasar/pusat perbelanjaan), perkantoran, perumahan/tempat tinggal penduduk, pendidikan (sekolah), maupun terminal. Kedekatan tersebut ditunjukkan dengan ukuran jarak, dimana jarak yang dekat adalah kurang dari 100 m, jarak sedang yaitu antara 100 m s/d 500 m, sedangkan jarak jauh adalah jarak yang lebih dari 500 m. Adapun hasil kuesioner berkaitan dengan kedekatan lokasi usaha PKL dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota dapat dilihat pada Tabel IV.9 hingga Tabel IV. 12 berikut.

**TABEL IV.9**  
**PRIORITAS JARAK ANTARA LOKASI USAHA PKL**  
**DENGAN PASAR/PUSAT PERBELANJAAN**  
**MENURUT PKL RESPONDEN**

No.	Pilihan Jarak	Jumlah PKL Responden	%
1.	Dekat, yaitu kurang dari 100 m.	30 orang	88,2
2.	Sedang, antara 100 s/d 500 m.	4 orang	11,8
<b>Jumlah</b>		<b>34 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.10**  
**PRIORITAS JARAK ANTARA LOKASI USAHA PKL**  
**DENGAN PERKANTORAN, SEKOLAH**  
**MENURUT PKL RESPONDEN**

No.	Pilihan Jarak	Jumlah PKL Responden	%
1.	Dekat, yaitu kurang dari 100 m.	34 orang	100
<b>Jumlah</b>		<b>34 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.11**  
**PRIORITAS JARAK ANTARA LOKASI USAHA PKL**  
**DENGAN TERMINAL**  
**MENURUT PKL RESPONDEN**

No.	Pilihan Jarak	Jumlah PKL Responden	%
1.	Dekat, yaitu kurang dari 100 m.	7 orang	20,6
2.	Sedang, antara 100 s/d 500 m.	27 orang	79,4
<b>Jumlah</b>		<b>34 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.12**  
**PRIORITAS JARAK ANTARA LOKASI USAHA PKL**  
**DENGAN PERUMAHAN/TEMPAT TINGGAL PENDUDUK**  
**MENURUT PKL RESPONDEN**

No.	Pilihan Jarak	Jumlah PKL Responden	%
1.	Dekat, yaitu kurang dari 100 m.	21 orang	61,8
2.	Sedang, antara 100 s/d 500 m.	13 orang	38,2
<b>Jumlah</b>		<b>34 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Berdasarkan tabel-tabel tersebut diatas, diketahui bahwa terdapat kecenderungan PKL memilih lokasi usaha yang dekat dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota, atau maksimal kurang dari 500m. Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Mc Gee dan Yeung (1997 : 69) bahwa lokasi penyebaran PKL menempati lokasi-lokasi strategis seperti di kawasan perdagangan, perkantoran, tempat rekreasi/hiburan, sekolah, ruang terbuka/taman, persimpangan jalan utama menuju perumahan/diujung jalan tempat keramaian.

#### **4.1.3.3. Kedekatan Dengan Tempat Tinggal PKL**

Yang dimaksud kedekatan dengan tempat tinggal PKL adalah jarak antara lokasi usaha PKL dengan tempat tinggal mereka. Pilihan jarak disini terbagi dalam 3 kategori, yaitu dekat (kurang dari 1 km), sedang (antara 1 km s/d 5 km), dan jauh (lebih dari 5 km). Berdasarkan

hasil kuesioner, ternyata seluruh PKL responden memilih jarak kurang dari 1 km, yaitu jarak dekat.

Hal ini ditunjukkan dengan dekatnya jarak tempat tinggal mereka dengan lokasi dimana mereka berdagang. PKL responden yang memanfaatkan ruas jalan di Jl. Sriwijaya dan Jl. Bung Karno rata-rata berdomisili di daerah sekitarnya, yaitu Karang Tapen, Pajang, Gebang, dan Punia. Demikian pula dengan PKL responden yang berdagang di Jl. Pemuda, sebagian besar dari mereka bertempat tinggal di daerah Gomong, Punia, dan Karang Medain. PKL responden yang berdagang di Jl. Veteran dan Perisaian, kebanyakan berasal dari daerah Karang Tatah, Karang Baru, dan Karang Anyar. Sedangkan PKL responden yang berdagang di Jl. Pejanggik, mereka mayoritas berasal dari Pajang, Karang Kemong, Karang Tapen, dan Kampung Jawa Cakra. Sementara PKL responden di Jl. A.A. Gde Ngurah rata-rata berasal dari daerah Cakra, tidak jauh berbeda dengan para PKL responden di Terminal Mandalika yang rata-rata berdomisili di Cakra dan Sweta.

#### **4.1.4. Kesimpulan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut PKL**

Berdasarkan prioritas aspek dalam faktor ekonomi pada Tabel IV.1, prioritas aspek dalam faktor sosial pada Tabel IV.6, dan prioritas aspek dalam faktor fisik pada Tabel IV.7 mengenai prioritas aspek dalam penentuan lokasi PKL di Kota Mataram menurut PKL, hasil prioritas secara keseluruhan pada masing-masing faktor ditabulasikan pada Tabel IV.13 berikut.

**TABEL IV.13**  
**PRIORITAS ASPEK PENENTUAN LOKASI PKL**  
**PILIHAN PKL RESPONDEN**

No.	Prioritas Aspek Masing-masing Faktor		
	Faktor Ekonomi	Faktor Sosial	Faktor Fisik
1.	Waktu jualan	Keamanan	Kedekatan dg keg. masy./keramaian kota
2.	Jenis dagangan	Kenyamanan	Kedekatan dg tempat tinggal
			Kemudahan sarana angkutan

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Berkaitan dengan aspek kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota, PKL lebih memprioritaskan jarak dekat dan sedang (kurang dari 500 m) antara lokasi usaha mereka dengan tempat-tempat yang menurut mereka strategis, yaitu tingkat intensitas kunjungan masyarakatnya tinggi. Pasar/pusat perbelanjaan merupakan lokasi prioritas pertama pilihan sebagian besar PKL responden, yang disusul dengan lokasi-lokasi disekitar perkantoran dan sekolah. Untuk kedua lokasi ini para PKL cenderung menginginkan jarak yang dekat, yaitu kurang dari 100 m.

Pilihan waktu berjualan prioritas adalah dari pagi-malam hari. Namun di beberapa lokasi ada juga yang lebih memprioritaskan pilihan dari pagi-sore dan sore-malam hari. Hal ini terkait erat dengan aktivitas formal di sekitar mereka.

Berdasarkan prioritas aspek pada faktor sosial, sebagian besar dari mereka memilih faktor keamanan dan kenyamanan. Menurut mereka tanpa adanya rasa aman, mereka tidak akan merasa nyaman dalam melakukan aktivitas dagang mereka. Perasaan tidak aman disini berhubungan dengan kekhawatiran para PKL terhadap aksi penggusuran yang kadang-kadang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kota Mataram.

## 4.2. Identifikasi Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Pemerintah Kota

### 4.2.1. Identifikasi Aspek Prioritas dalam Faktor Ekonomi

Identifikasi prioritas aspek-aspek yang termasuk dalam faktor ekonomi menurut pemerintah kota merupakan kajian untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi prioritas dalam faktor ekonomi berkaitan dengan penentuan lokasi bagi aktivitas usaha PKL. Adapun hasil prioritas aspek-aspek tersebut disajikan pada Tabel IV. 14 berikut ini.

**TABEL IV.14**  
**PRIORITAS ASPEK DALAM FAKTOR EKONOMI**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Prioritas Lokasi PKL	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Jenis dagangan	4	44,4
2.	Waktu jualan	5	55,6
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Dengan mendasarkan pada ketentuan Perda Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima, maka dinas/instansi responden memilih faktor waktu jualan dan jenis dagangan sebagai faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan lokasi usaha PKL, walaupun pada dasarnya menurut mereka biaya angkutan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi usaha bagi PKL.

#### 4.2.1.1. Jenis Dagangan PKL

Berdasarkan jenis dagangan PKL, prioritas lokasi usaha menurut Pemerintah Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel IV.15 sampai Tabel IV. 17 berikut.

**TABEL IV.15**  
**PRIORITAS PILIHAN LOKASI USAHA PKL MAKANAN**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Prioritas Lokasi PKL	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Pasar/pusat perbelanjaan	6	66,7
2.	Terminal	3	33,3
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.16**  
**PRIORITAS PILIHAN LOKASI USAHA PKL NON MAKANAN**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Prioritas Lokasi PKL	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Pasar/pusat perbelanjaan	6	66,7
2.	Terminal	3	33,3
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.17**  
**PRIORITAS PILIHAN LOKASI USAHA PKL JASA**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Prioritas Lokasi PKL	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Pasar/pusat perbelanjaan	5	55,6
2.	Terminal	3	33,3
3.	Perumahan/tempat tinggal penduduk	1	11,1
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Berdasarkan Tabel IV.15 dan Tabel IV.17 diatas, terlihat bahwa 6 instansi Pemerintah Kota Mataram memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan dan 3 instansi memilih terminal sebagai lokasi yang sesuai bagi PKL yang menjual makanan/minuman dan non makanan.

Sedangkan untuk jenis jasa, pilihan lokasi yang sesuai dengan prioritas Pemerintah Kota Mataram adalah pasar/pusat perbelanjaan, terminal, dan perumahan/tempat tinggal penduduk.

#### 4.2.1.2. Waktu Berjualan

Prioritas waktu berjualan PKL dalam studi ini terbagi menjadi 4 pilihan, yaitu dari pagi-siang (06.00-14.00), pagi-sore (06.00-18.00), pagi-malam (06.00-21.00), dan sore-malam (18.00-21.00). Berdasarkan hasil survai, prioritas pilihan waktu berjualan PKL sesuai dengan jenis dagangan mereka, dapat dilihat pada Tabel IV.18 sampai Tabel IV.20 berikut.

**TABEL IV.18**  
**PRIORITAS PILIHAN WAKTU BERJUALAN PKL MAKANAN**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Pilihan Waktu Berjualan	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Pagi-sore (06.00-18.00)	2	22,2
2.	Pagi-malam (06.00-21.00)	5	55,6
3.	Sore-malam (18.00-21.00 keatas)	2	22,2
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.19**  
**PRIORITAS PILIHAN WAKTU BERJUALAN PKL NON MAKANAN**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Pilihan Waktu Berjualan	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Pagi-siang (06.00-14.00)	2	22,2
2.	Pagi-sore (06.00-18.00)	3	33,3
3.	Sore-malam (18.00-21.00 keatas)	4	44,5
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesione, 2003.*

**TABEL IV.20**  
**PRIORITAS PILIHAN WAKTU BERJUALAN PKL JASA**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Pilihan Waktu Berjualan	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Pagi-sore (06.00-18.00)	8	88,9
2.	Pagi-malam (06.00-21.00)	1	11,1
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Berdasarkan Tabel IV.18 diketahui bahwa 5 instansi Pemerintah Kota Mataram memprioritaskan pilihan waktu berjualan dari pagi sampai malam hari bagi PKL yang

berdagang makanan/minuman. Sedangkan 4 instansi lainnya lebih cenderung pada pilihan waktu dari pagi-sore dan sore-malam hari.

Untuk PKL dengan jenis dagangan non makanan, 4 instansi Pemerintah Kota Mataram lebih memprioritaskan pilihan waktu berjualan dari sore-malam hari, 3 instansi memilih waktu pagi-sore hari, dan 2 instansi lainnya memilih waktu dari pagi-siang hari.

Sedangkan berdasarkan Tabel IV.20, diketahui bahwa prioritas pilihan waktu berjualan untuk PKL jasa menurut 8 instansi Pemerintah Kota adalah dari pagi- sore hari, dan 1 instansi saja yang memilih waktu dari pagi-malam hari.

#### 4.2.2. Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Sosial

Identifikasi prioritas aspek dalam faktor sosial yang berkaitan dengan lokasi usaha PKL di Kota Mataram terdiri dari faktor keamanan, kenyamanan, ketertiban, kebersihan, serta keindahan. Adapun hasil kuesioner prioritas aspek tersebut, dapat dilihat pada Tabel IV.21 berikut.

**TABEL IV.21**  
**PRIORITAS ASPEK DALAM FAKTOR SOSIAL**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Prioritas Faktor Sosial	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Faktor keamanan	2	22,2
2.	Faktor kenyamanan	2	22,2
3.	Faktor ketertiban	3	33,4
4.	Faktor kebersihan	2	22,2
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Pada dasarnya semua instansi responden berpendapat bahwa keseluruhan faktor tersebut sama pentingnya untuk dipertimbangkan dalam penentuan lokasi PKL. Prioritas aspek lebih

cenderung ke faktor ketertiban, karena kelima instansi berpendapat bahwa tanpa adanya ketertiban dalam kaitannya dengan penentuan lokasi PKL, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terutama kemacetan dan kesemrawutan. Dan apabila hal ini dibiarkan berlanjut, akan berakibat pada berkurangnya rasa aman dan nyaman yang diinginkan oleh seluruh warga masyarakat.

#### 4.2.3. Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Fisik

Identifikasi prioritas aspek dalam faktor fisik merupakan kajian untuk mengetahui aspek-aspek dalam faktor fisik yang diprioritaskan dalam penentuan lokasi usaha PKL oleh Pemerintah Kota Mataram. Adapun pilihan-pilihan aspek tersebut antara lain kemudahan dalam memperoleh sarana transportasi, kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota, serta kedekatan dengan tempat tinggal PKL. Hasil prioritas aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel IV. 22 berikut.

**TABEL IV.22**  
**PRIORITAS ASPEK DALAM FAKTOR FISIK**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Prioritas Faktor Fisik	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota	9	100
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Walaupun pada dasarnya seluruh dinas/instansi responden menyatakan bahwa seluruh pilihan faktor fisik tersebut perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi PKL, namun menurut mereka prioritas utama yang menjadi pilihan adalah kedekatan dengan kegiatan

masyarakat/keramaian kota, karena PKL selalu menempati lokasi-lokasi yang cenderung berada di sekitar pusat aktivitas masyarakat.

#### 4.2.3.1. Kemudahan Dalam Memperoleh Sarana Transportasi

Seluruh instansi responden (9 instansi) sepakat bahwa kemudahan dalam memperoleh sarana transportasi perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi PKL. Pemerintah berpendapat bahwa kemudahan dalam memperoleh sarana transportasi dapat menunjang kelancaran aktivitas baik pedagang maupun pembeli.

#### 4.2.3.2. Kedekatan Dengan Kegiatan Masyarakat/Keramaian Kota

Hasil kuesioner dari 9 instansi responden Pemerintah Kota Mataram mengenai prioritas kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota, dapat dilihat pada Tabel IV.23 sampai Tabel IV.26 berikut.

**TABEL IV.23**  
**PRIORITAS JARAK ANTARA LOKASI USAHA PKL**  
**DENGAN PASAR/PUSAT PERBELANJAAN**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Pilihan Jarak	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Dekat, kurang dari 100 m	3	33,3
2.	Sedang, antara 100 m s/d 500 m	5	55,6
3.	Jauh, lebih dari 500 m	1	11,1
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.24**  
**PRIORITAS JARAK ANTARA LOKASI USAHA PKL**  
**DENGAN PERKANTORAN, SEKOLAH**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Pilihan Jarak	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Sedang, antara 100 m s/d 500 m	5	55,6
2.	Jauh, lebih dari 500 m	4	44,4
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.25**  
**PRIORITAS JARAK ANTARA LOKASI USAHA PKL**  
**DENGAN TERMINAL**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Pilihan Jarak	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Dekat, kurang dari 100 m	4	44,4
2.	Sedang, antara 100 m s/d 500 m	4	44,4
3.	Jauh, lebih dari 500 m	1	11,1
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.26**  
**PRIORITAS JARAK ANTARA LOKASI USAHA PKL**  
**DENGAN PERUMAHAN/TEMPAT TINGGAL PENDUDUK**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Pilihan Jarak	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Sedang, antara 100 m s/d 500 m	7	77,8
2.	Jauh, lebih dari 500 m	2	22,2
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Dengan melihat tabel-tabel diatas, diketahui ternyata sebagian besar responden cenderung memilih jarak yang sedang, yaitu antara 100 m hingga 500 m dari kegiatan masyarakat/keramaian kota bagi penempatan lokasi PKL. Jarak dekat (kurang dari 100 m) hanya disetujui di sekitar pasar/pusat perbelanjaan dan terminal. Sedangkan jarak yang jauh (lebih dari 500 m) berlaku untuk seluruh kategori lokasi, hanya saja prosentasenya lebih kecil dari prosentase jarak yang dekat.

Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa Pemerintah Kota Mataram mengkhawatirkan terjadinya ketidakteraturan dan kesemrawutan di lokasi-lokasi pilihan tersebut apabila PKL berdagang pada jarak yang dekat. Seperti yang disampaikan oleh Soto (1991 : 23) bahwa keberadaan PKL sering dianggap sebagai pencetus ketidakteraturan, ketidaktertiban, dan

ketidakiindahan kota. PKL dan juga pelaku sektor informal pada umumnya sering dianggap melanggar aturan oleh pemerintah kota, karena sifatnya yang ilegal.

#### 4.2.3.3 Kedekatan Dengan Tempat Tinggal PKL

Hasil kuesioner Pemerintah Kota Mataram yang berkaitan dengan prioritas pilihan kedekatan (jarak) antara lokasi usaha PKL dengan tempat tinggal PKL dapat dilihat pada Tabel IV.27.

**TABEL IV.27**  
**PRIORITAS JARAK ANTARA LOKASI USAHA PKL**  
**DENGAN TEMPAT TINGGAL PKL**  
**MENURUT PEMERINTAH KOTA MATARAM**

No.	Pilihan Jarak	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Sedang, antara 1 km s/d 5 km	7*	77,8
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>77,8</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Keterangan :

\* Dari 9 instansi responden, yang menyetujui perlunya kategori kedekatan tempat tinggal PKL dipertimbangkan dalam penentuan lokasi usaha PKL hanya 7 instansi, dan ketujuh instansi tersebut semuanya memilih jarak yang sedang, yaitu antara 1 km hingga 5 km.

#### 4.2.4. Kesimpulan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Pemerintah Kota Mataram

Berdasarkan prioritas aspek dalam faktor ekonomi pada Tabel IV.14, prioritas aspek dalam faktor sosial pada Tabel IV.21, dan prioritas aspek dalam faktor fisik pada Tabel IV.22 mengenai prioritas aspek dalam penentuan lokasi PKL di Kota Mataram menurut pemerintah kota, hasil prioritas secara keseluruhan pada masing-masing faktor ditabulasikan pada Tabel IV.28 berikut.

**TABEL IV.28**  
**PRIORITAS ASPEK PENENTUAN LOKASI PKL**  
**PILIHAN PEMERINTAH KOTA**

No.	Prioritas Aspek Masing-masing Faktor		
	Faktor Ekonomi	Faktor Sosial	Faktor Fisik
1.	Waktu jualan	Ketertiban	Kedekatan dg keg. masy./keramaian kota
2.	Jenis dagangan	Kenyamanan, kebersihan, keamanan	

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Berdasarkan prioritas aspek dalam faktor fisik, pemerintah Kota Mataram memprioritaskan lokasi pasar/pusat perbelanjaan dan terminal sebagai tempat aktivitas bagi para PKL. Adapun jarak yang ditolerir adalah jarak yang sedang/jauh (antara 100 m s/d 500 m dan lebih dari 500 m). Hanya untuk lokasi terminal dan pasar/pusat perbelanjaan, yang masih dapat ditolerir dengan jarak dekat (kurang dari 100 m).

Untuk pilihan waktu berjualan, bagi PKL makanan/minuman pemerintah lebih memprioritaskan pagi-malam hari, walaupun di beberapa lokasi ada yang diprioritaskan untuk berdagang dari sore-malam hari. Sedangkan untuk PKL non makanan, pemerintah lebih memprioritaskan waktu sore-malam hari, dan untuk PKL jasa pilihan waktu prioritasnya adalah pagi-sore hari.

Berkaitan dengan prioritas pada faktor sosial, dinas/instansi responden sebagian besar memilih faktor ketertiban sebagai prioritas utama, disamping faktor keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. Menurut pemerintah tanpa adanya faktor ketertiban dalam penentuan lokasi PKL, dapat menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan dan kesemrawutan. Demikian pula halnya dengan faktor kebersihan, yang selama ini kurang diperhatikan oleh PKL. Apabila hal ini berlanjut akan berakibat pada berkurangnya rasa aman dan nyaman yang diinginkan oleh seluruh warga kota.

### 4.3. Identifikasi Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Masyarakat

#### 4.3.1. Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Ekonomi

Identifikasi prioritas aspek-aspek dalam faktor ekonomi menurut masyarakat merupakan kajian untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi prioritas dalam faktor ekonomi berdasarkan pilihan masyarakat dalam kaitannya dengan penentuan lokasi bagi aktivitas usaha PKL. Adapun pilihan aspek-aspek yang dimaksud meliputi jenis dagangan PKL, waktu berjualan, dan biaya angkutan, yang dapat disajikan pada Tabel IV. 29 di bawah ini.

**TABEL IV.29**  
**PRIORITAS ASPEK DALAM FAKTOR EKONOMI**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Pilihan Faktor Ekonomi	Jumlah Masyarakat Responden	%
1.	Jenis dagangan	43 orang	43
2.	Biaya angkutan	12 orang	12
3.	Waktu jualan	45 orang	45
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa seluruh responden masyarakat menyatakan setuju bahwa ketiga pilihan faktor yang termasuk dalam kategori ekonomi tersebut menjadi pertimbangan mereka dalam memilih lokasi PKL yang mereka inginkan. Hal ini berarti bahwa ketiga aspek dalam faktor ekonomi tersebut diprioritaskan oleh masing-masing masyarakat responden.

##### 4.3.1.1. Jenis Dagangan PKL

Jenis dagangan PKL yang diminati oleh masyarakat responden dapat dilihat pada Tabel IV.30 di bawah ini.

**TABEL IV.30**  
**PRIORITAS PILIHAN JENIS DAGANGAN PKL**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Pilihan Jenis Dagangan PKL	Jumlah Masyarakat Responden	%
1.	Makanan/minuman	52 orang	52
2.	Non makanan	27 orang	27
3.	Jasa	21 orang	21
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Berdasarkan hasil kuesioner yang ditabulasikan pada Tabel IV.30 di atas, diketahui bahwa jenis makanan/minuman merupakan prioritas jenis dagangan PKL yang diminati oleh masyarakat responden. Jenis non makanan menempati pilihan berikutnya, disusul kemudian dengan jenis jasa PKL. Adapun prioritas pilihan masyarakat responden mengenai penentuan lokasi usaha PKL dalam hubungannya dengan jenis dagangan yang ditawarkan, dapat disimak pada Tabel IV.31 hingga Tabel IV.33 di bawah ini.

**TABEL IV.31**  
**PRIORITAS PILIHAN LOKASI USAHA PKL MAKANAN/MINUMAN**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Prioritas Lokasi PKL	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Pasar/pusat perbelanjaan	22 orang	22
2.	Perkantoran, sekolah	35 orang	35
3.	Terminal	26 orang	26
4.	Perumahan/tempat tinggal penduduk	17 orang	17
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.32**  
**PRIORITAS PILIHAN LOKASI USAHA PKL NON MAKANAN**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Prioritas Lokasi PKL	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Pasar/pusat perbelanjaan	41 orang	41
2.	Perkantoran, sekolah	17 orang	17
3.	Terminal	32 orang	32
4.	Perumahan/tempat tinggal penduduk	10 orang	10
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.33**  
**PRIORITAS PILIHAN LOKASI USAHA PKL JASA**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Prioritas Lokasi PKL	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Pasar/pusat perbelanjaan	40 orang	40
2.	Perkantoran, sekolah	16 orang	16
3.	Terminal	35 orang	35
4.	Perumahan/tempat tinggal penduduk	9 orang	9
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Berdasarkan tabel-tabel di atas, diketahui bahwa pada umumnya masyarakat responden memilih pasar/pusat perbelanjaan dan terminal sebagai prioritas pilihan lokasi bagi jenis dagangan non makanan dan jasa, sedangkan khusus untuk jenis dagangan makanan/minuman, masyarakat responden lebih memprioritaskan perkantoran dan sekolah. Namun prioritas lokasi ketiga dan keempat pilihan masyarakat pada ketiga jenis dagangan adalah sama yaitu lokasi perkantoran, sekolah dan perumahan/tempat tinggal penduduk.

#### 4.3.1.2. Waktu Berjualan

Pilihan waktu berjualan PKL menurut masyarakat responden tercantum dalam Tabel IV.34 sampai Tabel IV.36 berikut.

**TABEL IV.34**  
**PRIORITAS PILIHAN WAKTU BERJUALAN PKL MAKANAN/MINUMAN**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Pilihan Waktu Berjualan PKL	Jumlah Masyarakat Responden	%
2.	Pagi-sore (06.00-18.00)	30 orang	30
3.	Pagi-malam (06.00-21.00)	46 orang	46
4.	Sore-malam (18.00-21.00 keatas)	24 orang	24
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.35**  
**PRIORITAS PILIHAN WAKTU BERJUALAN PKL NON MAKANAN**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Pilihan Waktu Berjualan PKL	Jumlah Masyarakat Responden	%
1.	Pagi-sore (06.00-18.00)	45 orang	45
2.	Pagi-malam (06.00-21.00)	18 orang	18
3.	Sore-malam (18.00-21.00 keatas)	37 orang	37
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.36**  
**PRIORITAS PILIHAN WAKTU BERJUALAN PKL JASA**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Pilihan Waktu Berjualan PKL	Jumlah Masyarakat Responden	%
1.	Pagi-sore (06.00-18.00)	51 orang	51
2.	Pagi-malam (06.00-21.00)	49 orang	49
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Dengan melihat tabel-tabel di atas, diketahui bahwa pilihan waktu berjualan dari pagi-sore merupakan mayoritas pilihan masyarakat responden untuk jenis dagangan non makanan dan jasa, sedangkan untuk jenis dagangan makanan/minuman masyarakat responden lebih memilih pagi-malam hari. Sebaliknya pada jenis dagangan non makanan dan jasa, pilihan waktu dari sore-malam dan pagi-malam menempati posisi selanjutnya. Dan untuk jenis dagangan makanan/minuman, pilihan waktu berikutnya adalah pagi-sore dan sore-malam yang dipilih oleh masyarakat responden.

#### **4.3.1.3. Biaya Angkutan**

Seluruh masyarakat responden 100 orang (100 %) menyetujui bahwa besarnya biaya angkutan perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi PKL. Menurut mereka keberadaan PKL di tempat-tempat yang tidak hanya di pasar/pusat perbelanjaan, namun juga berdekatan

dengan lokasi-lokasi aktivitas masyarakat sangat menguntungkan terutama dalam pemenuhan kebutuhan primer mereka, yaitu makanan/minuman yang murah dan mudah didapat.

#### 4.3.2. Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Sosial

Hasil identifikasi aspek-aspek yang menjadi prioritas dalam faktor sosial menurut masyarakat responden dapat dilihat pada Tabel IV.37 di bawah ini.

**TABEL IV.37**  
**PRIORITAS ASPEK DALAM FAKTOR SOSIAL**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Pilihan Faktor Sosial	Jumlah Masyarakat Responden	%
1.	Faktor keamanan	40 orang	40
2.	Faktor kenyamanan	37 orang	37
3.	Faktor kebersihan	23 orang	23
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

Hasil kuesioner pada tabel di atas menunjukkan bahwa faktor keamanan, kenyamanan, dan kebersihan merupakan prioritas masyarakat dalam menentukan lokasi PKL. Menurut mereka, keamanan berkaitan dengan keleluasaan mereka bergerak dan terlindung dari lalu lintas kendaraan. Sedangkan kenyamanan dan kebersihan disini berkaitan dengan ketiadaan hambatan dan gangguan yang disebabkan ruang yang sempit dan bau sampah.

#### 4.3.3. Identifikasi Prioritas Aspek dalam Faktor Fisik

Pilihan aspek-aspek dalam faktor fisik menurut masyarakat responden adalah kemudahan sarana angkutan dan kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota. Adapun hasil urutan prioritas tersebut, dapat dilihat pada Tabel IV.38 dan kajian-kajian berikut.

**TABEL IV.38**  
**PRIORITAS ASPEK DALAM FAKTOR FISIK**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Pilihan Faktor Sosial	Jumlah Masyarakat Responden	%
1.	Kemudahan sarana angkutan	34 orang	34
2.	Kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota	66 orang	66
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel IV.38 di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden masyarakat memilih lokasi PKL yang mempunyai kedekatan dengan kegiatan mereka/keramaian kota, disamping kemudahan dalam memperoleh sarana angkutan kota. Menurut responden masyarakat, mereka cenderung memilih lokasi-lokasi PKL yang murah dan mudah dalam pencapaian.

#### **4.3.3.1. Kemudahan Sarana Angkutan**

Seluruh masyarakat responden menyetujui bahwa kemudahan sarana angkutan perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi PKL, sehingga memberikan kemudahan baik bagi pedagang maupun mereka sebagai konsumen.

#### **4.3.3.2. Kedekatan Dengan Kegiatan Masyarakat/Keramaian Kota**

Hasil prioritas pilihan masyarakat responden terhadap penentuan kedekatan lokasi PKL dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota yang ditunjukkan dengan ukuran jarak yang dekat (kurang dari 100 m), sedang (antara 100 m sampai dengan 500 m), dan jauh (lebih dari 500 m) adalah sebagai berikut.

**TABEL IV.39**  
**PRIORITAS JARAK ANTARA LOKASI USAHA PKL**  
**DENGAN PASAR/PUSAT PERBELANJAAN**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Pilihan Jarak	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Dekat, kurang dari 100 m	58 orang	58
2.	Sedang, antara 100 m s/d 500 m	42 orang	42
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.40**  
**PRIORITAS JARAK ANTARA LOKASI USAHA PKL**  
**DENGAN PERKANTORAN, SEKOLAH**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Pilihan Jarak	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Dekat, kurang dari 100 m	40 orang	40
2.	Sedang, antara 100 m s/d 500 m	36 orang	36
3.	Jauh, lebih dari 500 m	24 orang	24
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.41**  
**PRIORITAS JARAK ANTARA LOKASI USAHA PKL**  
**DENGAN TERMINAL**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Pilihan Jarak	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Dekat, kurang dari 100 m	45 orang	45
2.	Sedang, antara 100 m s/d 500 m	24 orang	24
3.	Jauh, lebih dari 500 m	31 orang	31
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

**TABEL IV.42**  
**PRIORITAS JARAK ANTARA LOKASI USAHA PKL**  
**DENGAN PERUMAHAN/TEMPAT TINGGAL PENDUDUK**  
**MENURUT MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Pilihan Jarak	Jumlah Instansi Responden	%
1.	Dekat, kurang dari 100 m	21 orang	21
2.	Sedang, antara 100 m s/d 500 m	47 orang	47
3.	Jauh, lebih dari 500 m	32 orang	32
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Berdasarkan tabel-tabel diatas, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat responden memilih lokasi pasar/pusat perbelanjaan, perkantoran, sekolah, dan terminal dengan jarak dekat dari lokasi PKL dan masih mentolerirnya untuk jarak sedang. Sedangkan khusus untuk perumahan/tempat tinggal penduduk, masyarakat lebih memilih jarak yang sedang, dan jarak yang jauh yaitu lebih dari 500 m menempati prioritas kedua pilihan mereka.

#### 4.3.4. Kesimpulan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Masyarakat

Berdasarkan prioritas aspek dalam faktor ekonomi pada Tabel IV.29, prioritas aspek dalam faktor sosial pada Tabel IV.37, dan prioritas aspek dalam faktor fisik pada Tabel IV.38 mengenai prioritas aspek dalam penentuan lokasi PKL di Kota Mataram menurut masyarakat responden, hasil prioritas secara keseluruhan pada masing-masing faktor ditabulasikan pada Tabel IV.43 berikut.

**TABEL IV.43**  
**PRIORITAS ASPEK PENENTUAN LOKASI PKL**  
**PILIHAN MASYARAKAT RESPONDEN**

No.	Prioritas Aspek Masing-masing Faktor		
	Faktor Ekonomi	Faktor Sosial	Faktor Fisik
1.	Waktu jualan	Keamanan	Kedekatan dg keg. masy./keramaian kota
2.	Jenis dagangan	Kenyamanan	Kemudahan sarana transportasi
3.		Kebersihan	

*Sumber : Hasil Kuesioner, 2003.*

Berkaitan dengan aspek kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota, masyarakat lebih memprioritaskan perkantoran, sekolah untuk PKL makanan/minuman. Sedangkan untuk PKL non makanan dan jasa, masyarakat cenderung memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan sebagai lokasi aktivitas mereka.

**UPT-PUSTAKA UNIDIP**

Untuk PKL makanan/minuman, pilihan waktu prioritas menurut masyarakat adalah pagi-malam hari. Sedangkan bagi PKL non makanan adalah pagi-sore hari, dan PKL jasa pagi-sore hari.

Menurut masyarakat urutan prioritas yang berkaitan dengan faktor sosial adalah faktor keamanan, kebersihan, dan kenyamanan.

#### **4.4. Analisis Urutan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Ahli**

Analisis urutan prioritas aspek penentuan lokasi PKL menurut responden ahli ini merupakan analisis berdasarkan hasil 3 (tiga) putaran metoda Delphi. Adapun faktor-faktor yang dianalisis adalah faktor ekonomi, sosial, dan fisik. Faktor ekonomi terdiri dari beberapa aspek pilihan, antara lain jenis dagangan PKL, biaya angkutan, dan waktu berjualan. Sedangkan faktor sosial meliputi faktor keamanan, kenyamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Faktor fisik dalam analisis ini adalah kemudahan aksesibilitas, kedekatan lokasi PKL dengan pusat kegiatan masyarakat/keramaian kota, dan kedekatan lokasi PKL dengan tempat tinggal PKL.

##### **4.4.1. Analisis Urutan Prioritas Aspek dalam Faktor Ekonomi**

###### **4.4.1.1. Jenis Dagangan**

Jenis dagangan PKL disini terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu jenis makanan/minuman, non makanan, dan jasa. Berdasarkan hasil *SPSS*, diketahui bahwa prioritas lokasi bagi ketiga jenis dagangan PKL pada ke-3 putaran tampak pada Tabel IV.44 – Tabel IV.46 berikut.

**TABEL IV.44**  
**URUTAN PRIORITAS LOKASI PKL MAKANAN/MINUMAN**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Lokasi PKL Makanan/minuman		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Pasar	Pasar	Pasar
2.	Terminal	Terminal	Terminal
3.	Perkantoran/sekolah	Lokasi khusus PKL	Lokasi khusus PKL
4.	Perumahan	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah
5.		Perumahan	Perumahan
	Uji konsistensi : 0,628	Uji konsistensi : 0,666	Uji konsistensi : 0,759

Sumber : Hasil Analisis, 2003.

**TABEL IV.45**  
**URUTAN PRIORITAS LOKASI PKL NON MAKANAN/MINUMAN**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Lokasi PKL Non Makanan/minuman		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Pasar	Pasar	Pasar
2.	Lokasi khusus PKL	Terminal	Lokasi khusus PKL
3.	Terminal	Lokasi khusus PKL	Terminal
4.	Perkantoran/sekolah	Perumahan	Perumahan
5.	Perumahan	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah
	Uji konsistensi : 0,750	Uji konsistensi : 0,722	Uji konsistensi : 0,674

Sumber : Hasil Analisis, 2003.

**TABEL IV.46**  
**URUTAN PRIORITAS LOKASI PKL JASA**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Lokasi PKL Jasa		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Pasar	Pasar	Pasar
2.	Lokasi khusus PKL	Lokasi khusus PKL	Terminal
3.	Terminal	Terminal	Lokasi khusus PKL
4.	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah
5.	Perumahan	Perumahan	Perumahan
	Uji konsistensi : 0,786	Uji konsistensi : 0,956	Uji konsistensi : 0,440

Sumber : Hasil Analisis, 2003.

Urutan prioritas lokasi untuk jenis dagangan makanan/minuman pada putaran 1 adalah pasar/pusat perbelanjaan, terminal, perkantoran/sekolah, dan perumahan dengan tingkat konsistensi sebesar 0,628. Sedangkan pada putaran 2 urutan prioritas sama dengan putaran 3, yaitu pasar/pusat perbelanjaan, terminal, tempat wisata, perkantoran/sekolah, perumahan. Pada

kedua putaran ini juga ada penambahan lokasi baru, yakni tempat wisata. Hal yang berbeda dari kedua putaran ini adalah tingkat konsistensi. Pada putaran ke 2 tingkat konsistensi adalah 0,666 sedangkan pada putaran ke 3 sebesar 0,759. Berdasarkan hasil uji konsistensi Kendall tersebut diketahui bahwa yang paling mendekati 1 adalah hasil konsistensi pada putaran ke 3, yaitu 0,759. Dengan demikian, berarti urutan prioritas tertinggi bagi lokasi jenis dagangan makanan/minuman adalah pasar/pusat perbelanjaan, yang disusul dengan terminal, tempat wisata, perkantoran/sekolah, dan perumahan.

Untuk jenis dagangan non makanan, hasil urutan prioritas pada putaran 1 adalah pasar/pusat perbelanjaan, lokasi khusus PKL (lokasi tambahan dari responden), terminal, perkantoran/sekolah, dan perumahan, dengan tingkat konsistensi sebesar 0,750. Putaran ke 2 menunjukkan bahwa pasar/pusat perbelanjaan sebagai lokasi dengan urutan prioritas tertinggi, kemudian disusul dengan terminal, lokasi khusus PKL, perumahan, dan perkantoran/sekolah. Adapun tingkat konsistensi pada putaran ini adalah 0,722. Pada putaran ke 3, pasar/pusat perbelanjaan tetap menduduki urutan prioritas tertinggi sebagai pilihan para responden ahli. Berikutnya adalah lokasi khusus PKL, terminal, perumahan, dan perkantoran/sekolah, dengan tingkat konsistensi pada tes statistik Kendall sebesar 0,674. Berdasarkan besarnya tingkat konsistensi pada masing-masing putaran, diketahui bahwa hasil konsistensi pada putaran 1 ternyata paling tinggi, yaitu 0,750. Dengan demikian urutan yang disepakati adalah urutan prioritas lokasi pada putaran 1.

Urutan prioritas lokasi bagi jenis jasa berdasarkan hasil tes statistik adalah sebagai berikut. Hasil pada putaran 1 dan 2 menunjukkan hasil urutan prioritas yang sama, yaitu pasar/pusat perbelanjaan, lokasi khusus PKL, terminal, perkantoran/sekolah, dan perumahan. Perbedaannya pada tingkat konsistensi, pada putaran ke 2 tingkat konsistensinya lebih tinggi,

yaitu 0,956. Sedangkan tingkat konsistensi pada putaran 1 adalah 0,786. Pada putaran ke 3, ternyata pasar/pusat perbelanjaan tetap menduduki urutan prioritas tertinggi sebagai pilihan lokasi PKL jenis jasa, yang disusul dengan terminal, lokasi khusus PKL, perkantoran/sekolah, dan perumahan. Adapun tingkat konsistensi pada putaran ini adalah 0,440. Dengan mengetahui perbandingan besarnya tingkat konsistensi pada ketiga putaran, berarti urutan lokasi yang disepakati untuk jenis jasa adalah hasil urutan prioritas pada putaran ke 2. Namun pada dasarnya, pasar/pusat perbelanjaan merupakan lokasi pilihan dengan urutan prioritas tertinggi pada ketiga putaran.

#### 4.4.1.1. Biaya Angkutan

Berdasarkan uji statistik, diketahui bahwa nilai median pada putaran 1, 2, dan 3 adalah sama, yaitu 4 (angka prioritas tinggi). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa biaya angkutan juga disepakati oleh para responden ahli dalam menentukan lokasi PKL.

#### 4.4.1.2. Waktu Berjualan

Hasil uji statistik urutan waktu berjualan untuk jenis PKL makanan/minuman dapat diuraikan pada Tabel IV.47-Tabel IV.49 sebagai berikut.

**TABEL IV.47**  
**URUTAN PRIORITAS WAKTU JUALAN PKL MAKANAN/MINUMAN**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Waktu Jualan PKL Makanan/minuman		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Pagi-sore	Pagi-malam	Pagi-malam
2.	Pagi-malam	Pagi-sore	Pagi-sore
3.	Sore-malam	Sore-malam	Sore-malam
4.	Pagi-siang	Pagi-siang	Pagi-siang
	Uji konsistensi : 0,911	Uji konsistensi : 0,911	Uji konsistensi : 1

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

**TABEL IV.48**  
**URUTAN PRIORITAS WAKTU JUALAN PKL NON MAKANAN/MINUMAN**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Waktu Jualan PKL Non Makanan/minuman		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Pagi-sore	Pagi-sore	Pagi-sore
2.	Pagi-malam	Pagi-malam	Pagi-malam
3.	Sore-malam	Sore-malam	Sore-malam
4.	Pagi-siang	Pagi-siang	Pagi-siang
	Uji konsistensi : 0,264	Uji konsistensi : 0,911	Uji konsistensi : 1

Sumber : Hasil Analisis, 2003.

**TABEL IV.49**  
**URUTAN PRIORITAS WAKTU JUALAN PKL JASA**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Waktu Jualan PKL Jasa		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Pagi-sore	Pagi-sore	Pagi-sore
2.	Pagi-malam	Pagi-malam	Pagi-malam
3.	Pagi-siang	Pagi-siang	Pagi-siang
	Uji konsistensi : 0,750	Uji konsistensi : 0,760	Uji konsistensi : 0,813

Sumber : Hasil Analisis, 2003.

Pada putaran 1, urutan prioritas pilihan waktu berjualan adalah pagi-sore, pagi-malam, sore-malam, dan pagi-siang dengan tingkat konsistensi 0,911. Sedangkan hasil urutan prioritas pada putaran ke 2 dan 3 adalah sama, yaitu pagi-malam, pagi-sore, sore-malam, dan pagi-siang. Namun tingkat konsistensi pada putaran ke 3 lebih tinggi daripada putaran ke 2. Putaran ke 3 tingkat konsistensi adalah 1 (sangat tinggi), sedangkan pada putaran 2 tingkat konsistensinya sama dengan putaran 1, yaitu 0,911. Dengan demikian berarti urutan prioritas waktu berjualan untuk PKL makanan/minuman sesuai dengan hasil kesepakatan pada putaran ke 3, dimana pilihan waktu dari pagi-malam merupakan pilihan dengan prioritas tertinggi.

Untuk jenis non makanan, hasil urutan prioritas waktu berjualan yang disepakati untuk ketiga putaran adalah sama, yaitu pagi-sore, pagi-malam, sore-malam, dan pagi-siang. Tingkat konsistensi pada putaran 1 adalah 0,264, putaran ke 2 sebesar 0,911, sedangkan pada putaran

ke 3 adalah 1 (sangat tinggi). Dengan demikian pilihan waktu dari pagi-sore merupakan prioritas pilihan waktu yang disepakati untuk jenis non makanan.

Tidak jauh berbeda dengan hasil pada jenis non makanan, maka urutan pilihan waktu prioritas untuk jenis jasa pada ke 3 putaran juga sama, yaitu pagi-sore, pagi-malam, dan pagi-siang. Adapun tingkat konsistensi tertinggi berada pada putaran ke 3, yaitu 0,813. Sedangkan pada putaran 1 dan 2, masing-masing adalah 0,750 dan 0,760. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa pilihan waktu pagi-sore merupakan urutan prioritas tertinggi untuk waktu penjualan PKL jasa.

Sedangkan hasil analisis urutan prioritas aspek dalam faktor ekonomi dapat dilihat pada Tabel IV.50 berikut.

**TABEL IV.50**  
**URUTAN PRIORITAS ASPEK DALAM FAKTOR EKONOMI**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Aspek Dalam Faktor Ekonomi		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Waktu jualan	Waktu jualan	Waktu jualan
2.	Jenis dagangan	Jenis dagangan	Jenis dagangan
3.	Biaya angkutan	Biaya angkutan	Biaya angkutan
	Uji konsistensi : 0,771	Uji konsistensi : 0,875	Uji konsistensi : 0,823

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa para responden ahli sepakat untuk menetapkan waktu penjualan sebagai aspek yang paling diprioritaskan dalam faktor ekonomi. Hal ini sesuai dengan urutan prioritas berdasarkan uji konsistensi Kendall pada ke-3 putaran yang dilakukan seperti yang tampak pada tabel di atas.

#### 4.4.2. Analisis Urutan Prioritas Aspek dalam Faktor Sosial

Ada 5 kategori pilihan pada faktor sosial dalam studi ini, yaitu kemanan, kenyamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan. Hasil uji statistik yang dilakukan, dapat dilihat pada Tabel IV.51 berikut.

**TABEL IV.51**  
**URUTAN PRIORITAS ASPEK DALAM FAKTOR SOSIAL**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Aspek Dalam Faktor Sosial		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Ketertiban	Ketertiban	Ketertiban
2.	Kebersihan	Kebersihan	Kenyamanan
3.	Kenyamanan	Kenyamanan	Kebersihan
4.	Keamanan	Keamanan	Keamanan
5.	Keindahan	Keindahan	Keindahan
	Uji konsistensi : 0,437	Uji konsistensi : 0,542	Uji konsistensi : 0,454

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

Berdasarkan hasil pada tabel-tabel diatas, diketahui bahwa hasil urutan prioritas faktor sosial pada putaran ke 1 dan ke 2 adalah sama, yaitu ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan keindahan. Namun tingkat konsistensi pada putaran ke 2 lebih tinggi, yaitu 0,542 jika dibandingkan dengan tingkat konsistensi pada putaran ke 1, sebesar 0,437. Pada putaran ke 3 urutan prioritas faktor sosial adalah ketertiban, kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan keindahan, dengan tingkat konsistensi sebesar 0,454. Karena tingkat konsistensi pada putaran ke 2 merupakan tingkat konsistensi tertinggi, maka hasil urutan prioritas faktor sosial pada putaran ke 2 adalah hasil urutan prioritas yang disepakati oleh para responden ahli.

#### 4.4.3. Analisis Urutan Prioritas Aspek dalam Faktor Fisik

##### 4.4.3.1. Kemudahan Aksesibilitas

Kemudahan aksesibilitas disini berhubungan dengan kemudahan dalam memperoleh sarana transportasi. Berdasarkan nilai median pada ketiga putaran, diketahui bahwa nilainya sama, yaitu 5. Dengan demikian berarti para responden ahli menyepakati bahwa pilihan kemudahan aksesibilitas juga penting dipertimbangkan dalam menentukan lokasi PKL.

##### 4.4.3.2. Kedekatan Dengan Pusat Kegiatan Masyarakat/Keramaian Kota

Kedekatan antara lokasi usaha PKL dengan pusat kegiatan masyarakat/keramaian kota, dalam hal ini adalah pasar/pusat perbelanjaan, perkantoran/sekolah, terminal, dan perumahan penduduk, dinyatakan dengan ukuran jarak. Adapun kategori jarak dalam studi ini terbagi menjadi 3, yaitu jarak dekat (kurang dari 100 m), sedang (antara 100 m s/d 500 m), dan jauh (lebih dari 500 m).

Berdasarkan hasil uji statistik untuk putaran dengan jarak dekat, hasil urutan prioritas pada ketiga putaran tampak pada Tabel IV.52 berikut.

**TABEL IV.52**  
**URUTAN PRIORITAS LOKASI PKL DALAM JARAK DEKAT**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Lokasi PKL Dalam Jarak Dekat		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Pasar	Pasar	Pasar
2.	Terminal	Terminal	Terminal
3.	Perumahan	Perumahan	Perumahan
4.	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah
	Uji konsistensi : 0,660	Uji konsistensi : 0,925	Uji konsistensi : 0,881

Sumber : Hasil Analisis, 2003.

Berdasarkan hasil pada tabel-tabel diatas, tampak bahwa urutan prioritas pilihan lokasi PKL pada ke-3 putaran menurut responden ahli adalah sama, yaitu pasar/pusat perbelanjaan, terminal, perumahan, dan perkantoran/sekolah. Yang berbeda adalah besarnya tingkat konsistensi, pada putaran 1 sebesar 0,660, putaran ke 2 adalah 0,925, dan putaran ke 3 sebesar 0,881. Dengan demikian lokasi yang disepakati mempunyai prioritas tertinggi untuk jarak yang paling dekat dengan lokasi usaha PKL adalah pasar/pusat perbelanjaan.

Untuk jarak yang sedang, urutan prioritas hasil uji statistiknya dapat dilihat pada Tabel IV.53 berikut.

**TABEL IV.53**  
**URUTAN PRIORITAS LOKASI PKL DALAM JARAK SEDANG**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Lokasi PKL Dalam Jarak Sedang		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah
2.	Pasar	Pasar	Pasar
3.	Perumahan	Terminal	Terminal
4.	Terminal	Perumahan	Perumahan
	Uji konsistensi : 0,351	Uji konsistensi : 0,294	Uji konsistensi : 0,303

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

Berdasarkan hasil uji statistik, diketahui bahwa urutan prioritas lokasi dalam jarak sedang pada putaran 1 adalah perkantoran/sekolah, pasar/pusat perbelanjaan, perumahan penduduk, terminal, dengan tingkat konsistensi adalah 0,351. Sedangkan hasil pada putaran 2 dan 3 adalah sama, yaitu perkantoran/sekolah, pasar/pusat perbelanjaan, terminal, perumahan penduduk, dengan tingkat konsistensi masing-masing sebesar 0,294 dan 0,303. Berdasarkan besarnya tingkat konsistensi, maka urutan prioritas lokasi dengan jarak sedang adalah hasil uji statistik pada putaran 1. Namun urutan prioritas tertinggi berdasarkan jarak sedang untuk ketiga putaran adalah sama, yaitu perkantoran/sekolah.

Urutan prioritas lokasi untuk jarak jauh dapat dilihat pada Tabel IV.54 berikut.

**TABEL IV.54**  
**URUTAN PRIORITAS LOKASI PKL DALAM JARAK JAUH**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Lokasi PKL Dalam Jarak Jauh		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah	Perumahan
2.	Perumahan	Perumahan	Perkantoran/sekolah
3.	Terminal	Pasar	Terminal
4.	Pasar	Terminal	Pasar
	Uji konsistensi : 0,512	Uji konsistensi : 0,404	Uji konsistensi : 0,321

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

Putaran 1 dan 3 mempunyai hasil prioritas yang sama, yaitu perkantoran/sekolah, perumahan, terminal, dan pasar. Tingkat konsistensi pada putaran 1 adalah 0,512 sedangkan pada putaran 3 sebesar 0,321. Untuk putaran ke 2, urutan prioritas lokasinya adalah perkantoran/sekolah, perumahan, pasar/pusat perbelanjaan, dan terminal, dengan tingkat konsistensi sebesar 0,404. Berdasarkan hasil uji statistik yang diperoleh, diketahui bahwa lokasi prioritas tertinggi untuk jarak jauh pada masing-masing putaran adalah sama, yaitu perkantoran/sekolah.

#### **4.4.3.3. Kedekatan Dengan Tempat Tinggal PKL**

Untuk kategori kedekatan lokasi usaha PKL dengan tempat tinggal PKL, ukuran yang dipakai adalah jarak, terdiri dari jarak dekat (kurang dari 1 km), sedang (antara 1 km s/d 5 km), jauh (lebih dari 5 km). Hasil uji statistik yang dilakukan tampak pada Tabel IV.55 berikut.

**TABEL IV.55**  
**URUTAN PRIORITAS JARAK LOKASI PKL DENGAN TEMPAT TINGGAL PKL**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Lokasi PKL dengan Tempat Tinggal PKL		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Dekat	Dekat	Dekat
2.	Sedang	Sedang	Sedang
3.	Jauh	Jauh	Jauh
	Uji konsistensi : 0,778	Uji konsistensi : 0,750	Uji konsistensi : 1

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

Berdasarkan uji statistik, diperoleh hasil bahwa pada masing-masing putaran mempunyai urutan prioritas yang sama yaitu dekat, sedang, dan jauh. Besarnya tingkat konsistensi pada ke 3 putaran, menunjukkan hasil bahwa tingkat konsistensi tertinggi berada pada putaran 3, yaitu 1 (sangat tinggi), sedangkan pada 2 putaran sebelumnya masing-masing mempunyai tingkat konsistensi sebesar 0,778 dan 0,750. Dengan demikian, diketahui bahwa seluruh responden ahli sepakat untuk memprioritaskan jarak yang dekat antara lokasi PKL dengan tempat tinggal PKL.

Sedangkan urutan prioritas aspek dalam faktor fisik dapat dilihat pada Tabel IV.56 berikut.

**TABEL IV.56**  
**URUTAN PRIORITAS ASPEK DALAM FAKTOR FISIK**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Aspek Dalam Faktor Fisik		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota	Kemudahan aksesibilitas	Kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota
2.	Kemudahan aksesibilitas	Kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota	Kemudahan aksesibilitas
3.	Kedekatan dg tempat tinggal PKL	Kedekatan dg tempat tinggal PKL	Kedekatan dg tempat tinggal PKL
	Uji konsistensi : 0,720	Uji konsistensi : 0,733	Uji konsistensi : 0,891

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, terlihat bahwa nilai uji konsistensi tertinggi ada pada hasil putaran ke-3. Dengan demikian aspek yang menjadi prioritas utama dalam faktor fisik berkaitan dengan penentuan lokasi PKL di Kota Mataram adalah aspek kedekatan lokasi PKL dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat/keramaian kota.

#### 4.4.4. Kesimpulan Urutan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Ahli

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh urutan prioritas aspek dari masing-masing faktor penentuan lokasi PKL menurut responden ahli, pada Tabel IV.57 berikut.

**TABEL IV.57**  
**URUTAN PRIORITAS ASPEK MASING-MASING FAKTOR**  
**MENURUT AHLI**

No.	Urutan Prioritas Aspek Masing-masing Faktor		
	Faktor Ekonomi	Faktor Sosial	Faktor Fisik
1.	Waktu jualan	Ketertiban	Kedekatan dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota
2.	Jenis dagangan	Kebersihan	Kemudahan aksesibilitas
3.	Biaya angkutan	Kenyamanan	Kedekatan dg tempat tinggal PKL
4.		Keamanan	
5.		Keindahan	
	Uji konsistensi : 0,875	Uji konsistensi : 0,542	Uji konsistensi : 0,891

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

Hasil prioritas menurut uji Kendall menunjukkan bahwa urutan prioritas tertinggi untuk faktor ekonomi adalah waktu jualan, sedangkan prioritas pada faktor sosial adalah aspek ketertiban, dan aspek kedekatan antara lokasi PKL dengan kegiatan masyarakat/keramaian kota sebagai prioritas aspek pada faktor fisik.

Dalam kaitannya dengan pilihan prioritas bagi lokasi PKL, maka prioritas pilihan lokasi usaha bagi PKL makanan/minuman, non makanan, dan jasa adalah pasar/pusat perbelanjaan. Disusul kemudian dengan lokasi terminal, tempat wisata, perkantoran/sekolah, dan perumahan. Untuk pasar/pusat perbelanjaan para responden ahli masih mentolerir jarak yang dekat, yaitu kurang dari 100 m. Jarak sedang/jauh berlaku untuk lokasi disekitar perkantoran/sekolah.

Prioritas pilihan waktu berjualan bagi PKL makanan/minuman adalah pagi-malam hari. Sedangkan untuk PKL non makanan dan jasa, pilihan waktu prioritas mereka adalah pagi-sore hari.

#### **4.5. Implikasi**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat perbedaan prioritas aspek, terutama aspek-aspek yang termasuk dalam faktor sosial. PKL lebih memprioritaskan aspek keamanan dan kenyamanan, yang berhubungan dengan kekhawatiran mereka terhadap penggusuran yang kadang-kadang dilakukan oleh pemerintah. Sementara pemerintah lebih memfokuskan pada aspek ketertiban, disamping aspek kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Penggusuran yang terkadang memang dilakukan oleh aparat pemerintah bertujuan untuk menjaga ketertiban kota, karena keberadaan PKL pada satu lokasi tertentu sering tidak terkendali, sehingga menyebabkan dampak negatif terutama kesemrawutan dan kemacetan.

Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan faktor fisik, pemerintah hanya mentolerir jarak yang dekat bagi aktivitas PKL di sekitar pasar/pusat perbelanjaan. Sedangkan untuk lokasi-lokasi di sekitar perkantoran/sekolah, pemerintah lebih memprioritaskan jarak yang sedang,

bahkan ada yang memprioritaskan jarak yang jauh. Padahal baik PKL maupun sebagian besar masyarakat cenderung memprioritaskan jarak yang dekat bagi PKL, terutama PKL dengan jenis dagangan makanan/minuman.

Perbedaan ini tampak pada banyaknya PKL yang beraktivitas di sekitar lokasi-lokasi perkantoran/sekolah, seperti di kawasan Jl. Veteran, Jl. Bung Karno, dan Jl. Pemuda, sehingga pada jam-jam tertentu, lalu lintas khususnya di kawasan Jl. Veteran dan Jl. Pemuda sering macet, seperti yang tampak pada gambar 3.6.

## **BAB V P E N U T U P**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan prioritas aspek dari masing-masing faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan fisik menurut PKL, pemerintah kota, masyarakat, dan para ahli adalah sebagai berikut :

- A. Aspek prioritas dalam faktor ekonomi menurut PKL adalah waktu jualan dan jenis dagangan, sama dengan aspek yang diprioritaskan oleh pemerintah kota. Sedangkan menurut masyarakat dan para ahli urutan aspek yang diprioritaskan dalam faktor ekonomi ini ditambah dengan aspek biaya angkutan, sehingga urutan prioritasnya menjadi waktu jualan, jenis dagangan, dan biaya angkutan.
- B. Dalam faktor sosial, menurut PKL aspek yang diprioritaskan adalah keamanan dan kenyamanan. Aspek keamanan disini berkaitan dengan kekhawatiran mereka pada tindakan penggusuran yang kadang-kadang dilakukan oleh pemerintah, sehingga sering menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi mereka dalam berdagang. Sedangkan menurut pemerintah kota, aspek yang diprioritaskan adalah aspek ketertiban, yang disusul dengan aspek kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Menurut pemerintah tanpa adanya ketertiban keberadaan PKL akan menimbulkan dampak negatif seperti kesemrawutan, kemacetan, sampah yang menumpuk yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan warga masyarakat lainnya. Sementara itu masyarakat lebih memprioritaskan aspek keamanan, kenyamanan, dan kebersihan. Keamanan disini berkaitan dengan keleluasaan mereka bergerak dan terlindung dari lalu lintas kendaraan. Sedangkan kenyamanan dan

kebersihan disini berkaitan dengan ketiadaan hambatan dan gangguan yang disebabkan ruang yang sempit dan bau sampah. Sedangkan para ahli memprioritaskan aspek ketertiban sebagai prioritas utama yang disusul kemudian dengan aspek kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan keindahan.

- C. Berdasarkan aspek-aspek dalam faktor fisik, PKL lebih memprioritaskan aspek yang berkaitan dengan kedekatan lokasi usaha PKL dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat/keramaian kota, kedekatan lokasi usaha PKL dengan tempat tinggal PKL, dan kemudahan aksesibilitas. Sementara itu pemerintah hanya memprioritaskan aspek kedekatan lokasi usaha PKL dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat/keramaian kota. Masyarakat cenderung memprioritaskan aspek kedekatan lokasi PKL dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat/keramaian kota dan kemudahan aksesibilitas. Tidak berbeda jauh dengan komponen responden lainnya, maka para ahli pun memprioritaskan kedekatan lokasi PKL dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat/keramaian kota sebagai prioritas utama, yang disusul dengan kemudahan aksesibilitas dan kedekatan lokasi PKL dengan tempat tinggal PKL.

## **5.2. Rekomendasi Bagi Pemerintah Kota Mataram**

Berdasarkan hasil survey dan analisis yang telah dilakukan, maka hal-hal yang dapat dikemukakan sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Kota Mataram berkaitan dengan prioritas aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi PKL adalah sebagai berikut :

1. Aspek yang diprioritaskan dalam faktor ekonomi adalah mengatur waktu jualan. Dalam hal ini pemerintah seyogyanya mengatur waktu jualan bagi para PKL, sehingga dapat menghindari menumpuknya jumlah PKL pada satu lokasi tertentu, yaitu lokasi-lokasi

yang tingkat intensitas kunjungannya tinggi, yang mengakibatkan terjadinya kompetisi diantara para PKL untuk beraktivitas di tempat tersebut.

2. Dalam kaitannya dengan faktor fisik, maka aspek kedekatan lokasi PKL dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat adalah aspek yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukan lokasi PKL, terutama pada lokasi-lokasi di sekitar pasar/pusat perbelanjaan.

### 5.3. Usulan Studi Lanjut

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan sebagai usulan studi lanjut dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian tentang penentuan lokasi PKL berdasarkan kesepakatan *stakeholder*, dalam hal ini adalah PKL, pemerintah kota, dan konsumen, dengan memasukkan aspek budaya (*culture*) sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian.
2. Penelitian menyangkut penentuan lokasi PKL secara eksplisit yaitu penunjukkan langsung lokasi-lokasi yang sesuai bagi aktivitas PKL dalam ruang/wilayah berdasarkan kesepakatan para *stakeholder*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Budihardjo, Eko. 1993. *Kota Berkelanjutan*. Bandung : Alumni.
- Daldjoeni, N. 1997. *Geografi Baru, Organisasi Keruangan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : Alumni.
- Djakti, Dorodjatun Kuntjoro. 1986. *Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Gilbert, Alan dan Josef Gugler. 1996. *Urbanisasi Dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mc. Gee, TG and Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers In Southeast Asian Cities Planning For The Bazaar Economy*. Ottawa : International Development Research Centre.
- Nasir, M. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nelson, R.L. 1958. *The Selection Of Retail Location*. New York : FE. Dodge. Co.
- Noer Effendi, Tadjudin. 2000. *Pembangunan, Krisis, dan Arah Reformasi*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Rachbini, Didik J dan Abdul Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*. Jakarta : LP3ES.
- Ramli, Rusli. 1992. *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta : Ind-Hill. Co.
- Reksohadiprodjo, Sukanto dan A.R. Karseno. 1994. *Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta : BPFE.

- Sethuraman, S.V. (ed.). 1981. *The Urban Informal Sector In Developing Countries, Employment, Poverty and Environment*. Geneva : International Labour Office.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Soehartono, Irawan. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Soto, Hernando De. 1991. *Masih Ada Jalan Lain, Alih Bahasa Masri Maris*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Surakhmad, Winarno. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*. Bandung : Tarsito.
- Tika, Moh. Pabundu. 1997. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga – Jilid 1 -*. Jakarta : Erlangga.
- Umar, Husein. 2001. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Zakaria, Fathurrahman. 1998. *Mozaik Budaya Orang Mataram*. Mataram : Yayasan Sumurmas Al Hamidy.

#### **KOLOKIUUM/SKRIPSI/TESIS**

- Fachrudin, M. 1998. *Studi Karakteristik Sirkulasi Pejalan Kaki di Kawasan Perdagangan Johar*. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hany Ambarwaty, Srie. 2003. *Studi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Pemanfaatan Ruang Di Kota Salatiga*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hariyono, Paulus. 2002. *Dampak Kehadiran Pusat Perbelanjaan Terhadap Kegiatan Perdagangan dan Jasa disekitarnya (Studi Kasus Pada Pusat Perbelanjaan Java Supermall)*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pamungkas, Kukuh Sari. 2003. *Evaluasi Kinerja Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widjajanti, Retno. 2000. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus : Simpang Lima Semarang)*. Tesis tidak

diterbitkan. Bidang Khusus Perencanaan Kota, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.

Widodo, Ahmadi. 2000. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.

## JURNAL

Rachbini, Didik J. "Dimensi Ekonomi dan Politik Pada Sektor Informal." Prisma, edisi 5, tahun 1991, Mei.

Wirahadikusuma, Miftah. "*Sektor Informal Sebagai Bumper Pada Masyarakat Kapitalis*." Prisma, edisi 5. Jakarta : LP3ES.

Wirosardjono, Sutjipto. 1979. "*Masalah tenaga Kerja Di Sektor Informal*." Prisma. Jakarta : LP3ES.

## HASIL PENELITIAN

Firadusy ,Carunia Mulya. 1995 (penyunting). *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Dewan Riset Nasional. Jakarta.

## BUKU DATA/LAPORAN

*Kota Mataram Dalam Angka Tahun 2001*. Biro Pusat Statistik Kota Mataram, 2001.

*Laporan Studio Perencanaan dan Pembangunan Kota Bogor*. Mahasiswa CBUIM IV Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro. 2002.

*Renstra Kota Mataram 2001-2005*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram. 2001.

*Sosialisasi Tata Ruang Tahun 2001*. Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram.

*Structure Plan of Kuala Lumpur Tahun 2020*. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

## PERATURAN dan PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1996 Tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban.

Keputusan Walikota Mataram Nomor 1/KPTS/2000 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Kesepakatan Bersama Antara Walikota Mataram dengan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Mataram Nomor 433/XII/2002 Tentang Penempatan Sementara Pedagang Kaki Lima Eks Jl. A.A. Gde Ngurah Cakranegara.

#### **MAJALAH/SURAT KABAR/TERBITAN BERKALA**

Lombok Post. "*Pinggir Jalan Jadi Rebutan.*" Lombok Post, edisi 12 Januari 1998.

Lombok Post. "*PKL Boleh Jualan di Jalan Bung Hatta.*" Lombok Post, edisi 2 April 1998.

Lombok Post. "*Mengusur Kawanan Kupu-kupu Malam.*" Lombok Post, edisi 18 Februari 2002.

Lombok Post. "*Semrawut di Jalan AA Gde Ngurah Tak Terkendali.*" Lombok Post, edisi 16 Maret 2002.

Lombok Post. "*Masih Tentang Jalan AA Gde Ngurah Yang Semrawut Itu.*" Lombok Post, edisi 17 Maret 2002.

Lombok Post. "*Mataram Kian Semrawut.*" Lombok Post, edisi 11 April 2002.

Lombok Post. "*PKL Lapangan Kerja Baru Masyarakat.*" Lombok Post, edisi 8 Agustus 2002.

#### **INTERNET**

*Konsep Sektor Informal Di Jakarta.* <http://www.urbanpoor.or.id>, tanggal 24 Juli 2003

*Pertumbuhan Kota-kota Di Dunia Dan Indonesia.* [www.bpkpenabur.or.id](http://www.bpkpenabur.or.id), tanggal 15 Juni 2003

*Tren Penduduk Indonesia Di Awal Millenium III.* <http://adminduk.depdagri.go.id>, tanggal 15 Juni 2003